



PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KOMINFO
STATISTIK
PERSANDIAN**

KAB. POLEWALI MANDAR

Tahun 2025

Ikhtisar Eksekutif

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2025, dengan capaian Sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (89,00)	Informatif (90,75)	101,96
Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terstandarisasi Kolaborasi 3 : 4	Terstandarisasi Kolaborasi 3 : 4	100
Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE			
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terdefenisi (2,90)	Terdefenisi (2,90)	100
Indikator : Tingkat Kematangan Statistik Sektoral			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keamanan Informasi	23,33%	25,00%	107,15
Indikator : Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (83,75)	A (84,00)	100,17
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
			102,13%

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar **Rp 4.229.360.659,-** dan terealisasi **Rp 4.299.284.375,-** atau persentase realisasi **98,37%**. Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dinyatakan **"berhasil"**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **101,85%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **98,37%**.

Kata Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2024.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas KominfoSP mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**.

Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan 2019-2025, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas KominfoSP dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas KominfoSP semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Dinas Kominfo SP



Dr. Aeo Musaddad HM, M.Ag., M.Si

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	6
A. Umum	7
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	8
C. Isu Strategis Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	19
B. Penetapan Kinerja 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Akuntabilitas Kinerja	27
B. Akuntabilitas Keuangan	69
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	

Daftar Gambar, Chart dan Tabel

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	9
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2025-2029	20
Gambar 3.1	Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 Oleh Komisi Informasi Prov. Sulbar Via Zoom Meeting Pada Perangkat Daerah	37
Gambar 3.2	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan SIA SPBE Kepada Admin Perangkat Daerah 2025	52
Gambar 3.3	Pembinaan Statistik Sektoral Oleh BPS Melalui Kegiatan Coaching Clinic Statistik Sektoral Tahun 2025	57
Gambar 3.4	Pendampingan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kepada Perangkat Daerah Tahun 2025	59
Gambar 3.5	Rapat Evaluasi Kinerja Pemangku SAKIP Dinas Kominfo SP Terkait Pencapaian Target Kinerja 2025	68
Tabel. 1.1	Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dinas Kominfo SP Tahun 2025	14

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP Tahun 2025-2029	21
Tabel 2.2	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025	32
Tabel 3.2	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2025	36
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2025.....	37
Tabel 3.4	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE Pemkab Polman Tahun 2025	40
Tabel 3.5	Penataan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan yang Telah Didukung Teknologi Sistem Informasi Tahun 2025	42
Tabel 3.6	Penataan Bandwith Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025	46
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Tahun 2025	51
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025	54
Tabel 3.9	Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral Tahun 2024	54
Tabel 3.10	Nilai Aspek Indeks Domain Tahun 2024	55
Tabel 3.11	Pemenuhan Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025	58
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Statistik Tahun 2025.....	60
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2025	61
Tabel 3.14	Pemetaan Fungsi-Fungsi Utama Pemerintahan yang Telah Didukung Keamanan Informasi Tahun 2025	63
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Tahun 2025	65
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2025.....	66
Tabel 3.17	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Kominfo SP Tahun 2025.....	68
Tabel 3.18	Akuntabilitas Keuangan Dinas Kominfo SP Tahun 2025.....	69
Chart 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Kominfo SP Berdasar Jenis Kelamin	13
Chart 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Kominfo SP Berdasar Status Kepegawaian	13
Chart 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Kominfo SP Berdasar Golongan Ruang	14
Chart 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Kominfo SP Berdasar Jenjang Pendidikan.....	14
Chart 1.5	Struktur Keuangan Dinas Kominfo SP 2025	16
Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Target dengan Realisasi 2025, 2024, 2023, 2022 dan Target Renstra (akhir)	33
Chart 3.2	Perbandingan Indeks SPBE Pemkab Polman Tahun 2024-2025	38
Chart 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE Pemkab Polman Tahun 2025	41
Chart 3.4	Peningkatan Kapasitas Bandwith Tahun 2024-2025	48
Chart 3.5	Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2023 s.d 2025 dan Blankspot Desa per Kecamatan Tahun 2025	49
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Statistik Sektoral Pemkab Polman Tahun 2023 dan 2024 Target Dengan Realisasi 2023, 2024 dan Target Renstra (Akhir)	56
Chart 3.7	Capaian Kinerja Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi Tahun 2025	62
Chart 3.8	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Kominfo SP Tahun 2023-2025	66
Chart 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo SP Tahun 2025	69

01 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum

Tugas dan Fungsi Organisasi

Isu Strategis Organisasi



A. Umum

1. Latar belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas KominfoSP) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2025 ini, sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk memastikan kepatuhan, kualitas LAKIP dan Peningkatan SAKIP;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;



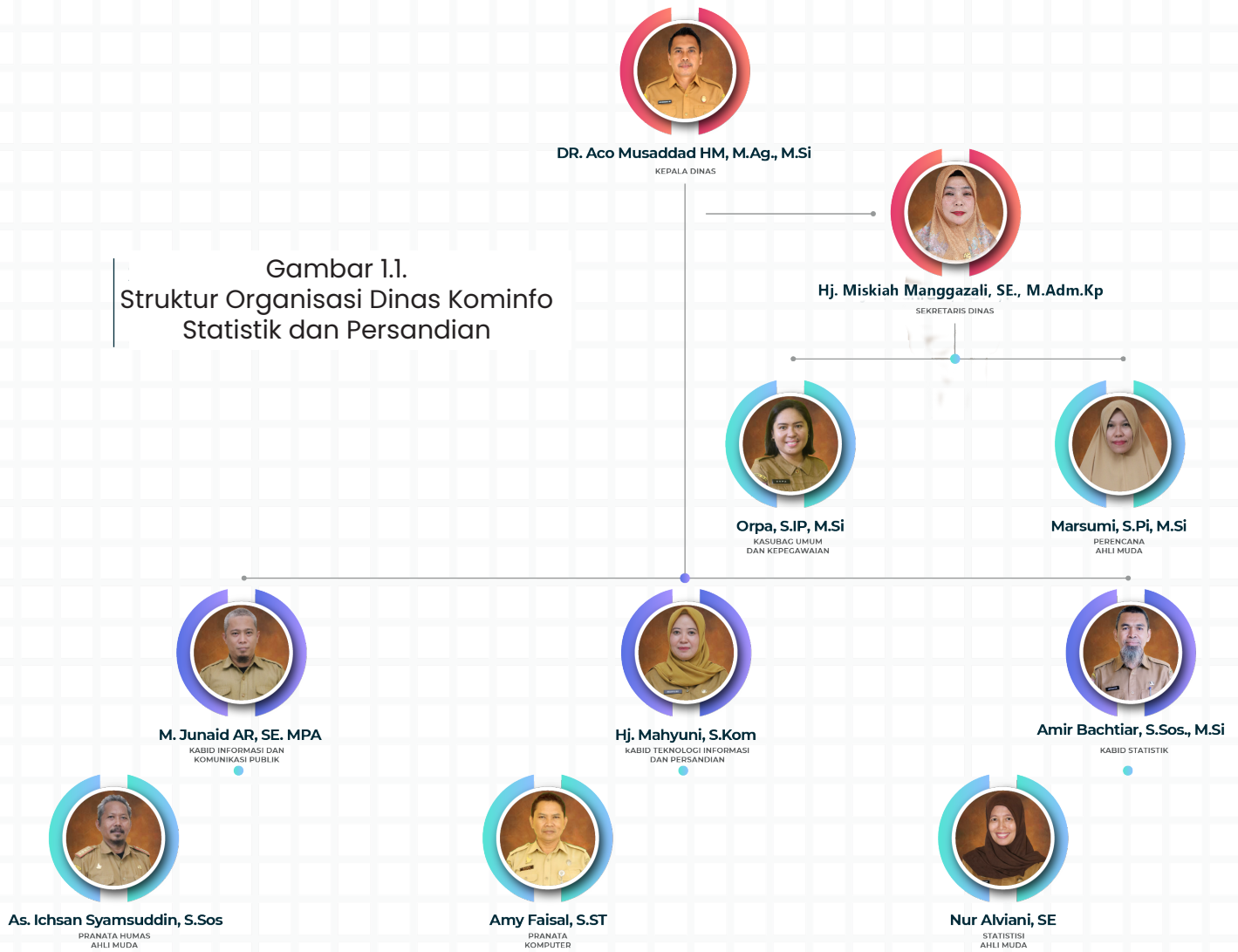
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan **unsur pelaksana** urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Kominfo
Statistik dan Persandian



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, serta membantu Bupati dalam urusan komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Perumusan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 2 Pelaksanaan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
- 4 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya serta Persandian
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta Persandian

B.1. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Daerah

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KominfoSP dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya Layanan Publik Berbasis Digital

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pelayanan penting dan dilakukan fungsi untuk mengetahui kondisi saat ini, sehingga dapat diketahui gap atau kesenjangan dengan kondisi yang seharusnya, serta factor penyebab yang mempengaruhi. pengelolaan kualitas Belum optimalnya pengelolaan Perangkat informasi komunikasi public menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Belum optimalnya pengelolaan informasi komunikasi public dipengaruhi oleh :

- a. Belum meratanya pemahaman Badan Publik dan Publik (Masyarakat) terkait keterbukaan informasi publik, dimana informasi publik tersebut telah dikelola melalui platform digital seperti website dan e PPID Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah.
- b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.
- c. Belum optimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas KominfoSP hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta Kominfo yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.
- d. Informasi publik yang lengkap dan terupdate juga belum sepenuhnya tersedia pada Website dan e PPID Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

2) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Belum Memadai.

Infrastruktur TIK adalah pondasi teknologi yang memungkinkan instansi melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien di era digital. Komponen utama infrastruktur TIK antara lain adalah : Jaringan intra Pemerintah, Pusat Data (Data Center), Jaringan Internet dan Sistem Penghubung Layanan (SPLP). Sejumlah faktor yang menyebabkan infrastruktur TIK Belum memadai, sebagai berikut :

- a. Perbedaan prioritas Pembangunan, dalam hal ini perbedaan prioritas Pembangunan memiliki peran krusial dalam membentuk lansekap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia, perbedaan prioritas ini sering membedakan pendekatan antar wilayah komersial (perkotaan) dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

- b. Kondisi geografis wilayah, dalam hal ini meliputi tantangan topografi yang menyulitkan instalasi fisik dan menghambat jangkauan sinyal.
- c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Belum memadai, dimana SPLP sebagai “jembatan” yang menghubungkan berbagai aplikasi yang telah terbangun, mengakibatkan infrastruktur TIK tidak dapat saling terhubung dengan efektif, karena membutuhkan infrastruktur TIK untuk dapat berfungsi melalui server yang berada di pusat data pemerintah dan terhubung melalui jaringan intra pemerintah.
- d. Pemanfaatan TIK belum optimal, juga disebabkan kurangnya SDM yang kompeten untuk mengelola layanan digital secara efektif.

3) Data Statistik Sektorial Kurang Berkualitas

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum seluruhnya terstandarisasi, metadata belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data sektoral tidak mengikuti kaidah statistik;
- b. Kurangnya relevansi antara data yang dibutuhkan dan yang tersedia; dan
- c. Belum ada keseragaman standar data oleh produsen data;

4) Kesenjangan Kemajuan Teknologi Digital Dengan Sistem Keamanan Informasi

Kemajuan teknologi digital berkembang jauh lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengamankan dan melindungi informasi yang ada di dalamnya. Kesenjangan ini mengacu pada perbedaan kecepatan antara inovasi teknologi yang terus berkembang pesat serta perlindungan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan data dan privasi di era digital. Berbagai faktor penyebab utama kesenjangan antara pesatnya kemajuan teknologi digital dengan lambatnya adaptasi keamanan informasi, antara lain :

- a. Teknologi keamanan informasi belum diadopsi sepenuhnya;
- b. SOP terkait keamanan informasi belum memadai
- c. Pengembangan kompetensi SDM keamanan informasi masih sangat minim;

B.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah 5 Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis terkait urusan kewenangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Transformasi Pemerintahan Digital

Teknologi Informasi Komunikasi saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern, dan Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif, dengan menginisiasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital di Indonesia. Berakhirnya masa berlaku Perpres SPBE di tahun 2024/2025, sehingga pada tahun 2025 dilakukan revisi/perbaikan kebijakan. Momentum selanjutnya adalah muncul berbagai inisiatif digitalisasi yang komprehensif yang memicu kesadaran akan pentingnya digitalisasi dengan cara yang cepat. Transformasi digital dalam pelayanan publik bukan hanya mengganti proses manual dengan sistem digital. Lebih dari itu, transformasi tersebut adalah juga tentang mengubah budaya organisasi, mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, serta memastikan setiap warga negara tanpa kecuali dapat menikmati manfaat dari teknologi digital. Faktor penting lain dalam transformasi digital adalah pembangunan infrastruktur yang memadai, Ketersediaan SDM yang memadai, Keamanan data dan siber serta tantangan implementasi di wilayah terpencil seperti Desa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

2. Transformasi Digital Komunikasi Pemerintah

Era digital memberikan tantangan besar terkait pengelolaan informasi, terutama dalam menghadapi disinformasi dan masalah privasi. Sebagai contoh, berita palsu atau hoaks dapat dengan mudah tersebar melalui platform media sosial, yang menjadi tantangan besar dalam dunia komunikasi digital. Namun dibalik tantangan tersebut, ada peluang besar. Kemudahan akses terhadap

informasi di internet memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dengan cepat dan efisien. Selain itu, globalisasi komunikasi yang dipacu oleh internet memungkinkan individu di berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan lebih mudah, memperkaya perspektif budaya dan sosial. Masyarakat dapat berbagi ide, pengalaman, dan pendapat tanpa batasan geografis, membuka ruang untuk diskusi global yang lebih inklusif. Era digital tidak hanya memengaruhi cara komunikasi berlangsung tetapi juga menciptakan transformasi budaya yang signifikan. Dalam ranah profesional, transformasi digital menciptakan peluang dan tantangan baru. Para pekerja kini harus menguasai keterampilan digital sebagai syarat kompetensi dasar.

Transformasi komunikasi digital (Komdigi) merujuk pada perubahan fundamental dalam cara individu, organisasi, dan masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi. Proses ini melibatkan adopsi teknologi digital ke dalam seluruh aspek komunikasi, dari infrastruktur hingga keahlian individu, dengan menjalankan beberapa inisiatif untuk mempercepat transformasi komunikasi public melalui pemerataan akses internet, Gerakan literasi digital nasional, Digitalisasi pelayanan public, penanganan hoaks dan disinformasi dan perlindungan data pribadi.

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Data sektoral memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan di dunia. Data ini digunakan untuk perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, 6 evaluasi program, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data sektoral juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Peran data sectoral meliputi perumusan kebijakan, perencanaan Pembangunan, evaluasi program, pengambilan Keputusan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi Masyarakat, peningkatan efisiensi dan pengembangan inovasi. Isu data sektoral global mengacu pada tantangan dan permasalahan terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data statistik yang dihasilkan oleh berbagai sektor di seluruh dunia. Isu-isu ini mencakup beragam aspek, mulai dari kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, kebutuhan penyediaan data yang cepat, hingga masalah tata kelola data dan kurangnya standar data. Terkait peningkatan data sectoral, Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat dan relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan. BPS, sebagai pembina statistik, berperan dalam membina instansi lain untuk menghasilkan data yang berkualitas sesuai standar.

4. Keamanan Siber

Isu global terkait siber semakin kompleks dan menjadi perhatian utama. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) semakin berkembang pesat dan telah menjadi bagian integral dari banyak sektor, termasuk keamanan siber. AI mampu membantu mengidentifikasi ancaman dengan cepat, melakukan analisis data yang kompleks, serta memberikan solusi yang lebih efektif dalam melindungi sistem dan data. Isu strategis nasional terkait siber di Indonesia mencakup Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN Kamsiber) dan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN). RAN Kamsiber adalah upaya terencana dan terukur untuk mengimplementasikan fokus area keamanan siber nasional, sementara SKSN bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dari penyalahgunaan sumber daya siber dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi krisis siber. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada perlindungan infrastruktur kritis seperti sektor energi, transportasi, kesehatan, dan telekomunikasi dari ancaman siber.

B.3. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh 54 Pegawai aktif yang terdiri dari 26 Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 Orang PPPK Penuh Waktu, 22 orang PPPK Paruh Waktu dan 4 Orang Tenaga Outshorcing. Komposisi Pegawai Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :



Chart 1.1. Komposisi Pegawai Dinas KominfoSP Berdasar Jenis Kelamin

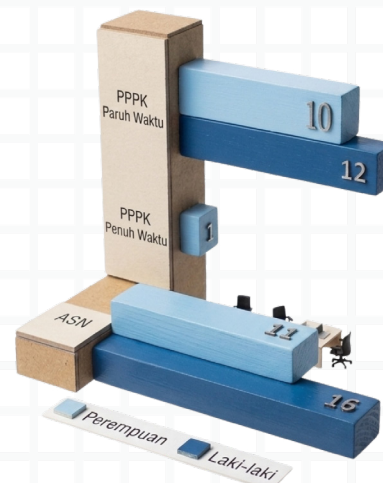


Chart 1.2. Komposisi Pegawai Dinas KominfoSP Berdasar Status Kepegawaian

Chart 1.3 Komposisi Pegawai Dinas KominfoSP Berdasar Golongan Ruang

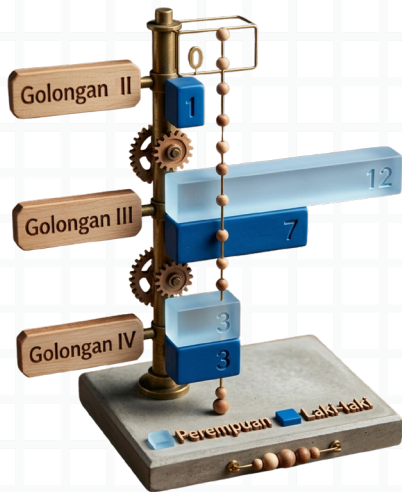
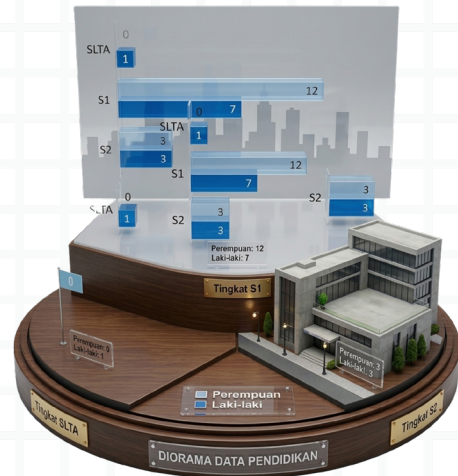


Chart 1.4 Komposisi Pegawai Dinas KominfoSP Berdasar Jenjang Pendidikan



B.4. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Organisasi

Ketersediaan sarana prasarana perkantoran sangat penting untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Adapun sarana dan prasarana Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Volume	Satuan
1	Golongan Tanah meliputi :		
	- Tanah	1	Unit
2	Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :		
	Alat-alat Besar		
	- Genset	1	Unit
	- Mesin Pompa Air / Sumur Bor	2	Unit
	Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda Dua	8	Unit
	- Kendaraan Roda Empat (Mobil Satellite Link Van)	8	Unit
	- Station Waqon	1	Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- GPS	4	Unit
	- Scanner	2	Unit
	- Mesin Ketik Manual Langewango (18-27)	2	Unit
	- Lemari Kaca	7	Buah
	- Lemari buku/arsip	4	Unit
	- Lemari besi/metal	3	Buah
	- Papan Visual	1	Buah
	- Mesin Absensi	2	Buah
	- Meja ½ Biro	10	Buah
	- Meja rapat	34	Buah
	- Meja Kerja	18	Buah
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
	- Meja Panjang	1	Buah
	- Kursi Rapat	190	Buah

- Kursi Rapat	190	Buah
- Kursi Biasa	70	Buah
- Kursi Tamu	3	Buah
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
- Tempat Tidur Kayu	20	Buah
- Lemari Es	1	Unit
- AC Split	13	Unit
- AC Conditioning	9	Unit
- Kipas Angin	12	Unit
- Alat Dapur Lainnya	1	Unit
- Radio	2	Unit
- Televisi	15	Unit
- Loudspeaker	1	Unit
- Microphone	17	Unit
- Mic Conference	2	Unit
- Tangga Aluminium	1	Unit
- Sound System	5	Unit
- Mimbar/Fodium	1	Unit
- Keyboard	2	Buah
- Perkakas Bengkel	1	Unit
- Wireless	4	Unit
- Laptop	28	Unit
- Note Book	3	Unit
- Printer	10	Unit
- PC Unit	9	Unit
- CPU	2	Unit
- Speaker	1	Unit
- Peralatan Personal Komputer	3	Unit
- Peralatan Komputer Lainnya	4	Unit
- Alat Peralat Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	1	Unit
- Distling Apparatus	5	Unit
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
- Digital Kamera	6	Unit
- Peralatan Studio Audio Lainnya	6	Unit
- Audio Mixing Stasioner	1	Unit
- Microphone/Boom Stand	2	Unit
- Caption Generator	2	Unit
- Batteray Charger	2	Unit
- Battery Pack Kamera	2	Unit
- Alat Komunikasi Radio	2	Unit
- Telephrompter	1	Unit
- Tripod Kamera	2	Unit
- Lensa Kamera	1	Unit
- Layar Film/Proyektor	2	Unit
- Monopod	1	Unit
- Alat Studio Lainnya	4	Unit
- Monitor	1	Unit
- Camera Video	3	Unit

	- Monitor	1	Unit
	- Camera Video	3	Unit
	- Head Set	8	Unit
	- Drone	2	Unit
	- Stabilizier	1	Unit
	- Handy Talky (HT)	5	Unit
	- Alat Studio Video Lainnya	1	Unit
	- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan Lainnya	2	Unit
	- Alat Laboratorium Makanan Lainnya	1	Unit
	- Router	1	Unit
	- Modem	1	Unit
3	Golongan Gedung meliputi :		
	- Gedung Kantor	5	Unit
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Local Area Network (LAN)	1	Unit
	- Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit
	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	Unit

Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, 2026

B.5. Aspek Keuangan Organisasi

Chart 1.5. Struktur Keuangan Dinas KominfoSP 2025



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP 2025

B.6. Sistematika Penyusun LAKIP

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan LAKIP ini mengacu surat Sekretaris Daerah Nomor B-12/000.8.6.3/Org/II/2026, Tanggal 18 Februari 2026, terdiri atas 4 (Empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang memuat penjelasan singkat tentang akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan laporan.
- B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi memuat Penjelasan umum tentang Perangkat Daerah dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis, tugas dan fungsi organisasi, Kondisi sumber daya Pegawai, Sarana prasarana penunjang kinerja organisasi, Aspek keuangan dan Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis memuat penjelasan singkat tentang Renstra, Meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama/Sasaran).
- B. Penetapan Kinerja memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.
- C. Instrumen Pendukung memuat penjelasan tentang instrument yang mendukung kemudahan pelaksanaan kinerja , seperti penggunaan system yang berbasis elektronik).

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

- A. Akutabilitas Kinerja memuat perbandingan target dan realisasi kinerja , uraian keberhasilan/kegagalan serta Solusi yang dilakukan, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan serta analisis efesiensi sumber daya (Anggaran).
- B. Akuntabilitas Keuangan memuat informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

- A. Akutabilitas Kinerja memuat perbandingan target dan realisasi kinerja , uraian keberhasilan/kegagalan serta Solusi yang dilakukan, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan serta analisis efesiensi sumber daya (Anggaran).
- B. Akuntabilitas Keuangan memuat informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Memuat informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

Memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025,Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2025, Laporan Monev Rencana Aksi 2025

02 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Penetapan Kinerja

Instrumen Data Pendukung



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis 5 tahun Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2025 -2029 tertuang dalam Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut kemudian menjadi acuan dalam perumusan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Dinas komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, serta menetapkan arah kebijakan kebijakan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian untuk lima tahun mendatang.

Dokumen Renstra Dinas Kominfo Statistik dan Persandian adalah bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Visi Misi Bupati Polewali Mandar dituangkan dalam RPJMD, dimana Renstra Perangkat Daerah dalam penyusunannya harus berpedoman pada dokumen RPJMD, dengan kata lain Renstra adalah

penjabaran Visi Misi Bupati Polewali Mandar dalam konteks urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan masa depan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Terpilih. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar mencakup 5 (lima) pokok visi :

Sehat, Cerdas, Maju, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, serta Berwawasan Lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan visi Pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah dirumuskan Upaya-upaya yang akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi Pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029. Misi 1 (satu) RPJMD Kab. Polewali Mandar adalah misi yang diintervensi oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dengan misi :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government).

Di dalam dokumen Renstra Dinas Kominfo Statistik dan Persandian 2025-2029 juga telah dirumuskan tujuan strategis ke dalam sasaran strategis . Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2025–2029



Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indikator : Tingkat Kematangan Aspek Strategi, Rencana, Tata Kelola dan Manajemen Pemerintahan Digital	Indikator : Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Indikator : Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi	Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian	Bidang Statistik	Sekretariat

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : specific (jelas), measurable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil).

Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU. Tujuan dan sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital		Indeks SPBE	Sangat Baik 3,90	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital*	-	Kurang (1,2)	Kurang (1,2)	Cukup (2,0)	Cukup (2,0)	Cukup (2,0)
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik (2,90)	Baik (2,93)	Baik (2,93)	Baik (2,96)	Baik (2,96)	Baik (2,99)
			Indeks KAMI	Baik (650)	Baik (655)	Baik (660)	Baik (665)	Baik (670)	Baik (675)
		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menuju Informatif (89,00)	Menuju Informatif (89,50)	Informatif (90,00)	Informatif (90,50)	Informatif (91,00)	Informatif (91,50)
		Meningkatnya kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandar disasi Kolaborasi (3;4)	-	-			
			Tingkat Kematangan Aspek Strategi, Rencana, Tata Kelola dan Manajemen Pemerintahan Digital*	-	Rintisan (1,5)	Rintisan (1,5)	Terkelola (2,0)	Terkelola (2,0)	Terkelola (2,0)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Terdefenisi (2,90)	Terdefenisi (2,93)	Terdefenisi (2,93)	Terdefenisi (2,96)	Terdefenisi (2,96)	Terdefenisi (2,99)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keamanan Informasi	Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi	23,33	25,00	25,83	26,66	27,50	28,33
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (83,75)	A (84,22)	A (84,42)	A (84,62)	A (85,02)	A (85,25)

B. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Target : (89,00) Menuju Informatif



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Kolaborasi (3:4)



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator : Tingkat Kematangan Statistik Sektor

Target : Terdefinisi (2,90)



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi

Indikator : Persentase Fungsi Utama Pemerintahan yang Didukung Keamanan Informasi

Target : 23,33 Persen



SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A (83,75)

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas KominfoSP Tahun 2025 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Rp.
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 425.188.060,-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.379.713.260,-
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 9.476.600,-
Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 5.317.760,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.964.014.909,-
Jumlah		Rp.4.299.360.659,-

C. Instrumen Pendukung 2025

Penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas menjadi suatu tuntutan utama. Dalam Upaya meningkatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, Dinas kominfoSP mengaplikasikan instrument layanan berbasis elektronik, sebagai berikut:

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



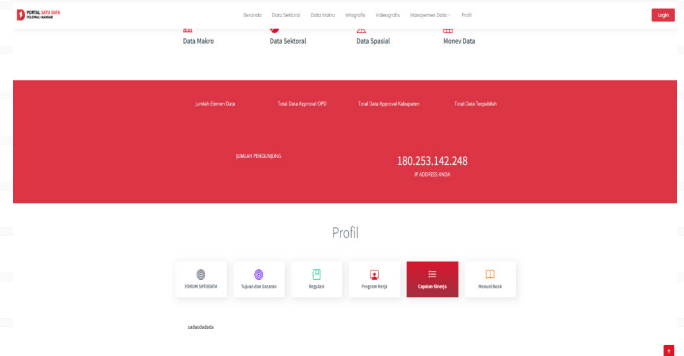
No	Satuan Kerja	Perencanaan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelebaran Kinerja	Rencana Pelaksanaan Target	Rencana Aksi
1	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Q	Q	Q	Q	
2	Sebataraat Daerah	Q	Q	Q	Q	
3	Sebataraat DPRD	Q	Q	Q	Q	
4	Inspektorat	Q	Q	Q	Q	
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Q	Q	Q	Q	
6	Dinas Kesehatan	Q	Q	Q	Q	
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang	Q	Q	Q	Q	
8	Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan	Q	Q	Q	Q	
9	Dinas Sosial	Q	Q	Q	Q	
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Q	Q	Q	Q	

Halaman Perencanaan Kinerja

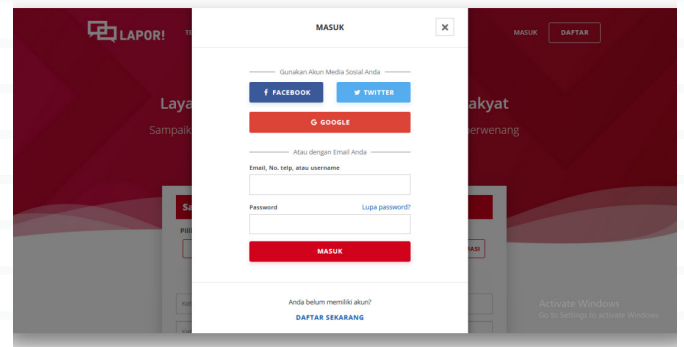
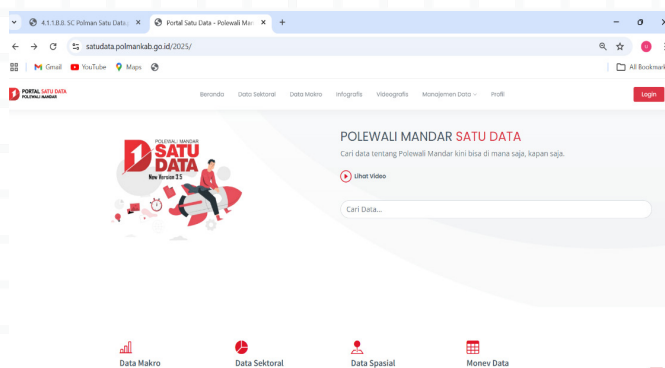
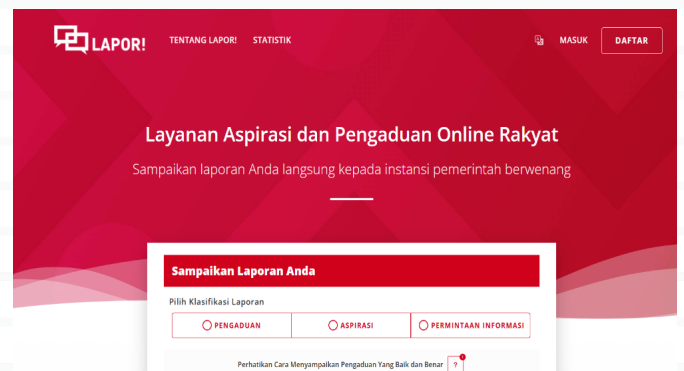
LAKIP Kominfo SP

Aplikasi Sistem Informasi Kinerja (SIMKINERJA) Terintegrasi adalah platform digital terintegrasi untuk merencanakan, mengukur, memantau dan melaporkan kinerja instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Fitur utama aplikasi Simkinerja adalah Perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Kinerja. Manfaat Simkinerja Terintegrasi: Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan efisiensi anggaran pemerintah, mempermudah Perangkat Daerah dalam memantau dan mengendalikan kinerja, menjadi dasar penilain kinerja instansi dan individu, serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui jaringan internet.

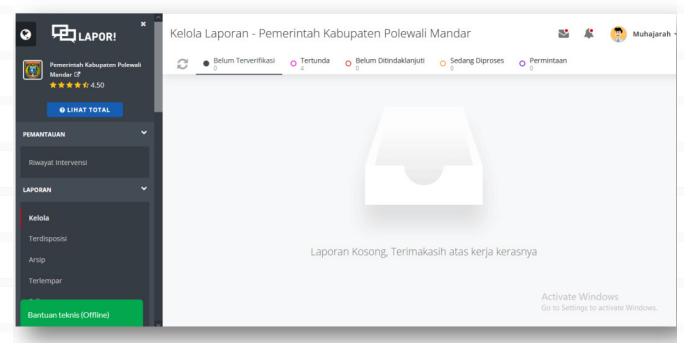
Melalui aplikasi ini, Perangkat daerah sebagai produsen data sectoral dapat melakukan pengelolaan data dengan tertib, up to date dan valid. Di sisi lain public sebagai konsumen data juga dapat mengakses data sectoral ini dengan mudah dan cepat dengan mengunjungi situs satudata.polmankab.go.id.



LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)



Aplikasi Polman Satu Data merupakan portal data berbasis web yang dapat diakses melalui satudata.polmankab.go.id. Website ini memuat data makro, data sectoral dan infografis data yang mudah diakses para konsumen data.



Aplikasi e-Lapor adalah platform resmi satu pintu yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia untuk menampung berbagai aspirasi, saran, permintaan informasi, maupun pengaduan masyarakat terkait layanan public. Melalui aplikasi LAPOR Dinas KominfoSP merespon keluhan masyarakat secara lebih cepat, tepat dan terkoordinasi dan memastikan laporan masyarakat terpusat, terstruktur dan memudahkan pengelolaan. Secara keseluruhan e-LAPOR dapat meningkatkan kualitas layanan public dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

WEBSITE DINAS KOMINFOSP



Website memiliki peran krusial bagi Dinas KominfoSP dalam menjalankan tupoksinya sebagai pusat informasi, komunikasi, dan pelayanan public berbasis digital. Website berperan dalam peningkatan transparansi dan akses informasi public, memungkinkan integrasi layanan public digital, sarana sosialisasi program pemerintah meningkatkan citra dan profesionalisme pemerintah serta sebagai sarana mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.



03 AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan



A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas KominfoSP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP Tahun 2025-2029. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.



SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Target : (89,00) Menuju Informatif

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 yang mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah

Untuk mengetahui kualitas keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana.

Berdasarkan penetapan kualifikasi keterbukaan informasi public oleh Komisi Informasi , kualifikasi keterbukaan informasi public diklasifikasikan sebagai berikut :

- Nilai 90 – 100 : Informatif
- Nilai 80 – 89,9 : Menuju Informatif
- Nilai 60 – 79,9 : Cukup Informatif
- Nilai 40 – 59,9 : Kurang informatif
- Nilai < 39,9 : Tidak informatif

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

Nomor	Variabel Penilaian	Persentase
1.	Pengumuman Informasi Publik	25%
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	10%
3.	Pengembangan Website	20%
4.	Kelembagaan	15%
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	30%
Total		100

Berikut ini disajikan kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Indikator Digitalisasi

No	Pertanyaan	Ketersediaan
1.	Aksesabilitas Website	
1,1	Apakah Badan Publik memiliki website?	Ada Lengkap
1.2	Apakah website Badan Publik memiliki kanal/menu khusus PPID	Ada Lengkap
1,3	Apakah pada website Badan Publik mengumumkan informasi mengenai :	
	a. Profil singkat tentang organisasi PPID	Ada Lengkap
	b. Tugas dan Fungsi PPID	Ada Lengkap
	c. Struktur Organisasi PPID	Ada Lengkap
	d. Visi dan Misi PPID	Ada Lengkap
1.4	Apakah website Badan Publik Mengumumkan Informasi Mengenai :	
	a. Tata cara permohonan informasi	Ada Lengkap
	b. Tata cara pengajuan keberatan	Ada Lengkap
	c. Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	Ada Lengkap
1,5	Apakah kanal pada website memiliki regulasi tentang keterbukaan informasi public?	Ada Lengkap
2.	Media Sosial	Ada Lengkap
2,1	Apakah Badan Publik memiliki media social yang digunakan sebagai media penyampaian informasi publik (twitter/Instagram/Youtube/Facebook)?	Ada Lengkap

II. Indikator Jenis Informasi

No	Pertanyaan	Ketersediaan
2.	Informasi Berkala	
2,1	Apakah Badan Publik mengumumkan informasi tentang :	
	a. Alamat Kantor	Ada Lengkap
	b. Ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi	Ada Lengkap
	c. Struktur Organisasi	Ada Lengkap
	d. Profil Singkat Pejabat Struktural	Ada Lengkap
	e. Laporan harta kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diumumkan	Ada Lengkap
2,2	Apakah Badan Publik telah mengumumkan ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik yang memuat :	
	a. Jumlah permohonan informasi public yang diterima	Ada Lengkap
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public	Ada Lengkap
	c. Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan Sebagian atau dikabulkan seluruhnya	Ada Lengkap
	d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Ada Lengkap
3.	Informasi Serta Merta	
3,1	Apakah di Badan Publik telah tersedia informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Ada Lengkap
4.	Informasi Tersedia Setiap Saat	
4,1	Apakah Badan Publik menyediakan informasi tentang :	
	a. Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik yang dihasilkan oleh Badan Publik	Ada Lengkap
	b. Rencana kerja strategis Badan Publik	Ada Lengkap
	c. Surat Menyurat Badan Publik terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang	Ada Lengkap
	d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	Ada Lengkap
4,2	Apakah Badan Publik menyediakan informasi tentang :	
	a. Pedoman pengelolaan Organisasi	Ada Lengkap
	b. Pedoman Pengelolaan Administrasi	Ada Lengkap
	c. Pedoman Kepegawaian	Ada Lengkap
	d. Pedoman Pengelolaan Keuangan	Ada Lengkap
4,3	Apakah Badan Publik menyediakan data statistic yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Ada Lengkap

4,3 Apakah Badan Publik menyediakan data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara Ada Lengkap

5. Informasi Yang Dikecualikan

5,1 Apakah Badan menyediakan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan Ada Lengkap

III. Indikator Kualitas Informasi

No	Pertanyaan	Ketersediaan
6,1	Apakah Badan Publik telah menyediakan data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara kebijakan standar mengenai biaya perolehan informasi	Ada Lengkap
6,2	Apakah Badan Publik mengumumkan tentang :	Ada Lengkap
	a. Informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan publik	Ada Lengkap
	b. Laporan Kinerja Badan Publik Tahun 2024	Ada Lengkap
	c. Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit	Ada Lengkap
	d. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilkaukan oleh Pejabat Badan Publik	Ada Lengkap
	d. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	Ada Lengkap
7.	Maklumat Layanan Informasi Publik	
7,1	Apakah pada website khusus PPID Badan Publik mengumumkan informasi maklumat layanan informasi	Ada Lengkap
8.	Daftar Informasi Publik	
8,1	Apakah Badan Publik telah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada Lengkap
	a. Daftar Informasi Publik Berkala	Ada Lengkap
	b. Daftar Informasi Serta Merta	Ada Lengkap
	c. Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat	Ada Lengkap
	d. Daftar Informasi Dikecualikan	Ada Lengkap
9.	Partisipasi Masyarakat	
9,1	Apakah pada website telah memiliki menu/tool partisipasi public yang dapat menyampaikan saran/kritik/usul program/pendapat secara online?	Ada Lengkap

IV. Indikator Komitmen Organisasi

10. PPID

10,1 Apakah Badan Publik telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi public

	a. SK Penetapan PPID	Ada Lengkap
	b. Struktur PPID	Ada Lengkap
10,2	Apakah PPID Badan Publik telah melakukan koordinasi internal secara rutin?	Ada Lengkap
11.	Anggaran Khusus PPID	
11,1	Apakah Badan Publik telah menyediakan :	
	a. Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi public	Ada Lengkap
	b. Anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID	Ada Lengkap
11,2	Anggaran bagi kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik	Ada Lengkap

V. Laporan

12,1	Apakah Badan Publik memiliki laporan layanan informasi public tahun 2024	Ada Lengkap
12,2	Apakah Badan Publik telah menyampaikan laporan layanan informasi public tahun 2024 ke Komisi Informasi Sulawesi Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir?	Belum Lengkap
13.	Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik	
13,1	Apakah Badan Publik memiliki peraturan/Kebijakan/Keputusan tentang Pelayanan Informasi Publik	Ada Lengkap
14.	Standar Operasional Prosedur	
14,1	Apakah Badan Publik memiliki Standar Operasional Prosedur tentang :	
	a. Standar Pengumuman	Ada Lengkap
	b. Standar Permintaan Informasi Publik	Ada Lengkap
	c. Standar Pengajuan Keberatan	Ada Lengkap
	d. Standar penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi	Ada Lengkap
	e. Standar pendokumentasian Informasi Publik	Ada Lengkap
	f. Standar Maklumat Pelayanan	Ada Lengkap
	g. Standar Pengujian Konsekuensi	Ada Lengkap

VI. Indikator Sarana Prasarana

15.	Elektronik	
15,1	Apakah pada Website khusus PPID Badan Publik memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima :	
	a. Permohonan Informasi secara online?	Ada Lengkap
	b. Keberatan permohonan secara online?	Ada Lengkap
15,2	Apakah Badan Publik menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi public/papan informasi elektronik/lainnya?	Ada Lengkap

16. Non Elektronik

16,1	Apakah Badan Publik menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi public, berupa :	
	a. Meja, Kursi, Kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk Information)	Ada Lengkap
	b. Papan Pengumuman	Ada Lengkap
	c. Formulir permohonan informasi public	Ada Lengkap
	d. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi	Ada Lengkap
	e. Formulir Keberatan	Ada Lengkap
	f. Daftar Register Permohonan	Ada Lengkap
	g. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Ada Lengkap

17. Layanan Akseibilitas Difabel

17,1	Apakah Badan Publik menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat difabel	Ada Lengkap
17,2	Apakah Badan Publik Menyediakan fasilitas bagi masyarakat difabel (akses yang mudah/kursi roda/huruf braille) atau fasilitas lainnya?	Ada Lengkap

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menuju Informatif (89,00)	Informatif (90,75)	101,96%

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, Predikat Keterbukaan Informasi Publik melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2025, yaitu dari target menuju informatif (89,00) terealisasi menuju informatif (90,75).

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi public mencakup segala bentuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh Badan Publik terkait penyelenggaraan negara maupun badan public lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang informasi. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab melakukan monitoring evaluasi atas keterbukaan informasi public sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022. Berkenaan dengan hal ini, untuk pertama kalinya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi public pada Kabupaten Polewali Mandar, setelah beberapa tahun terakhir penilaian keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar.

Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public oleh KIP Provinsi Sulawesi Barat pada badan public disampaikan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 105/KEP/KI-SB/XI/2025, Tanggal 21 November 2025 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025, sebagai berikut :

III. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN PROV. SULAWESI BARAT

NO	NAMA BADAN PUBLIK/OPD	KUALIFIKASI	NILAI
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju	INFORMATIF	99.67
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene	INFORMATIF	99.65
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene	INFORMATIF	99.65
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu	INFORMATIF	99.64
5	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju	INFORMATIF	97.65
6	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa	INFORMATIF	97.45
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene	INFORMATIF	95.75
8	Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar	INFORMATIF	95.55
9	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu	INFORMATIF	92.59
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar	INFORMATIF	92.45
11	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah	INFORMATIF	92.35
12	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar	INFORMATIF	90.25
13	Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu	MENUJU INFORMATIF	85.15
14	Kementerian Agama Kabupaten Mamasa	MENUJU INFORMATIF	82.26
15	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah	MENUJU INFORMATIF	81.1
16	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju	MENUJU INFORMATIF	63.2
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa	MENUJU INFORMATIF	62.92

IV. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN PROV. SULAWESI BARAT

NO	NAMA BADAN PUBLIK/OPD	KUALIFIKASI	NILAI
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	INFORMATIF	99
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar	INFORMATIF	90.75
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	INFORMATIF	90.7

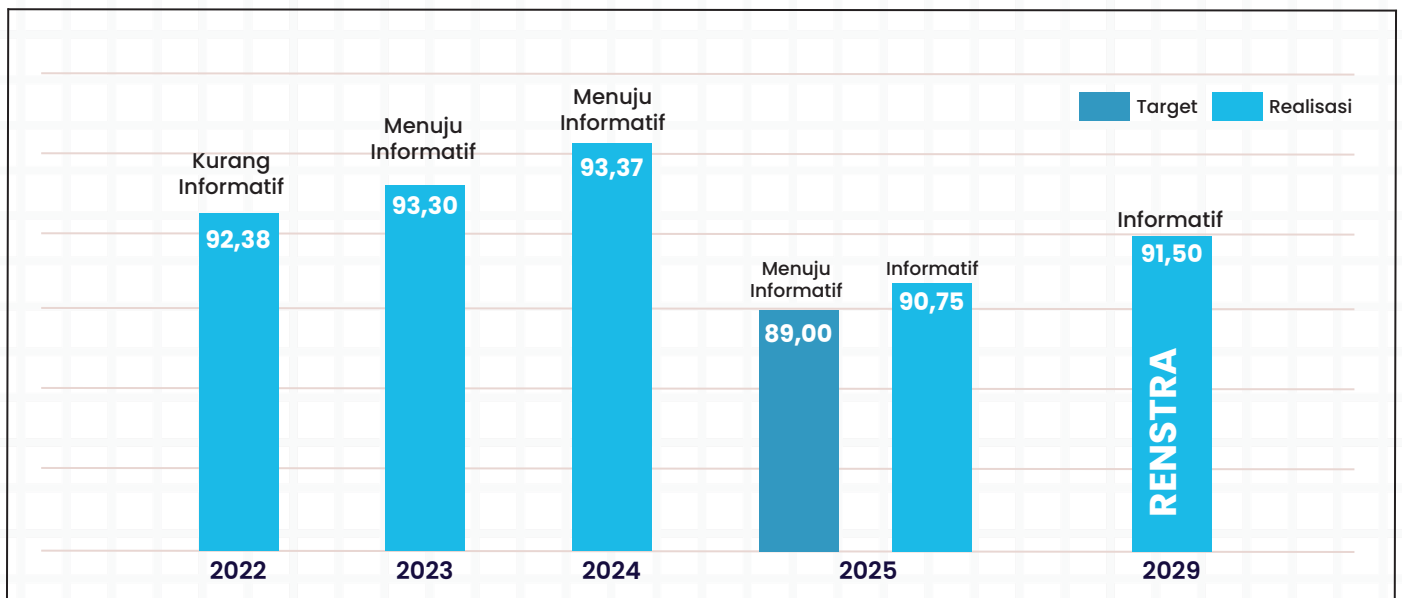
Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 21 November 2025



KETUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI BARAT
MUHAMMAD IKBAL

Chart 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Target dengan Realisasi 2025, 2024, 2023, 2022 dan Target Renstra (Akhir)



Sumber : Bidang IKP Dinas KominfoSP 2025

Mencermati chart tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja Dinas KominfoSP dalam mewujudkan keterbukaan informasi public pemerintah daerah terus mengalami peningkatan dari tahun tahun 2022 (92,38) Predikat "Menuju Informatif", tahun 2023 (93,30) Predikat "Menuju Informatif", tahun 2024 (93,37) Predikat "Menuju Informatif". Capaian predikat keterbukaan informasi public mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (93,30), Predikat "Menuju Informatif". Kondisi dipengaruhi terlaksananya pendampingan secara kontinu oleh PPID utama kepada Perangkat Daerah selaku PPID pembantu, serta Website sebagai sarana utamalayanan informasi public, oleh PPID utama juga telah diupgrade di tahun 2022 untuk peningkatan layanan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap daftar informasi public yang terupdate oleh PPID pembantu, turut memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2024 (93,37), Predikat "Menuju Informatif", meski tidak terlampaui signifikan. Adanya serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN) turut mempengaruhi capaian kinerja keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diketahui, Pusat Data Nasional (PDN), dimanfaatkan untuk menopang layanan informasi digital. PDN mewujudkan penyimpanan data terpusat secara nasional. PDN sebagai pusat data nasional, terintegrasi dengan aplikasi dan layanan publik, termasuk layanan website Perangkat Daerah, layanan e-PPID dan Layanan Aduan Laporan yang merupakan instrumen layanan untuk menilai keterbukaan informasi publik setiap tahun. Serangan siber pada PDN Kembali dimulai pada penghujung tahun 2024. Dampaknya, Perangkat daerah selaku PPID pembantu tidak maksimal dalam upload data informasi public pada layanan aplikasi website, e-PPID dan aduan Laporan. Kondisi ini turut mempengaruhi penilaian mandiri

keterbukaan informasi public oleh Dinas KominfoSP pada akhir tahun 2024. Meski mengalami kendala ditengah target mewujudkan keterbukaan informasi public predikat menuju informatif tahun 2024, Dinas KominfoSP selaku PPID utama secara konsisten terus melakukan Upaya meningkatkan capaian keterbukaan informasi public, diantaranya dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada SDM admin website, PPID seluruh Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu. Materi pelatihan mencakup tata cara pengelolaan informasi public agar lebih informatif dan memberi nilai sampai pada tahap penyebaran informasi public. Hal ini juga memberi dampak bagi PPID pembantu berpartisipasi lebih aktif dalam mengupdate informasi public pada website dan e-PPID.

Tahun 2025, Dilakukan penyesuaian target terhadap capaian keterbukaan informasi public pemerintah daerah, dengan pertimbangan penilaian keterbukaan informasi public tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh Dinas kominfoSP, namun dievaluasi langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Momentum ini didukung disusunnya Dokumen Renstra Dinas KominfoSP tahun 2025-2029, dan dilakukan penyesuaian target-target kinerja untuk lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Untuk tahun 2025, target diturunkan senilai (89,00) Predikat "Menuju Informatif", dengan alasan yang dikemukakan di atas. Jika capaian kinerja keterbukaan informasi public pemerintah daerah dibandingkan dari tahun 2022-2025, terlihat penurunan capaian dan nilai realisasi pada tahun 2025. Namun meski target mengalami penyesuaian nilai (89,00) Predikat "Menuju Informatif", nilai realisasi (90,75) Predikat "Informatif" dicapai melebihi target, dengan

persentase capaian 101,96%. Hal ini dipengaruhi adanya Kerjasama tim yang optimal dalam memonitoring, evaluasi dan pengumpulan bukti pendukung yang diperlukan. Setiap anggota tim telah memberikan kontribusi sesuai 17 18 dengan kapasitas masing-masing dalam penilaian keterbukaan informasi public pemerintah daerah. Adanya peningkatan kapasitas bagi pengelola layanan atau admin website seluruh Perangkat Daerah oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat turut mempengaruhi capaian kinerja keterbukaan informasi public pemerintah daerah tahun 2025. Dampak dari adanya kegiatan ini secara nyata meningkatkan kompetensi teknis admin Perangkat Daerah dalam mengelola system informasi berbasis digital, meningkatkan pemahaman regulasi Undang-undang Keterbukaan Informasi, meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat serta membekali admin dengan keterampilan menangani permohonan, keberatan, dan potensi sengketa informasi.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Adanya regulasi terkait keterbukaan informasi publik, yang meliputi tata kelola informasi publik, daftar informasi publik, dan admin e-PPID.
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi public (Website).
3. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik.

Faktor Penghambat :

1. Pemahaman tentang keterbukaan informasi public belum merata
2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Informasi publik melalui website dan e-PPID belum terlaksana secara konsisten
3. Admin PPID belum sepenuhnya mengelola layanan , karena harus berbagi dengan tugas utama masing masing admin di OPD masing-masing.
4. Pembinaan atau peningkatan kapasitas bagi admin pengelola layanan PPID dan website belum optimal

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

Penguatan tindakanjuit hasil monev PPID utama secara berkala oleh PPID pelaksana

Penguatan koordinasi PPID utama dengan PPID pelaksana

Pendampingan berkelanjutan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi publik

Sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 425.188.060,-	419.471.599,-	98,66
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 425.188.060,-	419.471.599,-	98,66
a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 418.299.860,-	Rp. 412.848.399,-	87,70
b. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 5.473.200,-	Rp. 5.473.200,-	100
c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 1.415.000,-	Rp. 1.150.000,-	81,27

Dalam mendukung pencapaian sasaran Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, terdapat program kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendampingan cara membuat rilis berita pada media online kepada Perangkat daerah.
2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
3. Program Kelas Kominfo Penyuluh Agama Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar.

Program / Kegiatan	Pagu DPA Pokok	Pagu DPA Perubahan	Keterangan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 529.841.260,-	425.188.060,-	Refocusing
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 529.841.260,-	425.188.060,-	Refocusing

Tabel 3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025

Dari tabel di atas, pagu DPA pokok senilai Rp. 529.841.260, dikenai pengurangan pada refocusing untuk efisiensi senilai Rp.117.336.400. Selain pengurangan pada belanja rutin juga dilakukan pengurangan pada belanja modal untuk pengadaan kamera dan peralatan kamera dan peralatan studio lainnya dari pagu pokok 2025.

Dalam rangka menunjang kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, pengadaan kamera camcorder dan kamera digital serta peralatan studio lainnya dikurangi volume pengadaannya, dan sebagai gantinya pengadaan kamera camcorder dan kamera DSLR dilakukan pengadaan dengan pembelian set kamera profesional dan berkualitas tinggi, dengan volume terbatas. Selain itu, dilakukan upgrade lensa dan pemeliharaan kamera DSLR inventaris lama. Langkah ini menghasilkan penghematan 68,02% dari estimasi awal, namun tetap mampu memudahkan mobilitas tim, mempercepat alur kerja editing hingga menghasilkan konten visual yang berkualitas tinggi untuk kebutuhan publikasi digital informasi public.



Gambar 3.1. Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat via zoom meeting Kepada Perangkat Daerah



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Target : Terstandarisasi-Kolaborasi (3:4)

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandarisasi Kolaborasi (3;4)	Terstandarisasi Kolaborasi (3;4)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika				

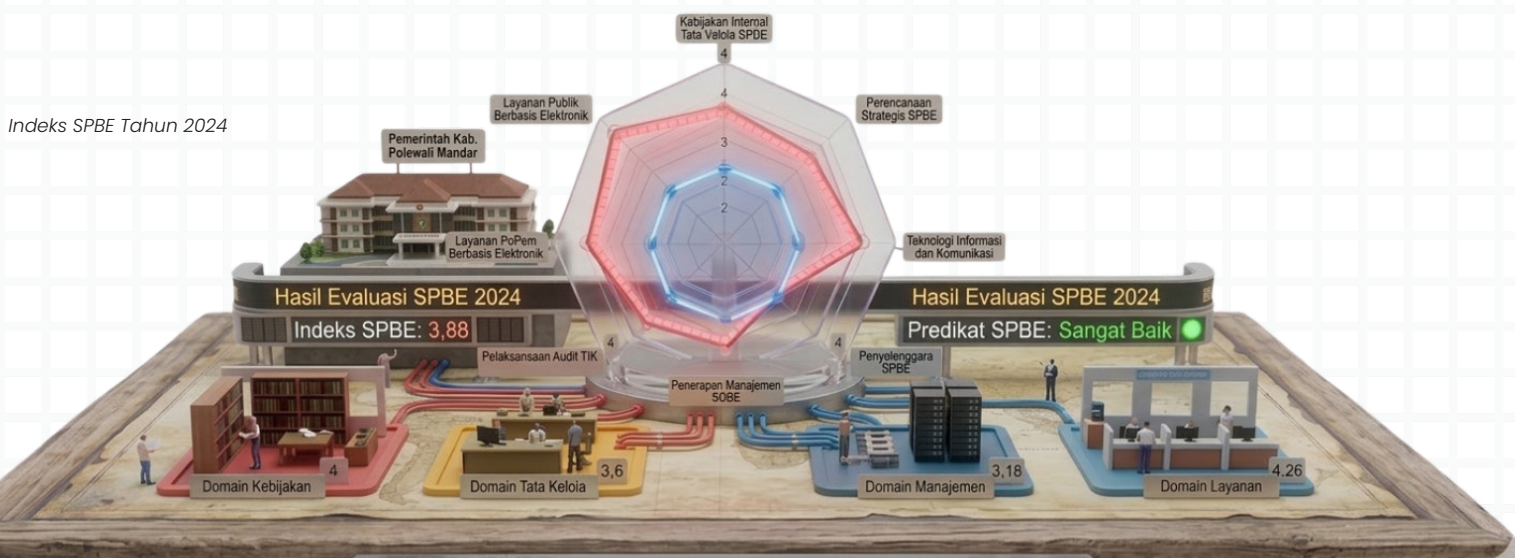
Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis II, Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2025, yaitu dari target Terstandardisasi Kolaborasi (3;4) terealisasi Terstandardisasi Kolaborasi (3;4).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025, maka Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yaitu 4,00 dengan predikat sangat baik. Capaian indeks SPBE tahun 2025 mengalami peningkatan yang dari kondisi sebelumnya, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 nilai 3,88 dengan predikat Sangat Baik.

Chart. 3.2
Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024-2025





Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.



Adapun capaian tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

No.	Indikator	Level
A. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		3,58
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	4
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
B. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis		4,2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4

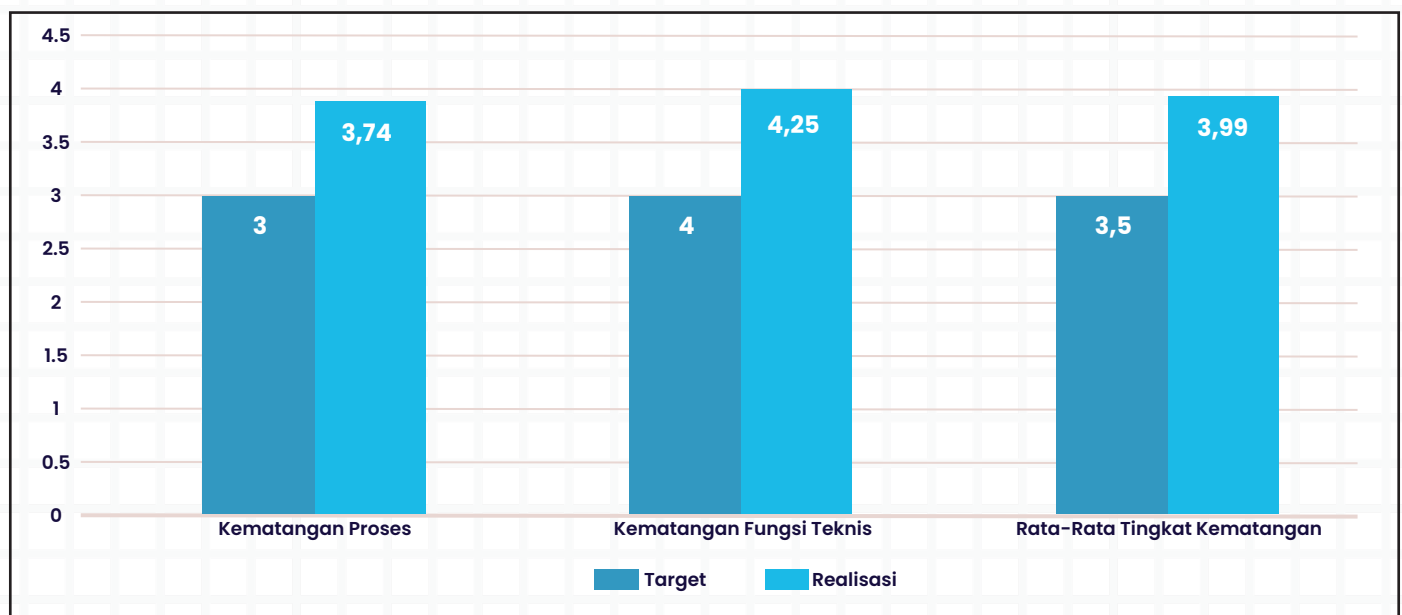
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber: <https://monev.spbe.go.id>

Memperhatikan hasil perhitungan pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas proses nilai 3,74 atau dengan tingkat kematangan Terstandarisasi, sedangkan untuk Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas fungsi teknis nilai 4,25 dengan predikat tingkat kematangan kolaborasi. Dengan demikian realisasi kinerja melampaui target kinerja yang direncanakan yaitu Terstandarisasi (nilai 3) –Kolaborasi (nilai 4). Capaian tahun 2025, mengalami peningkatan dari capaian tahun 2024 Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas proses nilai 3,58 atau dengan tingkat kematangan Terstandarisasi, sedangkan untuk Tingkat Kematangan SPBE pada kapabilitas fungsi teknis nilai 4,2 dengan predikat tingkat kematangan kolaborasi. Hal ini dipengaruhi Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE. Keunggulan aspek layanan publik nampak telah digunakannya layanan publik yang bersifat tematik. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi. Keunggulan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik lainnya pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan adanya aplikasi pusat yang digunakan seperti SP4N LAPOR, SATU DATA, JDIH dan JDIHN yang telah melakukan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain. Capaian ini juga dipengaruhi telah ditetapkannya Peta Rencana SPBE Kabupaten Polewali Mandar 2025. Adapun capaian kinerja dimaksud dapat digambarkan melalui chat berikut:

Chart 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025



Sumber: Data Olah, <https://monev.spbe.go.id> 2024

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Electronic (SPBE) bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi baik dalam aspek kebijakan, tata kelola maupun dalam aspek layanan pemerintahan.

Aplikasi pemerintahan dan layanan public berperan krusial dalam SPBE sebagai instrument digital utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2025, maka diketahui kondisi fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang telah didukung Teknologi Sistem Informasi Tahun 2025

No	Fungsi-fungsi Utama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan
1	SEKRETARIAT DAERAH	
1	fungsi Tata Pemerintahan	Elektronik-LPPD, Elektronik-SPM
2	fungsi Kesejahteraan Rakyat	-
3	fungsi Hukum	JDIH
4	fungsi Administrasi Pembangunan	-
5	fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SIRUP, LPSE
6	fungsi Perekonomian Dan SDA	-
8	fungsi Organisasi	-
	- fungsi kelembagaan	e-sakip,
	- fungsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik
	- fungsi reformasi birokrasi	e-PMPRB, SKP Online
9	fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-
2	SEKRETARIAT DPRD	
1	fungsi Risalah dan Persidangan	-
2	fungsi Hubungan Masyarakat	-
3	INSPEKTORAT	
1	Fungsi Pengawasan	Whistle Blowing System
2	Fungsi Audit	e-Auditee
3	Fungsi Review	e-review SAKIP OPD
4	Fungsi Pemantauan Tindak Lanjut	SimHPPemda
4	BALITBANGREN	
1	fungsi penelitian dan pengembangan	Sistem Inovasi Daerah
2	fungsi Perencanaan Dan Pengendalian Program	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
5	BADAN KEUANGAN	
1	fungsi Anggaran	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	fungsi Verifikasi Dan Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
3	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
4	fungsi Aset	SIMDA BMD
6	BKPP	
1	fungsi Pengadaan, Informasi Kinerja Pegawai	SIMPEG, e-LAPKIN
2	fungsi Administrasi Kepegawaian	SAPK
3	fungsi Pendidikan Dan Pelatihan	-
7	BADAN KESBANG POL	
1	fungsi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial & Budaya	Sistem Informasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
2	fungsi Politik Dalam Negeri	Sistem Informasi Politik Dalam Negeri
3	fungsi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

8	BPBD		
	1	fungsi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	InaRISK Personal Sistem Penerima Peringatan Informasi Gempa Bumi Sistem Informasi Prakiraan Cuaca, Iklim, Udara dan Gempa Bumi Data Informasi Bencana Indonesia
	2	fungsi Kedaruratan Dan Logistik	InaRISK Personal
	3	fungsi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Aplikasi e-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9	BADAN PENDAPATAN		
	1	fungsi Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan	SIMPADU
	2	fungsi Penagihan	SIMPADU
	3	fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan	SIMPADU
10	DINAS KESEHATAN		
	1	fungsi Kesehatan Masyarakat	SIM Gizi Terpadu
	2	fungsi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	SIM Tuberculosis Terpadu
	3	fungsi Pelayanan Kesehatan	SIM Rujukan terpadu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
	4	fungsi Sumber Daya Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	fungsi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-
	2	fungsi Ketertiban Umum Dan Ketentraman	-
	3	fungsi Sumber Daya Aparatur	-
	4	fungsi Perlindungan Masyarakat	-
12	DIKNASBUD		
	1	fungsi Pendidikan Dan Pengajaran	DAPODIKDas
	2	fungsi Sarana Dan Prasarana	DAPODIKDas
	3	fungsi Pengembangan Mutu Pendidikan	DAPODIKDas
	4	fungsi PAUD dan Pendidikan Masyarakat	DAPODIK PAUD & DIKMAS
	5	Kepala fungsi Kebudayaan	DAPOBUD
13	DINAS KOMINFO, STATISTIK & PERSANDIAN		
	1	fungsi Teknologi Informasi	Halo Yantik
	2	fungsi Statistik	Polman Satu Data
	3	fungsi Informasi & Komunikasi publik	e-PPID LAPOR!
	4	fungsi Persandian	Sertifikat Elektronik QR Code Polewali Mandar
14	DINAS SOSIAL		
	1	fungsi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-
	2	fungsi Perlindungan Dan Jaminan Sosial	e-SDM PKH SIKS-NG e-PKH
	3	fungsi Rehabilitasi Sosial	-
15	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA & ESDM		
	1	fungsi Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan, Transmigrasi dan ESDM	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
	2	fungsi Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi	Sistem Informasi Penyeberan Penduduk Transmigrasi Sistem Web GIS Tata Kelola Aset Transmigrasi
	3	fungsi Tenaga Kerja	Jaringan dan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja LN Sistem Informasi Ketenagakerjaan

16	PENANAMAN MODAL & PTSP	
1	fungsi Penanaman Modal	-
2	fungsi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan	OSS, SiCantik
3	fungsi Peninjauan dan Penetapan	-
17	DP2KBP2A	
1	fungsi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan	Sistem Informasi Kampung KB
2	fungsi Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Sistem Informasi Keluarga
3	fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak
		Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	
1	fungsi Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
2	fungsi Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	fungsi Kebersihan dan Pertamanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
1	fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa	Sistem Informasi Indeks Desa Membangun
2	fungsi Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Desa
3	fungsi Usaha Ekonomi Desa Dan Pemanfaatan SDA Dan Teknologi Tepat Guna	-
20	DINAS PERHUBUNGAN	
1	fungsi Pengembangan Perhubungan	-
2	fungsi Lalu Lintas	-
3	fungsi Angkutan	Uji KIR Kendaraan Bermotor
21	DINAS PERTANIAN & PANGAN	
1	fungsi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pusat Komando Strategis Tanaman Pangan Early Warning System Tanaman Hortikultura
2	fungsi Peternakan	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak
		Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Yang Terintegrasi Indonesia
3	fungsi Perkebunan	Sistem Informasi Perkebunan
4	fungsi Pengembangan Sdm	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
5	fungsi Prasarana Dan Sarana Pertanian	Sistem Bantuan Alsintan Online
6	fungsi Ketahanan Pangan	-
22	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	
1	fungsi Pemuda	-
2	fungsi Olah Raga	-
3	fungsi Usaha Pariwisata	-
4	fungsi Promosi Wisata	-
23	DINAS PERINDAGKOP & UKM	
1	fungsi Perindustrian	Klinik Desain Merk dan Kemasan
2	fungsi Perdagangan	Sistem Informasi Pasar Rakyat
3	fungsi Standarisasi Perlindungan Konsumen	-
4	fungsi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Pendataan Usaha Kecil dan Menengah Online Data System (ODS-UKM)

24	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, PERTANAHAN	
1	fungsi Permukiman	Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman
2	fungsi Pertanahan	Sistem Informasi Pertanahan
3	fungsi Perumahan	Sistem Informasi Profil Perumahan Sistem Informasi Bantuan Perumahan
25	DINAS PU & PENATAAN RUANG	
1	fungsi Sumber Daya Air	-
2	fungsi Bina Marga	Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah
3	fungsi Cipta Karya	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta karya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
4	fungsi Bina Konstruksi	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
5	fungsi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang
26	DISDUK CAPIL	
1	fungsi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2	fungsi Pelayanan Pencatatan Sipil	
3	fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4	fungsi Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	
27	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	
1	fungsi Perikanan Budidaya	Aplikasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
2	fungsi Perikanan Tangkap Dan Pesisir	-
3	fungsi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-
4	fungsi Kelembagaan Dan Penyuluhan	-
28	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
1	fungsi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Manajemen Internet Perpustakaan
2	fungsi Pengolahan, Pelestarian Dan Pelayanan Perpustakaan	-
3	fungsi Kearsipan	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	fungsi Pelayanan Medis Dan Keperawatan	SIMRS
30	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	
1	Fungsi Perencanaan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	Fungsi Keuangan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3	Fungsi Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
4	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
5	fungsi Aset	SIMDA BMD
6	Fungsi Monitoring dan Pelaporan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
7	Fungsi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP
8	Fungsi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sistem Informasi Pelayanan Publik
9	Fungsi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri RB
10	Fungsi Pengukuran Kinerja Individu	SKP Online
11	Fungsi Disiplin Pegawai	e-Absensi
12	Fungsi Kepegawaian	SIMPEG
13	Fungsi Informasi Publik	e-PPID Pembantu
Jumlah	120	99
Persentase Fungsi Utama Yang Telah Didukung Sistem Informasi Aplikasi		82,50%

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, Januari 2026

Bandwith berperan sebagai infrastruktur utama dalam menghubungkan apikasi dan system informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Optimalnya pencapaian kinerja kualitas teknologi informasi juga didukung oleh semakin membaiknya kualitas bandwidth tahun 2025, sebagaimana terlihat pada chart berikut :

Tabel 3.6
Penataan Bandwith Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025

NO	OPD	BANDWITH 2023	BANDWITH 2024	BANDWITH 2025
1.	Ruang Kerja Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
2.	Ruang Kerja Wabup	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
3.	Ruang Kerja Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
4.	Ass 1	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
5.	Ass 2	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
6.	Ass 3	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
7.	Bagian Pemerintahan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
8.	Bagian Kesra	Upto 30 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
9.	Bagian Humas Dan Protokol	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
10.	Bagian Ekonomi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
11.	Bagian Pembangunan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
12.	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
13.	Bagian Ortala	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO	Upto 30 Mbps, FO
14.	Bagian Hukum	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
15.	Bagian Umum Dan Perlengkapan	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
16.	Staf Ahli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
17.	Ruang Pola	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
18.	Rujab Bupati	Upto 100 Mbps, FO	Upto 100 Mbps, FO	Upto 100 Mbps, FO
19.	Rujab Wakil	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
20.	Rujab Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
21.	Rumah Posko	-	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
22.	Sekretariat Dprd	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO	Upto 120 Mbps, FO
23.	Inspektorat	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
24.	Bappeda Litbang	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
25.	Badan Keuangan	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 120 Mbps, FO
26.	Badan Pendapatan	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO	6 Mbps+ Upto 40 Mbps, FO
27.	Bkpp	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO

28..	<u>Badan Kesbangpol</u>	<u>Upto 30 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
29..	<u>Bppd</u>	<u>Upto 30 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
30..	<u>Disdikbud</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>
31..	<u>Dinkes</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>
32..	<u>Dinas Sosial</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
33..	<u>Dinas Pupr</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
34..	<u>Dinas Rumkimtan</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
35..	<u>Disdukcapil</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
36..	<u>Dinas Pertanian Pangan</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>	<u>Upto 70 Mbps, FO</u>
37..	<u>Dinas Kelautan Perikanan</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
38..	<u>DIhk</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
39..	<u>Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
40..	<u>Disperindagkop</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>
41..	<u>Dispop</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>	<u>Upto 80 Mbps, FO</u>
42..	<u>Dpmpstsp</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
43..	<u>Dpmd</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
44..	<u>Dp2kbp3a</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
45..	<u>Dinas Satpol Pp</u>	<u>Upto 30 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
46..	<u>Dinas Kominfo Sp</u>	<u>Upto 120 Mbps, FO</u>	<u>Upto 120 Mbps, FO</u>	<u>Upto 120 Mbps, FO</u>
47..	<u>Dinas Perhubungan</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
48..	<u>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>	<u>Upto 60 Mbps, FO</u>
49..	<u>Kec. Binuang</u>	<u>Upto 10 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
50..	<u>Kec. Polewali</u>	<u>Upto 10 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
51..	<u>Kec. Matakali</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
52..	<u>Kec. Wonomulyo</u>	<u>Upto 10 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
53..	<u>Kec. Mapilli</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
54..	<u>Kec. Balanipa</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
55..	<u>Kec. Tinambung</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
56..	<u>Kec. Anreapi</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
57..	<u>Kec. Tutar</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
58..	<u>Kec. Bulo</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
59..	<u>Kec. Matangnga</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
60..	<u>Kec. Campalagian</u>	<u>Upto 20 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>
61..	<u>Kec. Luyo</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
62..	<u>Kec. Limboro</u>	<u>Upto 10 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>	<u>Upto 50 Mbps, FO</u>

63.	Kec. Tapango	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
64.	Kec. Alu
65.	UPTD Meteorologi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
66.	UPTD Perhubungan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
67.	Mesjid Syuhada	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
68.	Gedung Gadis	Upto 40 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
69.	Rumah Kemasari	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
70.	LTSA	Upto 20 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
Besaran Bandwitch		2849 Mbps	3890 Mbps	3890 Mbps

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, 2026



Chart 3.4
Peningkatan Kapasitas Bandwith Tahun 2024-2025

Dari aspek eksternal, Dinas KominfoSP mengupayakan pengurangan daerah blankspot agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi sehingga berbagai sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah dapat diakses oleh masyarakat utamanya yang terkait dengan pelayanan publik dan perkembangan layanan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun kondisi blankspot dan pertumbuhan menara telekomunikasi, dapat dilihat pada chart berikut ini :

Chart 3.5
 Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2023 s.d. 2025
 dan Blankspot Desa per Kecamatan Tahun 2025



Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, 2026

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Adanya kebijakan SPBE yang mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lembaga turut menyediakan aplikasi terintegrasi Pusat-Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang juga turut menunjang kinerja kementerian/ lembaga
2. Berkembangnya teknologi Wifi Station Fiber Optic yang memiliki kecepatan jauh lebih baik dan aman sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen
3. Adanya monitoring, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPB yang memudahkan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE
4. Telah dilengkapinya Peta Rencana SPBE Kab. Polewali Mandar 2025-2029

Faktor Penghambat :

1. Kompetensi SDM SPBE belum memenuhi standar kompetensi SDM SPBE pada seluruh Perangkat Daerah
2. Belum dilengkapinya penerapan Manajemen Perubahan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB).
3. Belum dilengkapinya pedoman manajemen Layanan SPBE untuk pelaksanaan Manajemen Layanan.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM terkait untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan SPBE secara lebih efektif
2. Meningkatkan koordinasi antara berbagai unit kerja untuk memastikan integrasi yang lebih baik dalam tata kelola SPBE
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia Bandwith untuk peningkatan kualitas akses internet Perangkat Daerah
4. Penguatan mekanisme pelaporan dan komunikasi, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek manajemen risiko dan keamanan informasi, menyediakan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam pengembangan aplikasi dan layanan, serta mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dan meningkatkan penggunaan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efektif

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas teknologi informasi dan persandian daerah, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.379.713.260	Rp. 1.244.069.136	98,42
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.379.713.260	Rp. 1.244.069.136	98,42
a. Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Rp. 1.242.678.420	Rp. 1.242.672.840	100
b. Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Rp. 137.034.840	Rp. 137.034.840	100

Dalam mendukung pencapaian sasaran Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE, terdapat program kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyediaan website website Desa/Kelurahan pada 144 Desa dan 23 Kelurahan.
2. Pelaksanaan Rakor SPBE dalam rangka evaluasi capaian indeks SPBE tahun 2024 dan sosialisasi perubahan instrument evaluasi kinerja Pemerintah Digital.
3. Fasilitasi Pelaksanaan sosialisasi aplikasi aduan Halo ASSAMI kepada Kepala Perangkat Daerah beserta admin Perangkat Daerah.
4. Fasilitasi Sosialisasi penyusunan Arsitektur SPBE kepada Perangkat Daerah pada Aplikasi SIA SPBE.
5. Fasilitasi Pendampingan penyusunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) kepada seluruh admin Perangkat Daerah.
6. Fasilitasi Pendampingan aplikasi aduan Halo ASSAMI kepada admin Perangkat Daerah.

Program / Kegiatan	Pagu DPA Pokok	Pagu DPA Perubahan	Keterangan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.382.352.340,-	1.342.295.660,-	Refocusing
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.382.352.340,-	1.342.295.660,-	Refocusing

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Tahun 2025

Dari tabel di atas, pagu DPA pokok senilai Rp. 1.382.295.660,- dikenai pengurangan pada refocusing untuk efisiensi senilai Rp. 40.056.680,. Selain pengurangan pada belanja rutin juga dilakukan pengurangan pada belanja Pengembangan/Pemeliharaan website dari pagu pokok 2025. Pengembangan aplikasi yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi Polman Satu Data oleh tim programmer dan teknisi di lingkungan Dinas KominfoSP. Langkah ini menghasilkan penghematan, karena tidak mengeluarkan anggaran besar untuk membayar vendor pihak ketiga, biaya operasional untuk pemeliharaan lebih rendah, memudahkan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut karena aplikasi dapat diubah, diperbaharui atau dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan Dinas pengguna, aplikasi lebih mudah diintegrasikan dengan system yang sudah ada, serta aplikasi dapat dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan Dinas. Pada tahap perubahan anggaran 2025, pada Sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi umum SPBE, terdapat anggaran yang direlokasi sebesar 66,66%. Pengalihan ini bertujuan untuk pengadaan peralatan perlengkapan kantor berupa pengadaan laptop untuk operator keuangan untuk mendukung system kerja keuangan berbasis digital.



Gambar 3.2. Fasilitas Pendampingan Penyusunan SIA SPBE Kepada Admin Perangkat Daerah 2025



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator : Tingkat Kematangan Statistik Sektoral

Target : Terdefinisi (2,90)

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan Pembangunan nasional. Kegiatan statistic dituntut untuk menghasilkan statistic berkualitas, cepat dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic pada instansi pemerintah. Dasar penetapan EPSS adalah Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistic sectoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan dan aspek. Di samping itu, IPS juga menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan urusan statistic di Tingkat Pemerintahan Daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh intansi pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan statistic sectoral. EPSS mengukur Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) Tingkat kematangan , sebagai berikut :

5 LANGKAH MENUJU KEMATANGAN DATA

TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 pada sasaran strategis III digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025






No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Terdefenisi (2,90)	Terdefenisi (2,90)	100%

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis III, Tingkat Kematangan Statistik Sektoral mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2025, yaitu dari target menuju informatif Terdefenisi (2,90) terealisasi Terdefenisi (2,90). Hasil EPSS yang mengukur Tingkat kematangan statistic sectoral tahun 2024 disampaikan melalui surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-775/01000/ES/2024, Tanggal 17 September 2024, Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral Tahun 2024



Tabel 3.10
 Nilai Aspek Indeks Domain Tahun 2024

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik 	25%	3,00
Metadada Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi 	21%	3,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,00
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data 	32%	3,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	3,00
Penyebarnya Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas 	35%	2,75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,50
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik 	34%	2,33
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	2,32

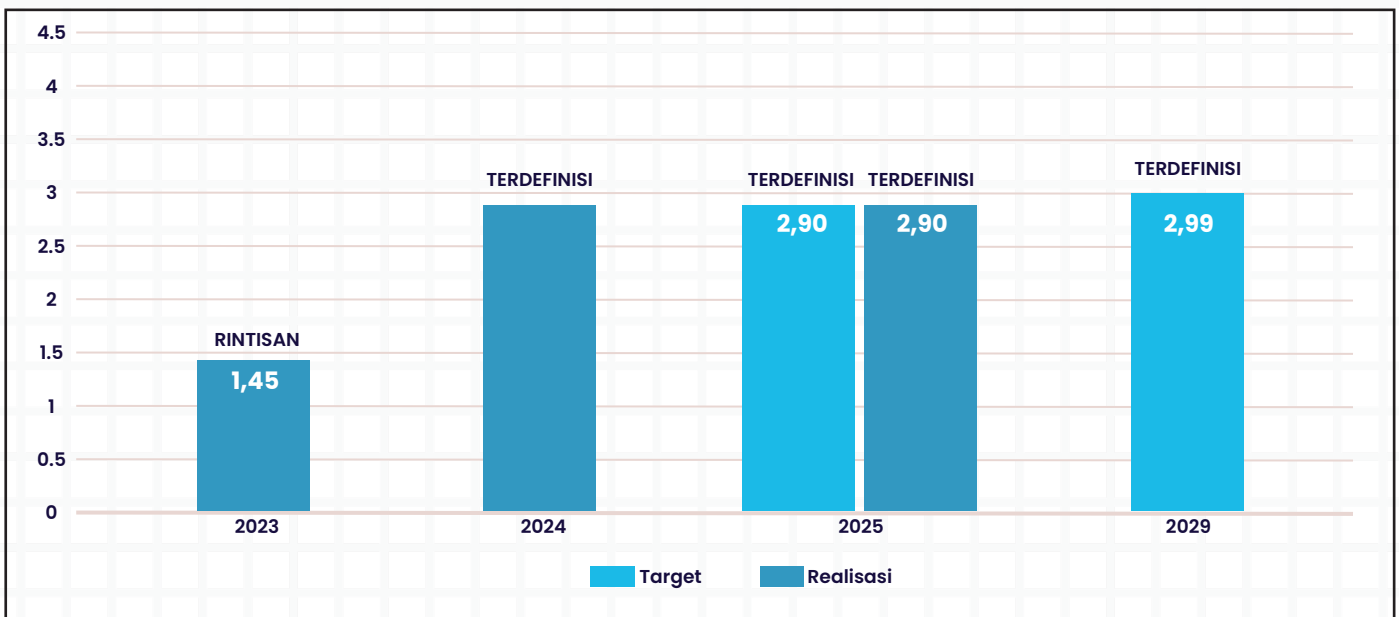
Sumber : Olah Data Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), BPS telah melaksanakan penilaian sistematis melalui verifikasi dan validasi bukti dukung (Penilaian mandiri, dokumen dan interviu), untuk mengukur Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sesuai hasil olah data yang disampaikan oleh BPS pada tabel di atas, hasil evaluasi penyelenggaraan statistic sectoral tahun 2024 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) , nilai 2,90 Predikat "Baik". Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sectoral serta pelayanan public di bidang statistic.

Komponen hasil penilaian mencakup domain Prinsip Satu Data Indonesia, Domain Kualitas Data, Domain Proses Bisnis Statistik, Domain Kelembagaan, dan Domain Statistik Nasional. Pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia, Pemkab Polewali Mandar telah menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dengan "Baik", nilai 3,00. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mengatur tata Kelola data secara menyeluruh, yang mencakup aspek-aspek penting seperti standar data, metadada, interoperabilitas, serta kode referensi atau data induk. Pada domain kualitas data, Pemkab Polewali Mandar telah mencapai pedikat "Baik", nilai 3,00.

Hal ini didukung oleh kebijakan SDI yang mengatur berbagai aspek kualitas data, data relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas serta keterbandingan konsistensi. Pada domain Proses Bisnis Statistik Pemkab Polewali Mandar juga telah mencapai predikat “Baik”, nilai 3,00, dibuktikan dengan adanya kebijakan SDI yang mengatur penerapan dan implementasi proses bisnis statistic. Demikian pula pada domain kelembagaan, Pemkab Polewali Mandar juga sudah mencapai predikat “Baik”, nilai 2,74, dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mengatur implementasi kelembagaannya yang mencakup profesionalisme, SDM yang memadai dan kapabel, serta pengorganisasian statistic. Domain terakhir adalah domain statistic nasional, Pemkab Polewali Mandar mencapai predikat “Cukup” nilai 2,55. Rendahnya capaian ini disebabkan pada aspek pemanfaatan data statistic, penggunaan data statistic dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi atau penyusunan kebijakan belum menunjukkan adanya keterlibatan walidata.

Chart 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 Target dengan Realisasi 2023, 2024 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2025

Berdasarkan Peraturan BPS, EPSS direncanakan dapat dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan untuk melihat perbaikan nyata dalam jangka menengah. Penilaian EPSS dilakukan tahun 2024, kemudian focus perbaikan pada tahun 2025, dalam hal ini focus instansi adalah melakukan perbaikan tata Kelola data berdasarkan hasil rekomendasi EPSS tahun 2024, dan evaluasi penilaian EPSS akan Kembali dilakukan pada tahun 2026. Pada grafik dapat dilihat, nilai Tingkat kematangan statistic sektoral pada angka 2,90 Tingkat Kematangan “terdefenisi” pada tahun 2024 dan 2025, karena penilaian dilaksanakan dua tahun sekali.

Sebagaimana capaian kinerja yang tersaji pada Chart diatas, diketahui bahwa Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan statistic sektoral dengan indikator Tingkat Kematangan Statistik Sektoral mengalami kenaikan signifikan pada capaian tahun 2024, Nilai 2,90 Tingkat Kematangan “Terkelola” dari kondisi tahun 2023, Nilai 1,45, Tingkat Kematangan “Rintisan”. Tren positif ini didorong oleh penguatan pembinaan oleh BPS dan kolaborasi dalam Satu Data Indonesia (SDI). Pemerintah Daerah kini focus pada perbaikan proses bisnis statistic, mulai dari perencanaan hingga publikasi data. Pada tahun 2025, pembinaan semakin difokuskan pada implementasi standar data statistic nasional untuk memastikan data berkualitas, andal dan konsisten.

Peningkatan nilai kematangan juga dipengaruhi inisiatif aktif walidata dan produsen data. Penggunaan aplikasi Polman Satu Data pada Pemkab Polewali Mandar turut mendorong peningkatan hasil penilaian. Tren kenaikan Tingkat kematangan ini diharapkan mampu memacu instansi untuk mempertahankan kualitas data.



Gambar 3.3. Pembinaan Statistik Sektoral oleh BPS melalui kegiatan coaching clinic Statistik Sektoral Tahun 2025

Pendampingan Data sectoral yang dilaksanakan oleh Dinas KominfoSP selaku walidata, juga berperan dalam meningkatkan Tingkat kematangan statistic sectoral. Pendampingan kepada produsen data mendorong mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam tata Kelola data dalam menghasilkan data yang berkualitas dan sesuai kaidah SDI.

Tabel 3.11
Pemenuhan Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Urusan	Jumlah Data	Data Terinput	Data Lengkap Penunjang	%
1	Sekretariat Daerah	5	1	1	20,00
2	Sekretariat DPRD	5	3	3	60,00
3	Inspektorat	10	10	10	100,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26	16	16	61,54
5	Dinas Kesehatan	53	53	53	100,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	43	38	38	88,37
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	17	17	17	100,00
8	Dinas Sosial	16	16	16	100,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	9	9	100,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	19	19	19	100,00
11	Dinas Perhubungan	8	3	3	37,50
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	4	4	40,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	100,00
14	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	22	22	22	100,00
15	DP2KBP3A	15	15	15	100,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13	13	13	100,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	21	16	16	76,19
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	11	11	100,00
19	Dinas Pertanian dan Pangan	13	3	3	23,08
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	10	10	100,00
21	Dinas Perindagkop dan UKM	24	23	23	95,83
22	Dinas Transnaker dan ESDM	17	17	17	100,00
23	Balitbangren	16	8	8	50,00
24	Badan Keuangan	10	2	2	20,00
25	Badan Pendapatan	8	5	5	62,50
26	BKPP	33	29	29	87,88
27	Bakesbangpol	8	7	7	87,50
28	BPBD	3	2	2	66,67
Jumlah		455	382	382	83,95

Sumber : Bidang Statistik Dinas KominfoSP, Januari 2026





Gambar 3.4. Pendampingan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kepada Perangkat Daerah Tahun 2025

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Adanya kebijakan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi Pembina data, walidata dan produsen data melalui forum satu data
4. Meningkatnya perhatian publik terhadap ketersediaan data sektoral yang memadai

Faktor Penghambat :

1. Belum dilakukannya evaluasi secara berkala dan terjadwal pada penerapan semua aspek di domain Prinsip Satu Data
2. Kekurangan dalam domain kelembagaan, pada aspek profesionalitas dan pengorganisasian statistik
3. Pada aspek pemanfaatan data statistic, penggunaan data statistic dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi belum menunjukkan adanya keterlibatan walidata

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

1. Seluruh produsen data melakukan reviu/evaluasi dengan membandingkan implementasi pelaksanaan proses sesuai SOP yang telah ditetapkan.
2. Pemkab Polman melakukan tindaklanjut evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Kegiatan reviu dan evaluasi perlu dilengkapi bukti dukung memadai.
3. Keterlibatan walidata dalam pemanfaatan data statistic dasar maupun sectoral perlu ditingkatkan.
4. Pemkab Polewali Mandar perlu membentuk Tim Kerja khusus untuk pemanfaatan Big data dalam penyelenggaraan statistic sectoral.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Tingkat Kematangan Statistik Sektoral, sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 9.476.600	Rp. 9.476.600	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.476.600	Rp. 9.476.600	100
a. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp. 9.141.600	Rp. 9.141.600	100
b. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp. 335.000	Rp. 335.000	100

Dalam mendukung pencapaian sasaran Tingkat Kematangan Statistik Sektoral, terdapat program kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pelaksanaan coaching klinik data statistic sectoral oleh Pembina Data, Walidata dan Produsen Data.
3. Pelaksanaan pendampingan pengelolaan data sectoral kepada seluruh produsen data.
4. Pelaksanaan pendampingan pengelolaan Data pada Aplikasi Polman Satu Data.
5. Layanan konsultasi Polman Satu Data setiap hari Jumat jam 14.00 Wita – Selesai.

Program / Kegiatan	Pagu DPA Pokok	Pagu DPA Perubahan	Keterangan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 86.680.420,-	9.476.600,-	Refocusing
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 86.680.420,-	9.476.600,-	Refocusing

Tabel 3.12. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Statistik Tahun 2025

Dari tabel di atas, pagu DPA pokok senilai Rp. 86.680.420,- dikenai pengurangan pada refocusing untuk efisiensi senilai Rp. 71.043.620, Pengurangan dilakukan pada belanja- belanja rutin 2025. Pada perubahan anggaran 2025, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dialihkan untuk belanja modal pengadaan laptop. Pengalihan anggaran dilakukan dari perjalanan dinas luar daerah ke kegiatan yang dianggap prioritas untuk peningkatan kinerja pegawai. Pengalihan anggaran ke belanja modal laptop bukan sekedar membeli perangkat keras, melainkan adanya pola merubah anggaran konsumtif menjadi produktif, untuk mempercepat digitalisasi layanan public dan berdampak langsung pada kualitas kerja organisasi.



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi

Indikator : Persentase Fungsi Utama Pemerintahan yang Didukung Keamanan Informasi

Target : 23,33 Persen

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi	23,33%	25,00%	107,15%

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis IV, Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi, melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2025, yaitu dari target 23,33% terealisasi 25,00% dengan persentase capaian 107,15%.

Keamanan informasi adalah tindakan untuk melindungi dari akses, penggunaan, gangguan, modifikasi atau penghancuran yang tidak legal. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kemajuan teknologi digital berkembang jauh lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengamankan dan melindungi informasi yang ada di dalamnya. Isu global terkait siber semakin kompleks dan menjadi perhatian utama. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) semakin berkembang pesat dan telah menjadi bagian integral dari banyak sektor, termasuk keamanan siber. AI mampu membantu mengidentifikasi ancaman dengan cepat, melakukan analisis data yang kompleks, serta memberikan solusi yang lebih efektif dalam melindungi sistem dan data.

Sasaran strategis meningkatnya tata Kelola keamanan informasi, merupakan sasaran baru yang untuk tahun 2025 diukur capaian kinerjanya. Sasaran ini mengakomodir urusan persandian, yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi elemen dari urusan komunikasi informatika. Secara umum tata Kelola keamanan informasi memberikan perlindungan informasi dan system informasi yang didukung system keamanan informasi. Pengukuran keamanan informasi merupakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana control keamanan yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi. Formulasi kuantitatif untuk mengukur fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi, sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Fungsi Aplikasi Yang Didukung Keamanan Informasi}}{\Sigma \text{ Total Fungsi Utama}} \times 100$$

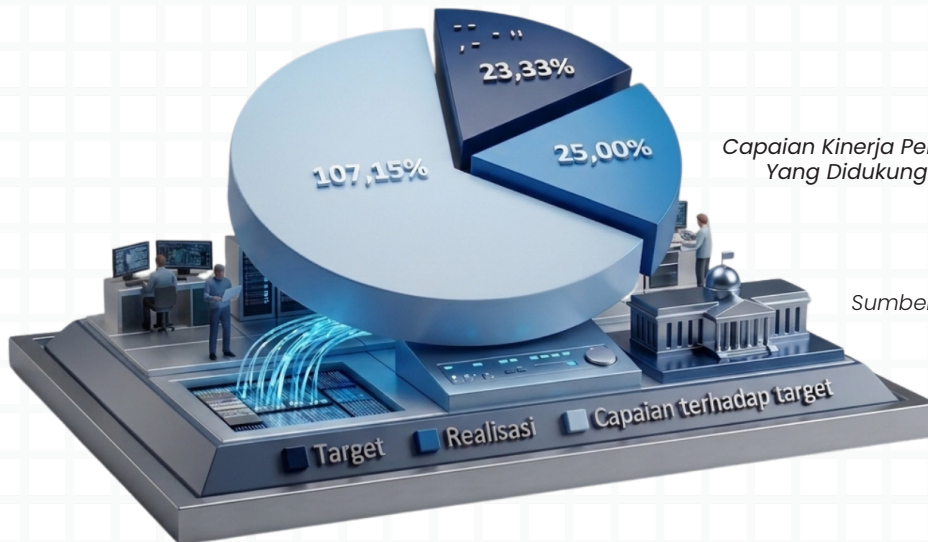


Chart 3.7
Capaian Kinerja Persentase Fungsi Utama Pemerintahan
Yang Didukung keamanan Informasi Tahun 2025

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, 2026

Mencermati chart tersebut di atas, capaian fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi terealisasi 25,00% melebihi target yang ditetapkan 23,33%, dengan persentase capaian terhadap target 107,15%. Untuk sasaran IV dengan indikator Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi, merupakan indikator baru yang diukur kinerjanya di tahun 2025, olehnya karenanya tidak ada tampilan data pembandingan pada tahun sebelumnya.

Fungsi utama pemerintahan diklasifikasikan telah didukung keamanan informasi dapat dicermati dari beberapa kriteria seperti terdapat admin/unit resmi untuk mengelola aplikasi, tersedia kontak resmi pengelola layanan, tersedia akun pengguna yang dibuat, diatur, dan dapat dinonaktifkan oleh admin, terdapat pembagian peran pengguna antara admin, operator, verifikator, serta viewer, aplikasi menggunakan https (koneksi terenkripsi), tersedia aplikasi yang dihosting pada server resmi (pusat data nasional, Pemda, Kominfo atau vendor), terdapat proses pencadangan data secara rutin, serta telah tersedia dukungan teknis jika terjadi gangguan/error pada aplikasi.

Tercapainya target pada sasaran strategis IV di atas, antara lain dipengaruhi adanya penerapan kerangka kerja standar terkait keamanan informasi melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki hubungan krusial dengan keamanan informasi. CSIRT berperan mendeteksi, mencegah dan menangani insiden keamanan siber. Keberadaan CSIRT memastikan bahwa data penting dan infrastruktur TIK terlindungi dengan terstruktur. Penggunaan firewall dan enkripsi data serta perilaku ASN dalam menangani data seperti kehati-hatian terhadap email phishing dan manajemen password juga turut berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis ini.

Fungsi Utama Pemerintahan yang didukung keamanan informasi dapat dilihat pada tampilan tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang telah didukung Keamanan Informasi Tahun 2025

No	Fungsi-fungsi Utama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan
1	SEKRETARIAT DAERAH	
1	fungsi Hukum	JDIH, GO-PRODA, E-Perda
2	fungsi Pengadaan Barang dan Jasa	SIRUP, LPSE, e-Catalogue LKPP
3	fungsi Hukum	JDIH
4	fungsi Organisasi	-
	- fungsi kelembagaan	e-sakip,
	- fungsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	E Survei Kepuasan Pelayanan Publik
2	BALITBANGREN	
1	fungsi penelitian dan pengembangan	Innovative Government Award, Sapaham
2	fungsi Perencanaan Dan Pengendalian Program	SIPD, Krisna DAK Fisik dan Non Fisik, SIPPA IBM
5	BADAN KEUANGAN	
1	fungsi Anggaran	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2	fungsi Verifikasi Dan Perbendaharaan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3	fungsi Akuntansi	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
4	fungsi Perencanaan	Siswakeudes, KRISNA, SIPDJD, SIA SPBE
5	Fungsi Perbendaharaan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
6	Fungsi Keuangan	E Monitoring DAK, OMPSPAN
7	Fungsi Monitoring dan Pelaporan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
6	BKPP	
1	fungsi Pengadaan, Informasi Kinerja Pegawai	SIMPEG, E-Absensi, E Kinerja
2	fungsi Administrasi Kepegawaian	SIMPEG
3	fungsi Disiplin Pegawai	E- Absensi
4	Fungsi Pengukuran Kinerja Individu	E- Kinerja
9	BADAN PENDAPATAN	
1	fungsi Penagihan	SIMPADU
2	fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan	SIMPADU
10	DINAS KOMINFO, STATISTIK & PERSANDIAN	
1	fungsi Teknologi Informasi	Halo Yantik, MP SPBE
2	fungsi Statistik	Polman Satu Data
3	fungsi Informasi & Komunikasi publik	e-PPID SPAN LAPOR!
4	fungsi Persandian	Website Pemda, PPID Portal BSrE, BESIGN, CSIRT
11	PENANAMAN MODAL & PTSP	
1	fungsi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan	OSS
2	fungsi Peninjauan dan Penetapan	OSS
12	DINAS PU & PENATAAN RUANG	
1	fungsi Bina Konstruksi	LPSE, E-catalogue LKPP, SIPJAKI
3	Fungsi penataan ruang	Sistem Informasi Penataaan Ruang
13	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
1	fungsi Kearsipan	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

		Terintegrasi (SRIKANDI), JIKN
14	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	
1	Fungsi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP
2	Fungsi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	HALO ASSAMI
Jumlah	120	30
Persentase Fungsi Utama Yang Telah Didukung Sistem Keamanan Informasi		25,00%

Sumber : Bidang TIP Dinas KominfoSP, 2026

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Adanya kebijakan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE
2. Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 720 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Polewali Mandar
3. Terbangunnya kesadaran akan keamanan informasi di seluruh tingkatan organisasi

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya SDM bidang keamanan informasi yang kompeten
2. Ancaman teknologi dan serangan siber yang menggunakan AI
3. Adanya kerentanan infrastruktur Sistem

Solusi

1. Pengembangan kompetensi ASN terkait keamanan informasi
2. Melaksanakan pemantauan keamanan informasi untuk antisipasi dini
3. Melakukan backup data secara rutin.
4. Menerapkan prosedur formal penanganan informasi dan respon insiden

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Tingkat Kematangan Statistik Sektoral, sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 5.317.760	Rp. 5.090.836	95,73
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.317.760	Rp. 5.090.836	95,73

a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 5.317.760	Rp. 5.090.836	95,73
---	---------------	---------------	-------

Dalam mendukung pencapaian sasaran Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi, terdapat program kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan layanan tanda tangan digital
2. Penanganan insiden siber

Tabel 3.15.
Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Tahun 2025

Program / Kegiatan	Pagu DPA Pokok	Pagu DPA Perubahan	Keterangan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 15.361.760,-	5.317.760,-	Refocusing
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 15.361.760,-	5.317.760,-	Refocusing

Dari tabel di atas, pagu DPA pokok senilai Rp. 15.361.760,- dikenai pengurangan pada refocusing untuk efisiensi senilai Rp. 10.044.000,-. Pengurangan dilakukan pada belanja-belanja rutin 2025. Pada program ini, sisa anggaran yang ada diperuntukkan pada biaya zoom meeting yang disediakan oleh Dinas kominfoSP. Penyewaan lisensi zoom dilakukan secara bulanan karena rapat terjadwal rutin dilaksanakan setiap bulan. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, zoom meeting hadir sebagai Solusi dengan menggeser rapat tatap muka ke virtual, dengan metode ini dilakukan penghematan biaya operasional, koordinasi dilakukan realtime, serta mempercepat pengambilan Keputusan.



SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : A (83,75)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 pada sasaran Strategis V, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (83,75)	A (84,00)	100,29%

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan pertanggungjawaban resmi instansi pemerintah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Adapun capaian hasil evaluasi SAKIP Dinas KominfoSP, pada tabel berikut :

Chart 3.8
Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Kominfo SP Tahun 2023-2025



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2026



Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Tahun 2023, Predikat A (89,45) dicapai signifikan dengan adanya komitmen tinggi pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP. Hal ini turut mempengaruhi keterlibatan semua pihak pada internal Dinas, untuk meningkatkan nilai SAKIP dan bekerjasama untuk mencapai tujuan SAKIP. Capaian (89,66%) Predikat A dicapaitahun2024dandipengaruhikomitmen pimpinan dalam penguatan koordinasi internal Dinas, kepada para pemangku SAKIP melalui rapat-rapat internal Dinas dengan memperhatikan capain realisasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan, dan secara nyata berpengaruh terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan

program kegiatan serta pengukuran kinerja. Untuk capaian tahun 2025, terlihat penurunan nilai pada grafik, hal ini disebabkan adanya penurunan target untuk predikat sakip Dinas KominfoSP, dengan mempertimbangkan adanya perubahan form penilaian oleh Inspektorat, dimana untuk tahun 2025 hanya dinilai 4 komponen atas akuntabilitas kinerja Dinas yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berbeda dengan komponen penilaian tahun 2024 yang menilai 5 komponen atas akuntabilitas kinerja Dinas. Momentum ini juga didukung adanya penyusunan dokumen rencana strategis Dinas KominfoSP 2025-2029, dimana dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Meskipun target predikat Sakip diturunkan di tahun 2025 (83,75), namun pada realisasi kinerja dapat dicapai melebihi target (84,00) Predikat A. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan tingkat keselarasan dokumen-dokumen perencanaan, perbaikan indikator dan target yang akan dicapai. Peningkatan dokumentasi dan bukti dukung setiap program juga diupayakan terdokumentasi dengan baik hingga memudahkan proses verifikasi, penguatan kapasitas SDM penyusun Sakip juga terus diupgrade melalui bimbingan teknis serta koordinasi berkala lingkup internal Dinas terkait capaian-capaian kinerja yang telah dicapai.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Penunjang :

1. Tersedianya aplikasi SIM Kinerja Terintegrasi.
2. Telah ditetapkannya IKU berjenjang pada Dinas KominfoSP tahun 2025

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya ketidaktepatan penyampaian bukti dukung capaian kinerja triwulanan dalam pengukuran kinerja.
2. Dalam pelaporan kinerja, belum terbangun pemahaman yang seragam terkait dokumentasi yang perlu dicantumkan dalam laporan kinerja.

Solusi

1. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan pemangku sakip pada internal Dinas, Bagian Organisasi dan Bapperida dalam rangka penguatan pengelolaan data kinerja.

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.835.260	12.835.020	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.835.100	6.834.860	100
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.160	6.000.160	100

Dalam mendukung pencapaian sasaran Predikat Sakip Perangkat Daerah, terdapat program kegiatan pendukung selama tahun 2025, sebagai berikut :

1. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Dinas KominfoSP.
2. Penentuan target dari indikator kinerja dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 telah memperhatikan capaian pada tahun 2024.
3. Hasil rekomendasi review AKIP oleh Inspektorat tahun 2024, telah ditindaklanjuti.

Tabel 3.17.
Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas KominfoSP Tahun 2025

Program / Kegiatan	Pagu DPA Pokok	Pagu DPA Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 23.056.380,-	12.835.020,-	Refocusing
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 23.056.380,-	12.835.020,-	Refocusing

Dari tabel di atas, pagu DPA pokok senilai Rp. 23.056.380,- dikenai pengurangan pada refocusing untuk efisiensi senilai Rp. 10.221.360,. Pengurangan dilakukan pada belanja- belanja rutin 2025. Selaras dengan komitmen peningkatan predikat Sakip, efisiensi anggaran yang diberlakukan secara signifikan, tidak mengurangi nilai produktivitas, dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, yang memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang terukur.



Gambar 3.5.
Rapat Evaluasi Kinerja Pemangku SAKIP Dinas KominfoSP Terkait Pencapaian Target Kinerja 2025

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan public, mencegah korupsi dan efisiensi anggaran. Hal ini untuk memastikan setiap dana dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan memenuhi peraturan berlaku. Akuntabilitas yang tinggi meningkatkan kinerja operasional dan mendukung pengambilan Keputusan strategis berdasarkan data keuangan yang valid.



Chart 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas KominfoSP Tahun 2025

Tabel 3.18
Akuntabilitas Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah <i>Predikat Keterbukaan Informasi Publik</i>	Rp 425.188.060	Rp 419.471.599	98,66	101,96	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2	Meningkatnya Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE Berbasis Elektronik <i>Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE</i>	Rp 1.379.713.260	Rp 1.379.707.500	100	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral <i>Tingkat Kematangan Statistik Sektoral</i>	Rp 9.476.600	Rp 9.476.600	100	100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi <i>Persentase Fungsi Utama Keamanan Informasi</i>	Rp 5.317.760	Rp 5.090.836	95,73	107,15	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja <i>Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	Rp 1.964.014.909	Rp 1.909.567.310	97,23	100,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL KESELURUHAN		4.299.360.659	4.299.284.375	98,37	101,85	

Akuntabilitas keuangan instansi merupakan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran secara efisien dan efektif. Dinas KominfoSP tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.4.299.360.659. Hingga akhir tahun, realisasi belanja mencapai Rp. 4.299.284.375 atau setara dengan 98,37% dari total pagu. Secara umum, capaian kinerja anggaran menunjukkan efisiensi yang tinggi, dan menghasilkan kinerja 101,85%. Efisiensi anggaran Dinas untuk tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan Dinas, dengan memangkas dan juga merelokasi anggaran operasional untuk mendukung belanja prioritas untuk peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh Dinas KominfoSP. Terwujudnya akuntabilitas keuangan Dinas KominfoSP didukung oleh kepatuhan terhadap pengendalian transaksi. Untuk lebih memperkuat akuntabilitas, Dinas KominfoSP telah menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK secara tuntas, dan perbaikan verifikasi dokumen, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, baik itu laporan keuangan berkala maupun laporan keuangan triwulan dan tahunan pada website Dinas KominfoSP. Pengadaan barang dan jasa Dinas KominfoSP tahun 2025, juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan meminimalisir risiko penyalahgunaan kewenangan.

04 PENUTUP

Terima
Kasih



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2025. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2025) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas KominfoSP 2025-2029. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dinyatakan **"berhasil"**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar **101,85%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **98,37%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, melalui aplikasi e-PPID dan pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus serta pengembangan Server Pusat Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan keamanan informasi melalui pemanfaatan tanda tangan digital serta kerjasama dengan BSSN untuk kelayakan keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan pengelolaan data sektoral di seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas, baik dalam aspek validitas, kekinian, ketepatan, kelengkapan serta kemudahan pemanfaatan Polman Satu Data.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

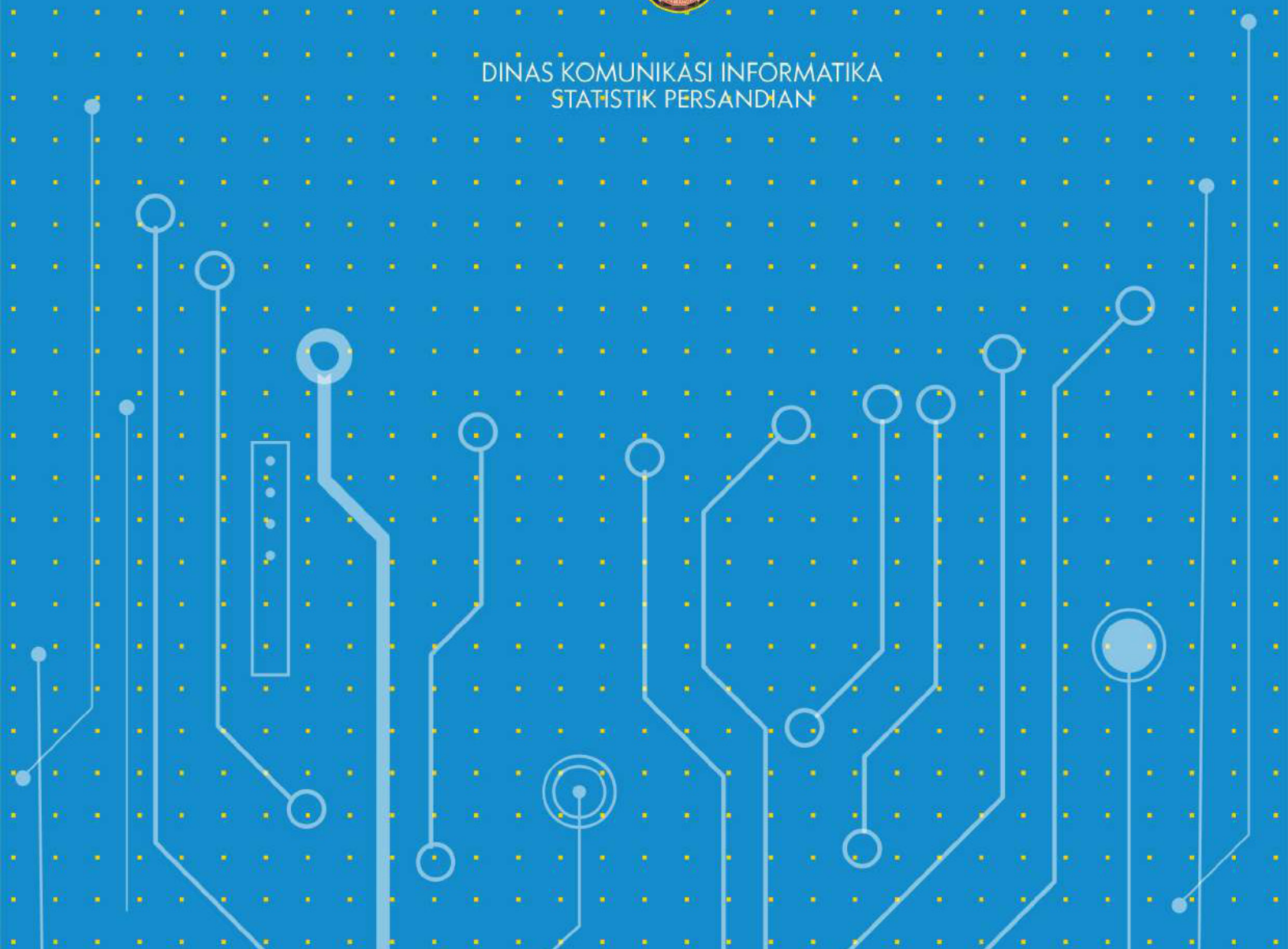
Kepala Dinas KominfoSP



Dr. Aco Musaddad HM, M.Ag., M.Si



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DR. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Bupati Polewali Mandar

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

H. SAMSUL MAHMUD



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si

Pangkat Pembina TK. I

NIP : 19751006 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menuju Informatif (93,37)	Menuju Informatif (89,00)	Menuju Informatif (89,00)
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Terstandarisasi-Kolaborasi (3;4)	Terstandarisasi-Kolaborasi (3;4)	Terstandarisasi-Kolaborasi (3;4)
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Terdefenisi (2,90)	Terdefenisi (2,90)	Terdefenisi (2,90)
4	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Persentase Fungsi Utama Pemerintahan Yang Didukung Keamanan Informasi	NA	23,33%	23,33%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (89,66)	A (83,75)	A (83,75)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	529.841.260	Rp.	425.188.060	DAU, PAD
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	1.382.352.340	Rp.	1.379.713.260	DAU
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	86.680.420	Rp.	9.476.600	DAU
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	15.361.760	Rp.	5.317.760	DAU
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.799.645.585	Rp.	2.479.664.979	DAU, PAD
JUMLAH		Rp.	4.813.881.365	Rp.	4.299.360.659	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Bupati Polewali Mandar

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

H. SAMSUL MAHMUD



D. ZACC MUSADDAD HM, M.Ag., M.Si
Pangkat: Pembina TK. I
NIP. 19751006 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah.

Indikator Kinerja

Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Penentuan Predikat Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil evaluasi yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil pengisian Kuisisioner Mandiri, maka predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 90 – 100 : Informatif
- nilai 80 – 89,9 : Menuju Informatif
- nilai 60 – 79,9 : Cukup Informatif
- nilai 40 – 59,9 : Kurang Informatif
- nilai < 39,9 : Tidak Informatif

Aspek Penilaian Evaluasi :

1. Mengumumkan Informasi Publik	25%
2. Menyediakan Dokumen Informasi Publik	10%
3. Pengembangan website	20%
4. Kelembagaan	15%
5. Pengadaan Barang dan Jasa	30%
Total	100%

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Dengan membaiknya predikat keterbukaan informasi publik, mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik	1. Nilai 90 - 100 : Informatif 2. Nilai 80 - 89,9 : Menuju Informatif 3. Nilai 60 - 69,9 : Cukup Informatif 4. Nilai 40 - 49,9 : Kurang Informatif 5. Nilai < 39 : Tidak Informatif	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (89,00)	Tren keterbukaan Informasi publik meningkat signifikan setiap tahunnya. Target predikat keterbukaan informasi publik ditetapkan tahun 2024, Menuju informatif (94,00). Hal ini didasari capaian tahun 2023 (93,48). Target tahun 2025 (89,00) mengalami perubahan dengan tidak dilaksanakannya lagi penilaian mandiri keterbukaan informasi publik oleh Dinas KominfoSP, melainkan penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025 dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas pengelolaan Aplikasi Informatika

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Peran pentingnya SPBE, diatur melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Kinerja

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses :

1. Rintisan :

Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc

2. Terkelola :

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi

3. Terstandarisasi :

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi

4. Terintegrasi dan Terukur :

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan antar instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif

5. Optimum :

Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi :

Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah

2. Interaksi :

Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah

3. Transaksi :

Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan

4. Kolaborasi :

Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE Lain

5. Optimalisasi :

Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terstandarisasi 4. Terintegrasi dan Terukur 5. Optimum Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi : 1. Informasi 2. Interaksi 3. Transaksi 4. Kolaborasi 5. Optimalisasi	Kemenpan-RB

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE	Terstandarisasi Kolaborasi (3;4)	Tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE menunjukkan tren positif setiap tahun, dengan tingkat kematangan (3;4); Terstandarisasi Kolaborasi (2023) dan tingkat kematangan (3;4); Terstandarisasi Kolaborasi (2024). Capaian ini menjadi dasar penetapan tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE 2025, Terstandarisasi Kolaborasi (3;4)

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tingkat Kematangan Statistik Sektoral adalah ukuran untuk menilai kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di berbagai instansi pemerintah. IPS bertujuan untuk mengukur kemajuan dalam penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. .

Indikator Kinerja

Tingkat Kematangan Statistik Sektoral

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. Nilai kematangan statistik sektoral merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan.

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Tingkat kematangan statistik sektoral mengacu pada sejauh mana suatu instansi pemerintah (sektoral) telah menyelenggarakan dan mengelola statistik untuk memenuhi kebutuhan tugas pemerintahan dan pembangunan, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS) melalui proses evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS)	1. Rintisan (<1,8) 2. Terkelola (1,8 s.d <2,6) 3. Terdefenisi (2,6 s.d < 3,5) 4. Terpadu dan Terukur (3,5 s.d < 4,2) 5. Optimum (4,2 s.d 5,0)	Badan Pusat Statistik (BPS)

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Terdefenisi (2,90)	Sesuai Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada pasal 7 menyebutkan bahwa pelaksanaan EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Maka untuk target tingkat kematangan statistik sektoral tahun 2025 menyesuaikan dengan target tahun 2024, Terdefenisi (2,90)

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi

Tata kelola keamanan informasi adalah kerangka kerja terstruktur yang meliputi kepemimpinan, proses, dan kebijakan untuk melindungi aset informasi organisasi dengan menyelaraskan inisiatif keamanan siber dengan tujuan bisnis dan kepatuhan peraturan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis, menetapkan akuntabilitas yang jelas, mengelola risiko, dan memantau efektivitas program keamanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	Keamanan informasi adalah upaya melindungi data dan sistem dari akses, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah pada suatu institusi	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang didukung keamanan informasi}}{\text{Jumlah total fungsi utama}} \times 100$	Dinas KoinfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Fungsi Utama Pemerintahan yang Didukung Keamanan Informasi	23,33 Persen	Target Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi merupakan indikator yang baru diukur tingkat kematangannya di tahun 2025, target 23,33%

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Inspektorat

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A tahun 2025, Predikat A (83,75) mengalami penyesuaian target dari tahun 2024, Predikat A (89,80), disebabkan adanya skema perubahan review SAKIP oleh inspektorat.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.sp.polmankab.go.id email: dinaskominfo.sp@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19751006 201001 1 007

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750717 200701 2 030

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Kantor	Persentase perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	100%	100%
2	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah	100%	100%	100%
5	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase tertib administrasi umum kantor	100%	100%	100%
6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%	100%
7	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	100%	100%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KET
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	23.056.380	Rp.	12.835.979	DAU Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.192.522.895	Rp.	1.964.014.909	DAU Umum
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	1.630.380	Rp.	910.380	DAU Umum
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	168.480.280	Rp.	88.026.780	DAU Umum
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	355.891.650	Rp.	378.843.650	PAD DAU Umum
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	58.064.000	Rp.	35.034.000	PAD, DAU Umum
JUMLAH		Rp.	2.779.645.585	Rp.	4.229.360.659	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



Dr. Agus Musaddad HM, M.Ag., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19751006 201001 1 007

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

MISKIAH MANGGAZALI, SE., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19750717 200701 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ORPA, SIP.,M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Ad**

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750717 200701 2 030

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

ORPA, SIP.,M.Si

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19811004 200701 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
2	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	6 Paket
3	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket
4	Tersedianya peralatan rumah tangga Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	203 Paket	203 Paket
6	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
7	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
8	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan SKPD	212 Laporan	102 Laporan	102 Laporan
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
11	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit
12	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	9 Unit	9 Unit

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)		KET
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	1.630.380	Rp.	910.380	DAU Umum
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	1.168.000	Rp.	1.168.000	DAU Umum
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	26.767.900	Rp.	13.508.900	DAU Umum
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	1.951.000	Rp.	1.951.000	DAU Umum
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	20.000.000	Rp.	26.560.000	DAU Umum
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	10.031.180	Rp.	1.898.480	DAU Umum
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	1.440.000	Rp.	1.440.000	DAU Umum
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	107.122.200	Rp.	41.500.000	DAU Umum
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	48.293.650	Rp.	48.293.650	PAD DAU Umum
10	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	307.598.000	Rp.	330.550.000	PAD DAU Umum
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.	29.064.000	Rp.	29.064.000	DAU Umum
12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	29.000.000	Rp.	5.970.000	DAU Umum
JUMLAH		Rp.	584.066.310	Rp.	502.814.810	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750717 200701 2 030

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



ORPA, SIP.,M.Si

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19811004 200701 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MARSUMI, S.Pi.,M.Si**

Jabatan : Sub Koordinator Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750717 200701 2 030

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Perencana Ahli Muda

MARSUMI, S.Pi.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19760327 200801 2 015

**PERJANJIAN KINERJA
SUB KOORDINATOR PERENCANA AHLI MUDA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
3	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	22 Orang	27 Orang
6	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan berkala/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-
7	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET	
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	5.057.000	Rp.	-	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Rp.	6.996.600	Rp.	6.835.100	
3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	5.002.620	Rp.	-	
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.000.160	Rp.	6.000.160	DAU Umum
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	2.179.522.115	Rp.	1.956.016.069	DAU Umum
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp.	7.998.840	Rp.	7.998.840	DAU Umum
7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Rp.	5.001.940	Rp.	-	
JUMLAH		Rp.	2.215.579.275	Rp.	1.976.850.169	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



MISKIAH MANGGAZALI, SE.,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750717 200701 2 030

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Perencana Ahli Muda



MARSUMI, S.Pi.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19760327 200801 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **M. JUNAID AR, SE.,MPA**

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19751006 201001 1 007

M. JUNAID AR, SE.,MPA
Pangkat : Pembina
NIP : 19810711 200212 1 002

KINERJA
BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	96.42%	80,25%	80,25%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 529.841.260	Rp. 425.188.060	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 529.841.260	Rp. 425.188.060	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Komunikasi Informatika
 Statistik dan Persandian



Dr. AGUS MUSADDAD HM, M.Ag., M.Si
 Pangkat : Pembina TK. I
 NIP : 19751006 201001 1 007

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

M. JUNAID AR, SE., MPA
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19810711 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Pranata Hubungan Kemasyarakatan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. JUNAID AR, SE.,MPA**

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

M. JUNAID AR, SE.,MPA

Pangkat : Pembina

NIP : 19810711 200212 1 002

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Kemasyarakatan
Ahli Muda

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
PRANATA HUBUNGAN KEMASYARAKATAN AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025 (PERUBAHAN)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tertib pengelolaan website, e PPID, Lapor dan media sosial perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-ppid, lapor dan media sosial	27 OPD	27 OPD	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp. 10.000.000	Rp. 1.415.000	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 10.000.000	Rp. 1.415.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

M. JUNAID AR, SE., MPA

Pangkat : Pembina
NIP : 19810711 200212 1 002

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Kemasyarakatan
Ahli Muda

Pangkat : -
NIP : -



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Pranata Hubungan Kemasyarakatan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. JUNAID AR, SE.,MPA**

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Kemasyarakatan
Ahli Muda

M. JUNAID AR, SE.,MPA

Pangkat : Pembina

NIP : 19810711 200212 1 002

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
PRANATA HUBUNGAN KEMASYARAKATAN AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya tertib pengelolaan website, e PPID, Lapor dan media sosial perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-ppid, lapor dan media sosial	27 OPD	27 OPD	27 OPD

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET	
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp.	509.340.460	Rp.	418.299.860	PAD, DAU Umum
2	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	10.500.800	Rp.	5.473.200	DAU Umum
JUMLAH		Rp.	519.840.460			

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

M. JUNAID AR, SE., MPA

Pangkat : Pembina

NIP : 19810711 200212 1 002

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda

Pangkat : -

NIP : -



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website:www.dinaskominfo.polmankab.go.id email:dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MAHYUNI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19751006 201001 1 007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Persandian

MAHYUNI, S.Kom

Pangkat : Pembina

NIP : 19801130 200604 2 020

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan oemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	82.50%	81,66%	81,66%
2	Meningkatnya keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	33.33%	23,33%	23,33%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.382.352.340Rp.	1.379.713.260	PAD DAU Umum
2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.361.760Rp.	5.317.760	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 1.397.714.100Rp.	1.385.031.020	


Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian



MAHYUNI, S.Kom
Pangkat : Pembina
NIP : 19801130 200604 2 020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



Dr. AGO MUSADDAD HM, M.Ag., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19751006 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Manggala Informatika Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MAHYUNI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Persandian

Pihak Pertama,
Manggala Informatika Ahli Muda

MAHYUNI, S.Kom

Pangkat : Pembina

NIP : 19801130 200604 2 020

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	99 Fungsi	98 Fungsi	98 Fungsi
2	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi	Jumlah area keamanan informasi yang tertangani	6 Area	6 Area	6 Area

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET	
1	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Rp.	120.803.320	Rp.	137.034.840	DAU Umum
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.361.760	Rp.	5.317.760	DAU Umum
JUMLAH		Rp.	136.165.080	Rp.	142.352.600	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian



MAHYUNI. S.Kom
Pangkat : Pembina
NIP : 19801130 200604 2 020

Pihak Pertama,
Manggala Informatika Ahli Muda

Pangkat : -
NIP : -



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MAHYUNI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Persandian

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Ahli Muda

MAHYUNI, S.Kom

Pangkat : Pembina

NIP : 19801130 200604 2 02

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan berbasis teknologi informasi yang didukung TIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK	99 Fungsi	98 Fungsi	98 Fungsi

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET		
1	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp.	1.261.549.020	Rp.	1.242.678.420	PAD, DAU Umum
JUMLAH		Rp.	1.261.549.020	Rp.	1.242.678.420	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Persandian

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Ahli Muda



MAHYUNI, S.Kom

Pangkat : Pembina

NIP : 19801130 200604 2 02

Pangkat : -

NIP : -



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Statistik



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19751006 201001 1 007

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19710430 199109 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG STATISTIK
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Valid	82.16%	83.00%	83.00%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 86.680.420	Rp. 9.476.600	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 86.680.420	Rp. 9.476.600	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Komunikasi Informatika
 Statistik dan Persandian



Dr. ACO MUSADDAD HM, M.Ag.,M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19751006 201001 1 007

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Statistik

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19710430 199109 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.sp.polmankab.go.id email: dinaskominfo.sp@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Statistisi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bidang Statistik

Pihak Pertama,
Statistisi Ahli Muda

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19710430 199109 1 001

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
STATISTISI AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Elemen Data Sektoral Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1527 Elemen Data	455 Elemen Data	455 Elemen Data

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp. 55.002.440	Rp. 9.141.600	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 55.002.440	Rp. 9.141.600	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Pihak Pertama,
Statistisi Ahli Muda

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19710430 199109 1 001

Pangkat : -
NIP : -



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali Kode Pos 91314

Website: www.dinaskominfo.polmankab.go.id email: dinaskominfo@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : -

Jabatan : Statistisi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bidang Statistik

Pihak Pertama,
Statistisi Ahli Muda

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19710430 199109 1 001

Pangkat : -

NIP : -

**PERJANJIAN KINERJA
STATISTISI AHLI MUDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Elemen Data Sektoral Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	1527 Elemen Data	455 Elemen Data	455 Elemen Data

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp. 31.677.980	Rp. 335.000	DAU Umum
JUMLAH		Rp. 31.677.980	Rp. 335.000	

Polewali, 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Pihak Pertama,
Statistisi Ahli Muda

AMIR BACHTIAR, S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19710430 199109 1 001

Pangkat : -
NIP : -

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERJENJANG

TRIWULAN I TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Polewali, 02 April 2025

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																	
	Sasaran Renstra :																
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah																
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	predikat	Menuju Informatif (89,00)											0	0	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika																
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	angka	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)											0	0	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral																
		Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	angka	Terdefenisi (2,90)											0	0	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A (83,75)											0	0	
	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi																
		Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	persen	23,33											0	0	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. e-PPID belum optimal dimanfaatkan untuk permohonan informasi oleh masyarakat
2. Belum seluruh Aduan masyarakat memenuhi standar aduan yang memadai
3. Perangkat Daerah belum optimal dalam pemetaan data sectoral terkait cakupan tugas dan fungsinya

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Sosialisasi pemanfaatan e-PPID oleh masyarakat melalui media sosial, banner dan pengumuman di website
2. Sosialisasi tata cara penyampaian aduan yang baik melalui iklan motion grafis, sosialisasi di media sosial dan pengumuman di website
3. Pendampingan lanjutan pemanfaatan aplikasi V3 Polman Satu Data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi															
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%										
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																	
Sasaran Program :																	
Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah																	
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah																	
persen																	
80																	
50																	
50																	
62.50																	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																	
Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laporan dan Media Sosial																	
OPD																	
27																	
3																	
0																	
0																	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi															
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%										
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 1																	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																	
Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laporan dan Media Sosial																	
OPD																	
27																	
3																	
3																	
11.11																	
Sasaran Sub-Kegiatan :																	
Terkelolanya Media komunikasi publik Pemerintah Daerah																	
Jumlah media komunikasi publik Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis																	
Media																	
5																	
5																	
5																	
100																	
Terselesainya Permohonan informasi public sesuai peraturan perundangan																	
Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan																	
kegiatan																	
6																	
0																	
0																	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laport dan Media Sosial Perangkat Daerah																
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laport dan Media Sosial	OPD	27			3								3	11.11	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya Rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang																
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah	rekomendasi	1													

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik
3. Peningkatan kapasitas admin LAPOR Perangkat Daerah

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
3. Email admin LAPOR dan PPID diupayakan menggunakan email tetap

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Komputer 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98											0	0	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terlaksananya pembangunan atau pengembangan aplikasi																
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	aplikasi	1											0	0	
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6											0	0	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian oleh Perangkat Daerah																
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	OPD	44											0	0	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Belum optimalnya aplikasi yang terintegrasi
2. Belum optimalnya fungsi utama Perangkat Daerah
3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi pengembangan aplikasi agar dapat online, interaktif, terintegrasi utamanya untuk perencanaan penganggaran, aset, dan akuntansi pelaporan
2. Koordinasi pemakaian aplikasi berbagai pakai
3. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Statistik																	
	Sasaran Program :																
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																
		Persentase Data Sektoral yang Valid	persen	83												0	0
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455												0	0

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Statistisi 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Statistisi 1																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455												0	0
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terpenuhi Kualitas Data Statistik Sektoral																
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	83												0	0

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Statistisi 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektor Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455											0	0	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI																
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	kegiatan	80											0	0	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data belum memenuhi standar data tidak dilengkapi dengan metadata
2. Pengumpulan data masih menunggu updating dari Balitbangren selaku koordinator data
3. Pengembangan Aplikasi Polman Satu Data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan memenuhi standar data dan dapat menyertakan Metadata setiap data yang dihasilkan
2. Pendampingan pemenuhan dan validasi data dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Koordinasi dengan pihak ketiga terkait pemeliharaan Aplikasi Polman Satu Data

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERJENJANG

TRIWULAN II TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Polewali, 02 Juli 2024

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																	
Sasaran Renstra :																	
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah																	
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	predikat	Menuju Informatif (89,00)												0	0
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika																	
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	angka	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)												0	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral																	
		Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	angka	Terdefenisi (2,90)					Terdefenisi (2,60)							Terdefenisi (2,60)	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A (83,75)												0	0
Meningkatnya tata kelola keamanan informasi																	
		Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	persen	23,33												0	0

Catatan Evaluasi Saat ini

1. PPID Pembantu belum optimal dalam upload data ke e-PPID
2. Aplikasi yang tersedia belum berbasis fungsi
3. Produsen Data belum seluruhnya menyediakan data yang telah diupdate

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi dengan admin PPID Perangkat Daerah
2. Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan aplikasi berbasis fungsi
3. Pendampingan kepada Perangkat Daerah selaku produsen data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																	
Sasaran Program :																	
Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah																	
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	persen	80,25			50			100					100	125	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laporan dan Media Sosial	OPD	27			3			4					7	25,92	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 1																	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laporan dan Media Sosial	OPD	27			3			4					7	11,11	
Sasaran Sub-Kegiatan :																	
Terkelolanya Media komunikasi public Pemerintah Daerah																	
		Jumlah media komunikasi public Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbauayr sesuai kriteria/juknis	Media	5			5			5					5	100	
Terselesaikannya Permohonan informasi public sesuai peraturan perundangan																	
		Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	kegiatan	6						4					4	66,66	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Lapor dan Media Sosial Perangkat Daerah																
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-PPID, Lapor dan Media Sosial	OPD	27			3								3	11.11	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya Rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang																
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah	rekomendasi	1													

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik
3. Peningkatan kapasitas admin LAPOR Perangkat Daerah

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
3. Email admin LAPOR dan PPID diupayakan menggunakan email tetap

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian																	
Sasaran Program :																	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik																	
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	predikat	81.66												0	0
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98						98						98	100
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah																	
		Tingkat Kematangan Keamanan Siber	angka	1,2													
Sasaran Kegiatan :																	
Membalknya penerapan manajemen keamanan informasi																	
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6						6						6	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Komputer 1																	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98						98						98	100
Sasaran Sub-Kegiatan :																	
Tersedianya Akses Internet																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	39						39						39	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah							
Pranata Komputer 2																									
	Sasaran Kegiatan :																								
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																								
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98											98									98	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																								
	Terlaksananya pembangunan atau pengembangan aplikasi																								
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	aplikasi	1											1									1	100
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																								
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6											6									6	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																								
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian oleh Perangkat Daerah																								
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	OPD	44											44									44	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Dalam Penyelenggaraan keamanan informasi, kapasitas SDM masih terbatas
2. Data yang dikelola sudah terlindungi, selanjutnya mencegah dari serangan atau kebocoran data
3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Peningkatan kapasitas SDM persandian
2. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi
3. Dukungan penganggaran untuk pemenuhan akses internet Kecamatan

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Statistik																	
	Sasaran Program :																
	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																
		Persentase Data Sektoral yang Valid	persen	83					7,67						7,67	9,24	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29						29	6,37	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Statistisi 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

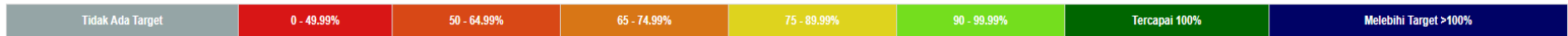
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Statistisi 1																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29						29	6,37	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terpenuhinya Kualitas Data Statistik Sektoral																
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	83					24,60						24,6	29,63	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Statistisi 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29						29	6.37	
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI																
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	kegiatan	80					36						36	45.00	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data belum memenuhi standar data tidak dilengkapi dengan metadata
2. Pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data terkendala maintenace

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi kepada Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan memenuhi standar data dan dapat menyertakan Metadata setiap data yang dihasilkan
2. Koordinasi dengan pihak ketiga penyedia Aplikasi Polman Satu Data

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERJENJANG

TRIWULAN III TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Polewali, 02 Oktober 2024

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																	
	Sasaran Renstra :																
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah																
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	predikat	Menuju Informatif (89,00)												0	0	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika																
	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	angka	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)												0	0	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral																
	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	angka	Terdefenisi (2,90)					Terdefenisi (2,60)							Terdefenisi (2,60)	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A (83,75)					A (84,00)							84	100.29	
	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi																
	Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	persen	23,33												0	0	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Aplikasi yang tersedia belum berbasis fungsi
2. Adanya serangan Siber PDN mempengaruhi upload data PPID Pembantu

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan aplikasi berbasis fungsi Kepada Perangkat Daerah
2. Koordinasi dengan PDN Kemenkominfo
3. Koordinasi dengan pihak ketiga penyedia Aplikasi Polman Satu Data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																	
	Sasaran Program :																
	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah																
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	persen	80,25			50			100			100			100	125
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website e-PPID Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 1																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial	OPD	27			3			4			10			17	62.96
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Terkelolanya Media komunikasi public Pemerintah Daerah																
		Jumlah media komunikasi public Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbauay sesuai kriteria/juknis	Media	5			5									5	100
	Terselasaikannya Permohonan informasi public sesuai peraturan perundangan																
		Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	kegiatan	6					4			2				6	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Humas 2																	
	Sasaran Kegiatan :																
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial Perangkat Daerah																
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-PPID, Laporan dan Media Sosial	OPD	27			3			4			10			17	62.96
	Sasaran Sub-Kegiatan :																
	Tersedianya Rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang																
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah	rekomendasi	1													

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Peningkatan peran dan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
2. Back up server pusat data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala
2. Dukungan penganggaran untuk pengadaan back up server data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian																		
Sasaran Program :																		
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik																		
		Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	persen	81.66												81.66	100	
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																		
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98												98	100	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah																		
		Tingkat Kematangan Keamanan Siber	angka	4												4	4	100
Sasaran Kegiatan :																		
Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																		
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6												6	6	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Komputer 1																		
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																		
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98												98	98	100
Sasaran Sub-Kegiatan :																		
Tersedianya Akses Internet																		
		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	39												39	39	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah	
Pranata Komputer 2																			
	Sasaran Kegiatan :																		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																		
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98									98		98			98	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																		
	Terlaksananya pembangunan atau pengembangan aplikasi																		
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	aplikasi	1											1			1	100
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																		
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6									6					6	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																		
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian oleh Perangkat Daerah																		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	OPD	44									44					44	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Belum optimalnya aplikasi yang terintegrasi
2. Belum optimalnya fungsi utama Perangkat Daerah
3. Masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan akses internet karena kendala infrastruktur jaringan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi pengembangan aplikasi agar dapat online, interaktif, terintegrasi utamanya untuk perencanaan penganggaran, aset, dan akuntansi pelaporan
2. Koordinasi pemakaian aplikasi berbagai pakai
3. Peningkatan kapasitas data center untuk melayani kebutuhan aplikasi

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi																
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%											
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Statistik																		
Sasaran Program :																		
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																		
		Persentase Data Sektoral yang Valid	persen	83					7,67					16,93			24,6	29,63
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																		
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29					64			93	20,43

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Statistisi 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi																
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%											
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 1																		
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																		
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29					64			93	20,43
Sasaran Sub-Kegiatan :																		
Terpenuhinya Kualitas Data Statistik Sektoral																		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	83						24,60							24,6	29,63

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455						29				64			93	20.43
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Terselenggaranya kegiatan ststistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI																	
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	kegiatan	80						36				14			50	62.50

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Sebahagian produsen data memiliki data tahun yang terbit di awal tahun
2. Upload data produsen data masih terkendala maintenance Aplikasi Polman Satu Data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Koordinasi dengan Perangkat daerah selaku produsen data
2. Koordinasi dengan pihak ketiga selaku penyedia Aplikasi Polman Satu Data

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERJENJANG

TRIWULAN IV TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Polewali, 02 Januari 2026

Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian																	
Sasaran Renstra :																	
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah																	
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	predikat	Menuju Informatif (89,00)										Informatif (90,75)	Informatif (90,75)	101.96	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika																	
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	angka	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)										Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)	100	
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral																	
		Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	angka	Terdefenisi (2,90)					Terdefenisi (2,60)					Terdefenisi (2,60)		100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A (83,75)						A (84,00)				84		100.29	
Meningkatnya tata kelola keamanan informasi																	
		Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	persen	23,33										25	25	107.15	

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Kapasitas SDM Pengelola SPBE belum merata pada Perangkat Daerah
2. Antisipasi maintenance berulang pada aplikasi Polman Satu Data

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Penguatan kapasitas SDM Pengelola SPBE Perangkat Daerah
2. Perbaharui penyedia layanan Aplikasi Polman Satu Data

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi														
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%				
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik																		
Sasaran Program :																		
Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah																		
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	persen	80,25			50			100			100			100	125	
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laport dan Media Sosial Perangkat Daerah																		
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laport dan Media Sosial	OPD	27			3			4			10			10	27	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 1

Pengukuran Kinerja		Pengukuran Anggaran		Kendala dan Solusi															
Tidak Ada Target		0 - 49.99%		50 - 64.99%		65 - 74.99%		75 - 89.99%		90 - 99.99%		Tercapai 100%		Melebihi Target >100%					
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah	
Pranata Humas 1																			
Sasaran Kegiatan :																			
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laport dan Media Sosial Perangkat Daerah																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Laport dan Media Sosial	OPD	27			3			4			10			10	27	100	
Sasaran Sub-Kegiatan :																			
Terkelolanya Media komunikasi public Pemerintah Daerah																			
		Jumlah media komunikasi public Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	5			5										5	100	
Terselesaikannya Permohonan informasi public sesuai peraturan perundangan																			
		Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	6						4			2			1		7	116,66

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Humas 2

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Pranata Humas 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Laport dan Media Sosial Perangkat Daerah																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website, e-PPID, Laport dan Media Sosial	OPD	27			3			4			10			10	27	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Tersedianya Rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang																	
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah	rekomendasi	1												1	1	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Peningkatan komitmen PPID pembantu dalam mengupdate informasi publik
2. Upgrade secara berkala sarana utama layanan informasi publik

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Implementasi standar layanan public pada OPD dilaksanakan secara berkala setiap tahun
2. Monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi public ditingkatkan secara berkala

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian																	
Sasaran Program :																	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik																	
		Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	persen	81.66						81.66					81.66	100	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98						98					98	100	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah																	
		Tingkat Kematangan Keamanan Siber	angka	4										4	4	100	
Sasaran Kegiatan :																	
Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																	
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6						6					6	100	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 1

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pranata Komputer 1																	
Sasaran Kegiatan :																	
Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																	
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98						98					98	100	
Sasaran Sub-Kegiatan :																	
Tersedianya Akses Internet																	
		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	39				39							39	100	

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pranata Komputer 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah					
Pranata Komputer 2																							
	Sasaran Kegiatan :																						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK																						
		Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98											98							98	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																						
	Terlaksananya pembangunan atau pengembangan aplikasi																						
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	aplikasi	1											1							1	100
	Membaiknya penerapan manajemen keamanan informasi																						
		Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6											6							6	100
	Sasaran Sub-Kegiatan :																						
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian oleh Perangkat Daerah																						
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	OPD	44											44							44	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Kompetensi SDM SPBE belum memenuhi standar kompetensi SDM SPBE pada seluruh Perangkat Daerah
2. Belum dilengkapinya pedoman manajemen Layanan SPBE untuk pelaksanaan Manajemen Layanan

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM terkait untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan SPBE secara lebih efektif
2. Penguatan mekanisme pelaporan dan komunikasi, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Statistik

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Kepala Bidang Statistik																		
Sasaran Program :																		
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral																		
		Persentase Data Sektoral yang Valid	persen	83					7,67				16,93			59,35	83,95	103,55
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																		
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29				64			289	382	83,96

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Statistisi 1

Pengukuran Kinerja	Pengukuran Anggaran	Kendala dan Solusi
--------------------	---------------------	--------------------

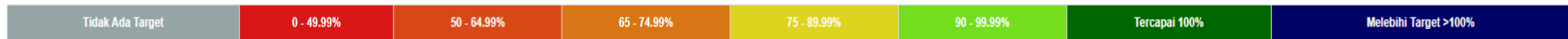
Tidak Ada Target	0 - 49.99%	50 - 64.99%	65 - 74.99%	75 - 89.99%	90 - 99.99%	Tercapai 100%	Melebihi Target >100%
------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------------

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 1																		
Sasaran Kegiatan :																		
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																		
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29				64			289	382	83,96
Sasaran Sub-Kegiatan :																		
Terpenuhinya Kualitas Data Statistik Sektoral																		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	83						24,6			16,93			59,35	83,95	103,55

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Statistisi 2

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi



Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
Statistisi 2																		
	Sasaran Kegiatan :																	
	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah																	
		Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455					29				64			289	382	83.96
	Sasaran Sub-Kegiatan :																	
	Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI																	
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	kegiatan	80					36				14			30	80	100

Catatan Evaluasi Saat ini

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik yang diperlukan pada prinsip satu data yang berkualitas
2. Belum efektifnya penerapan sanksi bagi pemangku data yang tidak mampu menyediakan data sesuai standar data yang ditetapkan
3. Produsen data yang memiliki data tahun tidak dapat memenuhi capaian 100% penyediaan data sektoral

Rekomendasi Rencana Tindak lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sektoral baik dalam penyediaan, pengolahan, penginputan termasuk pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data
2. Menyelenggarakan pembinaan berupa monitoring, evaluasi, dan penilaian bagi Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Data Terbaik Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN JANUARI 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.056.380	-	-	-	23.056.380
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.057.000	-	-	-	5.057.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.872.000	-	-	-	2.872.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.996.600	-	-	-	6.996.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	261.000	-	-	-	261.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.550.600	-	-	-	4.550.600
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.002.620	-	-	-	5.002.620
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.737.620	-	-	-	2.737.620
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.192.522.895	-	113.132.844	113.132.844	2.079.390.051
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.179.522.115	-	113.132.844	113.132.844	2.066.389.271
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.184.915.748	-	84.603.900	84.603.900	1.100.311.848
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	101.770.745	-	7.730.994	7.730.994	94.039.751
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	109.389.365	-	6.765.000	6.765.000	102.624.365
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	33.415.200	-	2.160.000	2.160.000	31.255.200
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.625.175	-	2.215.000	2.215.000	32.410.175
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	69.540.943	-	4.490.040	4.490.040	65.050.903
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.014.564	-	215.310	215.310	2.799.254
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.438	-	1.406	1.406	17.032
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.608.515	-	4.138.996	4.138.996	50.469.519
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.665.505	-	203.048	203.048	2.462.457
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.996.609	-	609.150	609.150	7.387.459
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.274.092			-	405.274.092
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.815.216			-	16.815.216

	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000			-	155.472.000
2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.001.940	-	-	-	5.001.940
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.141.940	-	-	-	2.141.940
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	-	-	2.700.000
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.630.380	-	-	-	1.630.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.630.380	-	-	-	1.630.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	-	-	720.000
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.480.280	-	-	-	168.480.280
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.767.900	-	-	-	26.767.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.783.900	-	-	-	3.783.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.108.000	-	-	-	3.108.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	14.910.000	-	-	-	14.910.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Laninnya	4.966.000	-	-	-	4.966.000
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	-	-	-	2.000.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.031.180	-	-	-	10.031.180
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.991.180	-	-	-	5.991.180
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegatan Kantor Lainnya	4.040.000	-	-	-	4.040.000
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	107.122.200	-	-	-	107.122.200
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	92.127.200	-	-	-	92.127.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	14.995.000	-	-	-	14.995.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	355.891.650	-	-	-	355.891.650
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	-	-	-	48.293.650
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	-	-	-	47.093.650
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.598.000	-	-	-	307.598.000

	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	1.190.000	-	-	-	1.190.000
	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.800.000	-	-	-	160.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	135.000.000	-	-	-	135.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	10.200.000	-	-	-	10.200.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.064.000	-	-	-	58.064.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	-	-	-	29.000.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	-	-	-	10.950.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.841.260	-	-	-	529.841.260
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.500.800	-	-	-	10.500.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	362.000	-	-	-	362.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	2.850.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.548.800	-	-	-	5.548.800
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	750.000	-	-	-	750.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	-	-	-	8.100.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	509.340.460	-	-	-	509.340.460
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	655.600	-	-	-	655.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	27.000.000	-	-	-	27.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	13.052.400	-	-	-	13.052.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.590.000	-	-	-	62.590.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.849.000	-	-	-	6.849.000
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	3.426.000	-	-	-	3.426.000
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	147.296.000	-	-	-	147.296.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.827.000	-	-	-	1.827.000
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.193.000	-	-	-	5.193.000
VIII	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH	1.382.352.340	-	-	-	1.382.352.340

		KABUPATEN/KOTA				
1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	120.803.320	-	-	120.803.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	996.000	-	-	996.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.591.520	-	-	1.591.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	6.750.000	-	-	6.750.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.768.800	-	-	16.768.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000	-	-	4.150.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.261.549.020	-	-	1.261.549.020
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	862.400	-	-	862.400
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	-	-	1.193.371.200
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.738.900	-	-	24.738.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.680.420	-	-	86.680.420
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	55.002.440	-	-	55.002.440
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.854.040	-	-	7.854.040
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	12.420.000	-	-	12.420.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	2.000.000	-	-	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.591.800	-	-	10.591.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.895.000	-	-	19.895.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	31.677.980	-	-	31.677.980
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	770.000	-	-	770.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.328.000	-	-	1.328.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	348.580	-	-	348.580
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	11.250.000	-	-	11.250.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	8.000.000	-	-	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.951.400	-	-	8.951.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.030.000	-	-	1.030.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	15.361.760
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	15.361.760

5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	6.369.000	-	-	-	6.369.000
5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.325.000	-	-	-	2.325.000
	JUMLAH	4.813.881.365	-	113.132.844	113.132.844	4.700.748.521

Polewali, 02 Februari 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN FEBRUARI 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.056.380	-	-	-	23.056.380
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.057.000	-	-	-	5.057.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.872.000	-	-	-	2.872.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.996.600	-	-	-	6.996.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	261.000	-	-	-	261.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.550.600	-	-	-	4.550.600
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.002.620	-	-	-	5.002.620
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.737.620	-	-	-	2.737.620
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.286.210.895	113.132.844	115.082.077	228.214.921	2.057.995.974
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.273.210.115	113.132.844	115.082.077	228.214.921	2.044.995.194
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.184.915.748	84.603.900	84.603.900	169.207.800	1.015.707.948
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	101.770.745	7.730.994	7.730.994	15.461.988	86.308.757
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	109.389.365	6.765.000	6.765.000	13.530.000	95.859.365
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	127.103.200	2.160.000	3.976.000	6.136.000	120.967.200
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.625.175	2.215.000	2.215.000	4.430.000	30.195.175
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	69.540.943	4.490.040	4.490.040	8.980.080	60.560.863
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.014.564	215.310	275.943	491.253	2.523.311
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.438	1.406	1.366	2.772	15.666
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.608.515	4.138.996	4.211.636	8.350.632	46.257.883
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.665.505	203.048	203.048	406.096	2.259.409
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.996.609	609.150	609.150	1.218.300	6.778.309
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.274.092			-	405.274.092
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.815.216			-	16.815.216
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000			-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.001.940	-	-	-	5.001.940
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.141.940	-	-	-	2.141.940
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	-	-	2.700.000
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.630.380	-	-	-	1.630.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.630.380	-	-	-	1.630.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	-	-	720.000
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.480.280	-	-	-	168.480.280
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.767.900	-	-	-	26.767.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.783.900	-	-	-	3.783.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.108.000	-	-	-	3.108.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	14.910.000	-	-	-	14.910.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Laninnya	4.966.000	-	-	-	4.966.000
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	-	-	-	2.000.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.031.180	-	-	-	10.031.180
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.991.180	-	-	-	5.991.180
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegatan Kantor Lainnya	4.040.000	-	-	-	4.040.000
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	107.122.200	-	-	-	107.122.200
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	92.127.200	-	-	-	92.127.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	14.995.000	-	-	-	14.995.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	355.891.650	-	-	-	355.891.650
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	-	-	-	48.293.650
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	-	-	-	47.093.650
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.598.000	-	-	-	307.598.000
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	1.190.000	-	-	-	1.190.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.800.000	-	-	-	160.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	135.000.000	-	-	-	135.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	10.200.000	-	-	-	10.200.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.064.000	-	-	-	58.064.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	-	-	-	29.000.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	-	-	-	10.950.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.841.260	-	-	-	529.841.260
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.500.800	-	-	-	10.500.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	362.000	-	-	-	362.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	2.850.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.548.800	-	-	-	5.548.800
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	750.000	-	-	-	750.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	-	-	-	8.100.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	509.340.460	-	-	-	509.340.460
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	655.600	-	-	-	655.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	27.000.000	-	-	-	27.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	13.052.400	-	-	-	13.052.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.590.000	-	-	-	62.590.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.849.000	-	-	-	6.849.000
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	3.426.000	-	-	-	3.426.000
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	147.296.000	-	-	-	147.296.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.827.000	-	-	-	1.827.000
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.193.000	-	-	-	5.193.000
VIII	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.382.352.340	-	-	-	1.382.352.340

1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	120.803.320	-	-	-	120.803.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	996.000	-	-	-	996.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.591.520	-	-	-	1.591.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.768.800	-	-	-	16.768.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000	-	-	-	4.150.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.261.549.020	-	-	-	1.261.549.020
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	862.400	-	-	-	862.400
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	-	-	-	1.193.371.200
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.738.900	-	-	-	24.738.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.680.420	-	-	-	86.680.420
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	55.002.440	-	-	-	55.002.440
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.854.040	-	-	-	7.854.040
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	12.420.000	-	-	-	12.420.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.591.800	-	-	-	10.591.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.895.000	-	-	-	19.895.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	31.677.980	-	-	-	31.677.980
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	770.000	-	-	-	770.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.328.000	-	-	-	1.328.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	348.580	-	-	-	348.580
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	11.250.000	-	-	-	11.250.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.951.400	-	-	-	8.951.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.030.000	-	-	-	1.030.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000

5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	6.369.000	-	-	-	6.369.000
5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.325.000	-	-	-	2.325.000
	JUMLAH	4.907.569.365	113.132.844	115.082.077	228.214.921	4.679.354.444



Polewali, 03 Maret 2025

Kepala Dinas

Dr. Aso Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN MARET 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.056.380	-	-	-	23.056.380
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.057.000	-	-	-	5.057.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.872.000	-	-	-	2.872.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.996.600	-	-	-	6.996.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	261.000	-	-	-	261.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.550.600	-	-	-	4.550.600
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.002.620	-	-	-	5.002.620
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.737.620	-	-	-	2.737.620
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.286.210.895	228.214.921	228.875.719	457.090.640	1.829.120.255
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.273.210.115	228.214.921	228.875.719	457.090.640	1.816.119.475
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.184.915.748	169.207.800	172.163.752	341.371.552	843.544.196
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	101.770.745	15.461.988	15.716.252	31.178.240	70.592.505
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	109.389.365	13.530.000	13.530.000	27.060.000	82.329.365
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	127.103.200	6.136.000	8.182.000	14.318.000	112.785.200
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.625.175	4.430.000	4.430.000	8.860.000	25.765.175
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	69.540.943	8.980.080	8.980.080	17.960.160	51.580.783
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.014.564	491.253	681.081	1.172.334	1.842.230
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.438	2.772	2.737	5.509	12.929
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.608.515	8.350.632	4.349.246	12.699.878	41.908.637
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.665.505	406.096	210.139	616.235	2.049.270
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.996.609	1.218.300	630.432	1.848.732	6.147.877
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.274.092			-	405.274.092
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.815.216			-	16.815.216
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000			-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.001.940	-	-	-	5.001.940
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.141.940	-	-	-	2.141.940
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	-	-	2.700.000
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.630.380	-	-	-	1.630.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.630.380	-	-	-	1.630.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	-	-	720.000
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.480.280	-	-	-	168.480.280
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.767.900	-	-	-	26.767.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.783.900	-	-	-	3.783.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.108.000	-	-	-	3.108.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	14.910.000	-	-	-	14.910.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	4.966.000	-	-	-	4.966.000
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	-	-	-	2.000.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.031.180	-	-	-	10.031.180
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.991.180	-	-	-	5.991.180
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.040.000	-	-	-	4.040.000
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.122.200	-	-	-	107.122.200
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	92.127.200	-	-	-	92.127.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	14.995.000	-	-	-	14.995.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	355.891.650	-	51.000.000	51.000.000	304.891.650
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	-	-	-	48.293.650
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	-	-	-	47.093.650
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.598.000	-	51.000.000	51.000.000	256.598.000
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	1.190.000	-	-	-	1.190.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.800.000	-	26.800.000	26.800.000	134.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	135.000.000	-	22.500.000	22.500.000	112.500.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	10.200.000	-	1.700.000	1.700.000	8.500.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.064.000	-	-	-	58.064.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	-	-	-	29.000.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	-	-	-	10.950.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.841.260	-	40.000.000	40.000.000	489.841.260
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.500.800	-	-	-	10.500.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	362.000	-	-	-	362.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	2.850.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.548.800	-	-	-	5.548.800
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	750.000	-	-	-	750.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	-	-	-	8.100.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	509.340.460	-	40.000.000	40.000.000	469.340.460
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	655.600	-	-	-	655.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	27.000.000	-	-	-	27.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	-	40.000.000	40.000.000	200.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	13.052.400	-	-	-	13.052.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.590.000	-	-	-	62.590.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.849.000	-	-	-	6.849.000
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	3.426.000	-	-	-	3.426.000
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	147.296.000	-	-	-	147.296.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.827.000	-	-	-	1.827.000
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.193.000	-	-	-	5.193.000
VIII	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.382.352.340	-	-	-	1.382.352.340

1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	120.803.320	-	-	-	120.803.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	996.000	-	-	-	996.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.591.520	-	-	-	1.591.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.768.800	-	-	-	16.768.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000	-	-	-	4.150.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.261.549.020	-	-	-	1.261.549.020
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	862.400	-	-	-	862.400
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	-	-	-	1.193.371.200
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.738.900	-	-	-	24.738.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.680.420	-	-	-	86.680.420
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	55.002.440	-	-	-	55.002.440
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.854.040	-	-	-	7.854.040
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	12.420.000	-	-	-	12.420.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.591.800	-	-	-	10.591.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.895.000	-	-	-	19.895.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	31.677.980	-	-	-	31.677.980
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	770.000	-	-	-	770.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.328.000	-	-	-	1.328.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	348.580	-	-	-	348.580
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	11.250.000	-	-	-	11.250.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.951.400	-	-	-	8.951.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.030.000	-	-	-	1.030.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000

5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	6.369.000	-	-	-	6.369.000
5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.325.000	-	-	-	2.325.000
	JUMLAH	4.907.569.365	228.214.921	319.875.719	548.090.640	4.359.478.725

Polewali, 01 April 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN APRIL 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.056.380	-	-	-	23.056.380
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.057.000	-	-	-	5.057.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.872.000	-	-	-	2.872.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.996.600	-	-	-	6.996.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	261.000	-	-	-	261.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.550.600	-	-	-	4.550.600
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.002.620	-	-	-	5.002.620
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.737.620	-	-	-	2.737.620
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.286.210.895	457.090.640	116.121.089	573.211.729	1.712.999.166
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.273.210.115	457.090.640	116.121.089	573.211.729	1.699.998.386
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.184.915.748	341.371.552	85.199.900	426.571.452	758.344.296
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	101.770.745	31.178.240	7.771.076	38.949.316	62.821.429
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	109.389.365	27.060.000	6.765.000	33.825.000	75.564.365
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	127.103.200	14.318.000	4.206.000	18.524.000	108.579.200
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.625.175	8.860.000	2.215.000	11.075.000	23.550.175
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	69.540.943	17.960.160	4.490.040	22.450.200	47.090.743
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.014.564	1.172.334	408.544	1.580.878	1.433.686
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.438	5.509	1.331	6.840	11.598
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.608.515	12.699.878	4.246.280	16.946.158	37.662.357
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.665.505	616.235	204.477	820.712	1.844.793
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.996.609	1.848.732	613.441	2.462.173	5.534.436
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.274.092			-	405.274.092
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.815.216			-	16.815.216
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000			-	155.472.000


2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.001.940	-	-	-	5.001.940
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.141.940	-	-	-	2.141.940
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	-	-	2.700.000
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.630.380	-	-	-	1.630.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.630.380	-	-	-	1.630.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	-	-	720.000
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.480.280	-	-	-	168.480.280
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.767.900	-	-	-	26.767.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.783.900	-	-	-	3.783.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.108.000	-	-	-	3.108.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	14.910.000	-	-	-	14.910.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	4.966.000	-	-	-	4.966.000
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	-	-	-	2.000.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.031.180	-	-	-	10.031.180
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.991.180	-	-	-	5.991.180
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.040.000	-	-	-	4.040.000
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.122.200	-	-	-	107.122.200
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	92.127.200	-	-	-	92.127.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.995.000	-	-	-	14.995.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	355.891.650	60.624.788	25.500.000	86.124.788	269.766.862
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	9.624.788	-	9.624.788	38.668.862
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	9.624.788	-	9.624.788	37.468.862
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.598.000	51.000.000	25.500.000	76.500.000	231.098.000
	5.1.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	1.190.000	-	-	-	1.190.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.800.000	26.800.000	13.400.000	40.200.000	120.600.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	135.000.000	22.500.000	11.250.000	33.750.000	101.250.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	10.200.000	1.700.000	850.000	2.550.000	7.650.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.064.000	-	-	-	58.064.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	-	-	-	29.000.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	-	-	-	10.950.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.841.260	60.000.000	-	60.000.000	469.841.260
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.500.800	-	-	-	10.500.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	362.000	-	-	-	362.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	2.850.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.548.800	-	-	-	5.548.800
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	750.000	-	-	-	750.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	-	-	-	8.100.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	509.340.460	60.000.000	-	60.000.000	449.340.460
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	655.600	-	-	-	655.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	27.000.000	-	-	-	27.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	60.000.000	-	60.000.000	180.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	13.052.400	-	-	-	13.052.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.590.000	-	-	-	62.590.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.849.000	-	-	-	6.849.000
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	3.426.000	-	-	-	3.426.000
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	147.296.000	-	-	-	147.296.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.827.000	-	-	-	1.827.000
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.193.000	-	-	-	5.193.000
VIII	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.382.352.340	-	-	-	1.382.352.340

1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	120.803.320	-	-	-	120.803.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	996.000	-	-	-	996.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.591.520	-	-	-	1.591.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.768.800	-	-	-	16.768.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000	-	-	-	4.150.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.261.549.020	-	-	-	1.261.549.020
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	862.400	-	-	-	862.400
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	-	-	-	1.193.371.200
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.738.900	-	-	-	24.738.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.680.420	-	-	-	86.680.420
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	55.002.440	-	-	-	55.002.440
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.854.040	-	-	-	7.854.040
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	12.420.000	-	-	-	12.420.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.591.800	-	-	-	10.591.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.895.000	-	-	-	19.895.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	31.677.980	-	-	-	31.677.980
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	770.000	-	-	-	770.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.328.000	-	-	-	1.328.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	348.580	-	-	-	348.580
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	11.250.000	-	-	-	11.250.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.951.400	-	-	-	8.951.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.030.000	-	-	-	1.030.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000

5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	6.369.000	-	-	-	6.369.000
5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.325.000	-	-	-	2.325.000
	JUMLAH	4.907.569.365	577.715.428	141.621.089	719.336.517	4.188.232.848

Polewali, 02 Mei 2025
 Kepala Dinas

Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
 NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN MEI 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.056.380	-	-	-	23.056.380
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.057.000	-	-	-	5.057.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.872.000	-	-	-	2.872.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.996.600	-	-	-	6.996.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	261.000	-	-	-	261.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.550.600	-	-	-	4.550.600
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.002.620	-	-	-	5.002.620
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.737.620	-	-	-	2.737.620
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.286.210.895	573.211.729	116.848.600	690.060.329	1.596.150.566
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.273.210.115	573.211.729	116.848.600	690.060.329	1.583.149.786
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.184.915.748	426.571.452	85.834.400	512.405.852	672.509.896
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	101.770.745	38.949.316	7.815.094	46.764.410	55.006.335
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	109.389.365	33.825.000	6.765.000	40.590.000	68.799.365
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	127.103.200	18.524.000	4.206.000	22.730.000	104.373.200
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.625.175	11.075.000	2.215.000	13.290.000	21.335.175
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	69.540.943	22.450.200	4.490.040	26.940.240	42.600.703
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.014.564	1.580.878	424.356	2.005.234	1.009.330
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.438	6.840	1.279	8.119	10.319
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.608.515	16.946.158	4.273.421	21.219.579	33.388.936
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.665.505	820.712	206.001	1.026.713	1.638.792
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.996.609	2.462.173	618.009	3.080.182	4.916.427
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.274.092			-	405.274.092
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.815.216			-	16.815.216
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000			-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.001.940	-	-	-	5.001.940
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	160.000	-	-	-	160.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.141.940	-	-	-	2.141.940
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.700.000	-	-	-	2.700.000
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.630.380	-	-	-	1.630.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.630.380	-	-	-	1.630.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	720.000	-	-	-	720.000
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.480.280	-	-	-	168.480.280
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.767.900	-	-	-	26.767.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.783.900	-	-	-	3.783.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.108.000	-	-	-	3.108.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	14.910.000	-	-	-	14.910.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	4.966.000	-	-	-	4.966.000
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	-	-	-	2.000.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.031.180	-	-	-	10.031.180
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.991.180	-	-	-	5.991.180
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.040.000	-	-	-	4.040.000
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.122.200	-	-	-	107.122.200
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	92.127.200	-	-	-	92.127.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	14.995.000	-	-	-	14.995.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	355.891.650	86.124.788	30.812.521	116.937.309	238.954.341
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	9.624.788	5.312.521	14.937.309	33.356.341
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	9.624.788	5.312.521	14.937.309	32.156.341
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.598.000	76.500.000	25.500.000	102.000.000	205.598.000
	5.1.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	1.190.000	-	-	-	1.190.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.800.000	40.200.000	13.400.000	53.600.000	107.200.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	135.000.000	33.750.000	11.250.000	45.000.000	90.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	10.200.000	2.550.000	850.000	3.400.000	6.800.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.064.000	-	-	-	58.064.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.000.000	-	-	-	29.000.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	10.950.000	-	-	-	10.950.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.841.260	60.000.000	20.000.000	80.000.000	449.841.260
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.500.800	-	-	-	10.500.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	362.000	-	-	-	362.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	2.850.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.548.800	-	-	-	5.548.800
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	750.000	-	-	-	750.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	-	-	-	8.100.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	509.340.460	60.000.000	20.000.000	80.000.000	429.340.460
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	655.600	-	-	-	655.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	27.000.000	-	-	-	27.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	60.000.000	20.000.000	80.000.000	160.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	13.052.400	-	-	-	13.052.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.590.000	-	-	-	62.590.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.849.000	-	-	-	6.849.000
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	3.426.000	-	-	-	3.426.000
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	147.296.000	-	-	-	147.296.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.827.000	-	-	-	1.827.000
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.193.000	-	-	-	5.193.000
VIII	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.382.352.340	-	298.341.360	298.341.360	1.084.010.980

1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	120.803.320	-	-	-	120.803.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	996.000	-	-	-	996.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.591.520	-	-	-	1.591.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.768.800	-	-	-	16.768.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000	-	-	-	4.150.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.261.549.020	-	298.341.360	298.341.360	963.207.660
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	862.400	-	-	-	862.400
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	-	298.341.360	298.341.360	895.029.840
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.738.900	-	-	-	24.738.900
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.680.420	-	-	-	86.680.420
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	55.002.440	-	-	-	55.002.440
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.854.040	-	-	-	7.854.040
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	12.420.000	-	-	-	12.420.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.591.800	-	-	-	10.591.800
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.895.000	-	-	-	19.895.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	31.677.980	-	-	-	31.677.980
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	770.000	-	-	-	770.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.328.000	-	-	-	1.328.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	348.580	-	-	-	348.580
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	11.250.000	-	-	-	11.250.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.951.400	-	-	-	8.951.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.030.000	-	-	-	1.030.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.361.760	-	-	-	15.361.760

5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	6.369.000	-	-	-	6.369.000
5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.325.000	-	-	-	2.325.000
	JUMLAH	4.907.569.365	719.336.517	466.002.481	1.185.338.998	3.722.230.367

Polewali, 03 Juni 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN JUNI 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.081.577.075	690.060.329	229.454.051	919.514.380	1.162.062.695
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.073.578.235	690.060.329	229.454.051	919.514.380	1.154.063.855
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.215.461.773	512.405.852	172.519.017	684.924.869	530.536.904
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	110.862.170	46.764.410	15.700.102	62.464.512	48.397.658
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	96.509.490	40.590.000	13.530.000	54.120.000	42.389.490
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	153.690.796	22.730.000	8.412.000	31.142.000	122.548.796
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.599.190	13.290.000	4.430.000	17.720.000	13.879.190
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	64.054.911	26.940.240	8.980.080	35.920.320	28.134.591
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	4.261.169	2.005.234	737.916	2.743.150	1.518.019
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.058	8.119	2.532	10.651	9.407
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.577.430	21.219.579	4.310.230	25.529.809	35.047.621
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.917.069	1.026.713	208.043	1.234.756	1.682.313
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.751.349	3.080.182	624.131	3.704.313	5.047.036
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	-	-	-	169.400.830
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000	-	-	-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	910.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	64.802.480	-	-	-	64.802.480
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.034.900	-	-	-	4.034.900
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	-	-	-	2.414.900
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	-	-	-	1.620.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	-	-	-	-	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	-	-	1.951.000
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	-	-	1.951.000
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.965.000	-	-	-	12.965.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.925.000	-	-	-	11.925.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.040.000	-	-	-	1.040.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	-	-	1.440.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	-	-	-	1.440.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.345.100	-	-	-	41.345.100
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	32.505.100	-	-	-	32.505.100
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	8.840.000	-	-	-	8.840.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	382.843.650	116.937.309	25.500.000	142.437.309	240.406.341
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	14.937.309	-	14.937.309	33.356.341
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	14.937.309	-	14.937.309	32.156.341
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	334.550.000	102.000.000	25.500.000	127.500.000	207.050.000
	5.1.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.200.000	53.600.000	13.400.000	67.000.000	97.200.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	45.000.000	11.250.000	56.250.000	66.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	3.400.000	850.000	4.250.000	8.600.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	-	-	-	10.200.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	-	-	-	35.034.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	-	-	29.064.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	-	-	20.001.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.504.860	80.000.000	20.000.000	100.000.000	312.504.860
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3.223.200	-	-	-	3.223.200
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	-	-	-	1.483.200
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	407.866.660	80.000.000	20.000.000	100.000.000	307.866.660
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	-	-	-	10.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	80.000.000	20.000.000	100.000.000	140.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	12.895.200	-	-	-	12.895.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000	-	-	-	30.750.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	-	-	111.970.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-

	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
VIII	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.342.295.660	298.341.360	-	298.341.360	1.043.954.300
1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	99.617.240	-	-	-	99.617.240
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	-	-	-	480.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	-	-	-	607.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	-	-	-	3.375.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.582.400	-	-	-	2.582.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	298.341.360	-	298.341.360	944.337.060
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	-	-	-	833.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	-	-	773.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	-	-	1.223.520
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	298.341.360	-	298.341.360	895.029.840
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	-	-	-	5.897.100
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	-	-	10.180.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.636.800	-	-	-	15.636.800
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	15.301.800	-	-	-	15.301.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.660.200	-	-	-	7.660.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	-	-	-	5.317.760

1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	-	-	-	5.317.760
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	-	-	498.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	-	-	4.320.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.346.922.825	1.185.338.998	274.954.051	1.460.293.049	2.886.629.776

Polewali, 02 Juli 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN JULI 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.081.577.075	919.514.380	153.499.070	1.073.013.450	1.008.563.625
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.073.578.235	919.514.380	153.499.070	1.073.013.450	1.000.564.785
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.215.461.773	684.924.869	85.834.400	770.759.269	444.702.504
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	110.862.170	62.464.512	7.815.094	70.279.606	40.582.564
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	96.509.490	54.120.000	6.765.000	60.885.000	35.624.490
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	153.690.796	31.142.000	4.206.000	35.348.000	118.342.796
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.599.190	17.720.000	2.215.000	19.935.000	11.664.190
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	64.054.911	35.920.320	4.490.040	40.410.360	23.644.551
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	4.261.169	2.743.150	424.356	3.167.506	1.093.663
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.058	10.651	1.279	11.930	8.128
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	60.577.430	25.529.809	4.273.421	29.803.230	30.774.200
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.917.069	1.234.756	206.001	1.440.757	1.476.312
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.751.349	3.704.313	618.009	4.322.322	4.429.027
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	-	36.650.470	36.650.470	132.750.360
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-

	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000				-	155.472.000
2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-	-
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	-	910.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-	-
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	64.802.480	-	19.153.900	19.153.900	19.153.900	45.648.580
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.034.900	-	1.417.900	1.417.900	1.417.900	2.617.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	-	1.417.900	1.417.900	1.417.900	997.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	-	-	-	-	1.620.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	-	-	-	-	-	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Laninnya	-	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	-	1.951.000	1.951.000	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	-	1.951.000	1.951.000	1.951.000	-
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.965.000	-	8.295.000	8.295.000	8.295.000	4.670.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.925.000	-	7.650.000	7.650.000	7.650.000	4.275.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.040.000	-	645.000	645.000	645.000	395.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	-	720.000	720.000	720.000	720.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kabar/ Majalah	1.440.000	-	720.000	720.000	720.000	720.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.345.100	-	6.770.000	6.770.000	6.770.000	34.575.100
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	32.505.100	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	31.405.100
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.840.000	-	5.670.000	5.670.000	5.670.000	3.170.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	382.843.650	142.437.309	58.945.913	201.383.222	201.383.222	181.460.428
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	14.937.309	5.945.913	20.883.222	20.883.222	27.410.428
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	14.937.309	5.945.913	20.883.222	20.883.222	26.210.428
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000

2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	334.550.000	127.500.000	53.000.000	180.500.000	154.050.000
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000
	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.200.000	67.000.000	16.800.000	83.800.000	80.400.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	56.250.000	11.250.000	67.500.000	54.750.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	4.250.000	1.850.000	6.100.000	6.750.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	-	5.100.000	5.100.000	5.100.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	-	9.167.000	9.167.000	25.867.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	-	9.167.000	9.167.000	19.897.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	-	9.167.000	9.167.000	10.834.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	-	-	2.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.504.860	100.000.000	46.965.539	146.965.539	265.539.321
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3.223.200	-	-	-	3.223.200
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	-	-	-	1.483.200
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	407.866.660	100.000.000	46.965.539	146.965.539	260.901.121
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	-	-	369.460
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	-	-	-	10.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	100.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	12.895.200	-	11.345.539	11.345.539	1.549.661
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000	-	15.620.000	15.620.000	15.130.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-

	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	-	-	111.970.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
VIII	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.342.295.660	298.341.360	382.274.320	680.615.680	661.679.980
1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	99.617.240	-	80.557.840	80.557.840	19.059.400
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	-	240.000	240.000	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	-	317.840	317.840	290.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	-	-	-	3.375.000
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	-	80.000.000	80.000.000	10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.582.400	-	-	-	2.582.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	298.341.360	301.716.480	600.057.840	642.620.580
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	-	212.600	212.600	621.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	-	435.000	435.000	338.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	-	477.520	477.520	746.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	-	-	5.400.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	298.341.360	298.341.360	596.682.720	596.688.480
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	-	-	-	5.897.100
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	-	2.250.000	2.250.000	7.930.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.636.800	-	-	-	15.636.800
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	15.301.800	-	-	-	15.301.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	-	-	836.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.660.200	-	-	-	7.660.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-

	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	-	4.591.076	4.591.076	726.684
1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	-	4.591.076	4.591.076	726.684
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	-	498.000	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	-	4.093.076	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.346.922.825	1.460.293.049	674.596.818	2.134.889.867	2.212.032.958



Polewali, 01 Agustus 2025

Keppala Dinas

Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN AGUSTUS 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.081.577.075	1.073.013.450	116.848.600	1.189.862.050	891.715.025
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.073.578.235	1.073.013.450	116.848.600	1.189.862.050	883.716.185
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.215.461.773	770.759.269	85.834.400	856.593.669	358.868.104
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	110.862.170	70.279.606	7.815.094	78.094.700	32.767.470
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	96.509.490	60.885.000	6.765.000	67.650.000	28.859.490
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	153.690.796	35.348.000	4.206.000	39.554.000	114.136.796
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.599.190	19.935.000	2.215.000	22.150.000	9.449.190
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	64.054.911	40.410.360	4.490.040	44.900.400	19.154.511
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	4.261.169	3.167.506	424.356	3.591.862	669.307
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.058	11.930	1.279	13.209	6.849
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.577.430	29.803.230	4.273.421	34.076.651	26.500.779
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.917.069	1.440.757	206.001	1.646.758	1.270.311
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.751.349	4.322.322	618.009	4.940.331	3.811.018
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	36.650.470	-	36.650.470	132.750.360
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000	-	-	-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	910.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	64.802.480	19.153.900	12.513.577	31.667.477	33.135.003
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.034.900	1.417.900	-	1.417.900	2.617.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	1.417.900	-	1.417.900	997.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	-	-	-	1.620.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	-	-	-	-	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.965.000	8.295.000	-	8.295.000	4.670.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.925.000	7.650.000	-	7.650.000	4.275.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.040.000	645.000	-	645.000	395.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	720.000	120.000	840.000	600.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	720.000	120.000	840.000	600.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.345.100	6.770.000	12.393.577	19.163.577	22.181.523
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	32.505.100	1.100.000	11.268.577	12.368.577	20.136.523
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	8.840.000	5.670.000	1.125.000	6.795.000	2.045.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	382.843.650	201.383.222	29.133.978	230.517.200	152.326.450
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	20.883.222	3.633.978	24.517.200	23.776.450
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	20.883.222	3.633.978	24.517.200	22.576.450
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	334.550.000	180.500.000	25.500.000	206.000.000	128.550.000
	5.1.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.200.000	83.800.000	13.400.000	97.200.000	67.000.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	67.500.000	9.250.000	76.750.000	45.500.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	6.100.000	1.000.000	7.100.000	5.750.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	6.000.000	1.000.000	7.000.000	5.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	5.100.000	850.000	5.950.000	4.250.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	9.167.000	1.000.000	10.167.000	24.867.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	9.167.000	1.000.000	10.167.000	18.897.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	9.167.000	-	9.167.000	10.834.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	-	1.000.000	1.000.000	1.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.504.860	146.965.539	39.293.860	186.259.399	226.245.461
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3.223.200	-	1.483.200	1.483.200	1.740.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	-	1.483.200	1.483.200	-
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	407.866.660	146.965.539	37.810.660	184.776.199	223.090.461
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	-	369.460	369.460	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	-	9.000.000	9.000.000	1.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	120.000.000	20.000.000	140.000.000	100.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	12.895.200	11.345.539	1.291.200	12.636.739	258.461
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000	15.620.000	7.150.000	22.770.000	7.980.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	-	-	111.970.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-

	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
VIII	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.342.295.660	680.615.680	13.136.900	693.752.580	648.543.080
1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	99.617.240	80.557.840	3.375.000	83.932.840	15.684.400
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	240.000	-	240.000	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	317.840	-	317.840	290.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	-	3.375.000	3.375.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	80.000.000	-	80.000.000	10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.582.400	-	-	-	2.582.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	600.057.840	9.761.900	609.819.740	632.858.680
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	212.600	-	212.600	621.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	435.000	-	435.000	338.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	477.520	-	477.520	746.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	-	4.500.000	4.500.000	900.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	596.682.720	-	596.682.720	596.688.480
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	-	1.606.900	1.606.900	4.290.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	2.250.000	3.655.000	5.905.000	4.275.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.636.800	-	836.000	836.000	14.800.800
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	15.301.800	-	836.000	836.000	14.465.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	-	836.000	836.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.660.200	-	-	-	7.660.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684

1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	498.000	-	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	4.093.076	-	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.346.922.825	2.134.889.867	212.762.915	2.347.652.782	1.999.270.043



Polewali, 01 September 2025

Kepala Dinas

Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
NIP. 197510062010011007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN SEPTEMBER 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
I	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
II	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.081.577.075	1.189.862.050	157.099.036	1.346.961.086	734.615.989
1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.073.578.235	1.189.862.050	157.099.036	1.346.961.086	726.617.149
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.215.461.773	856.593.669	85.834.400	942.428.069	273.033.704
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	110.862.170	78.094.700	7.815.094	85.909.794	24.952.376
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	96.509.490	67.650.000	6.765.000	74.415.000	22.094.490
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	153.690.796	39.554.000	4.206.000	43.760.000	109.930.796
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.599.190	22.150.000	2.215.000	24.365.000	7.234.190
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	64.054.911	44.900.400	4.490.040	49.390.440	14.664.471
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	4.261.169	3.591.862	424.356	4.016.218	244.951
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.058	13.209	1.279	14.488	5.570
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.577.430	34.076.651	4.273.421	38.350.072	22.227.358
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.917.069	1.646.758	206.001	1.852.759	1.064.310
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.751.349	4.940.331	618.009	5.558.340	3.193.009
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	36.650.470	40.250.436	76.900.906	92.499.924
	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.472.000	-	-	-	155.472.000

2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
III	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	910.380
1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
IV	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	64.802.480	31.667.477	6.345.400	38.012.877	26.789.603
1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.034.900	1.417.900	-	1.417.900	2.617.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	587.900	-	587.900	1.827.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	830.000	-	830.000	790.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	-	-	-	-	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.965.000	8.295.000	-	8.295.000	4.670.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.925.000	7.650.000	-	7.650.000	4.275.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.040.000	645.000	-	645.000	395.000
5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	840.000	120.000	960.000	480.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	840.000	120.000	960.000	480.000
7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.345.100	19.163.577	6.225.400	25.388.977	15.956.123
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	32.505.100	12.368.577	5.165.400	17.533.977	14.971.123
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	8.840.000	6.795.000	1.060.000	7.855.000	985.000
V	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	382.843.650	230.517.200	25.500.000	256.017.200	126.826.450
1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	24.517.200	-	24.517.200	23.776.450
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	24.517.200	-	24.517.200	22.576.450
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	334.550.000	206.000.000	25.500.000	231.500.000	103.050.000
	5.1.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000

	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.200.000	97.200.000	13.400.000	110.600.000	53.600.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	76.750.000	9.250.000	86.000.000	36.250.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	7.100.000	1.000.000	8.100.000	4.750.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	5.950.000	850.000	6.800.000	3.400.000
VI	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	10.167.000	-	10.167.000	24.867.000
1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	10.167.000	-	10.167.000	18.897.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	9.167.000	-	9.167.000	10.834.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	1.000.000	-	1.000.000	1.063.000
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
VII	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.504.860	186.259.399	24.670.000	210.929.399	201.575.461
1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3.223.200	1.483.200	-	1.483.200	1.740.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	1.483.200	-	1.483.200	-
2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	407.866.660	184.776.199	24.670.000	209.446.199	198.420.461
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	369.460	-	369.460	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	9.000.000	-	9.000.000	1.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	140.000.000	20.000.000	160.000.000	80.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	12.895.200	12.636.739	-	12.636.739	258.461
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.750.000	22.770.000	4.670.000	27.440.000	3.310.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	-	-	111.970.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-

	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
VIII	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.342.295.660	693.752.580	-	693.752.580	648.543.080
1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	99.617.240	83.932.840	-	83.932.840	15.684.400
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	240.000	-	240.000	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	317.840	-	317.840	290.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	3.375.000	-	3.375.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	80.000.000	-	80.000.000	10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.582.400	-	-	-	2.582.400
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	609.819.740	-	609.819.740	632.858.680
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	212.600	-	212.600	621.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	435.000	-	435.000	338.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	477.520	-	477.520	746.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	4.500.000	-	4.500.000	900.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	596.682.720	-	596.682.720	596.688.480
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	1.606.900	-	1.606.900	4.290.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	5.905.000	-	5.905.000	4.275.000
IX	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.636.800	836.000	-	836.000	14.800.800
1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	15.301.800	836.000	-	836.000	14.465.800
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	836.000	-	836.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.660.200	-	-	-	7.660.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
X	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684

1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	498.000	-	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	4.093.076	-	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.346.922.825	2.347.652.782	213.614.436	2.561.267.218	1.785.655.607

Polewali, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
NIP. 197510062010011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN OKTOBER 2025

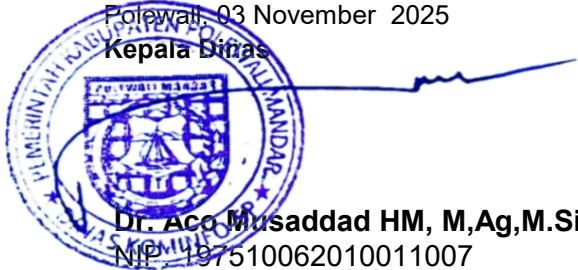
NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	2.16.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.475.069.442	1.651.158.163	255.061.851	1.906.220.014	568.849.428
1	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.835.260	-	-	-	12.835.260
1,1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.835.100	-	-	-	6.835.100
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.835.100	-	-	-	6.835.100
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
2	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.959.419.372	1.346.961.086	216.159.078	1.563.120.164	396.299.208
2,1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.951.420.532	1.346.961.086	216.159.078	1.563.120.164	388.300.368
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.261.570.976	942.428.069	121.634.060	1.064.062.129	197.508.847
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	117.585.474	85.909.794	7.180.880	93.090.674	24.494.800
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	95.352.675	74.415.000	6.765.000	81.180.000	14.172.675
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	103.621.570	43.760.000	4.206.000	47.966.000	55.655.570
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.660.425	24.365.000	5.175.000	29.540.000	6.120.425
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	70.239.434	49.390.440	5.431.500	54.821.940	15.417.494
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	5.329.600	4.016.218	418.903	4.435.121	894.479
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.094	14.488	1.873	16.361	14.733
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.192.844	38.350.072	5.798.432	44.148.504	10.044.340
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.618.696	1.852.759	291.928	2.144.687	474.009
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.856.176	5.558.340	875.772	6.434.112	1.422.064
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	76.900.906	40.214.662	117.115.568	52.285.262

	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-			-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-			-	-
	5.1.01.01.01.0002	- Belanja Pokok PNS PPPK	19.221.600		12.814.400	12.814.400	6.407.200
	5.1.01.01.02.0002	- Belanja Keluarga PPPK	2.691.024		1.537.728	1.537.728	1.153.296
	5.1.01.01.06.0002	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.623.080		869.040	869.040	754.040
	5.1.01.01.05.0002	- Belanja fungsional PPPK	3.240.000		2.160.000	2.160.000	1.080.000
	5.1.01.01.08.0002	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000		396	396	8.604
	5.1.01.01.09.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	991.504		660.484	660.484	331.020
	5.1.01.01.10.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.134		30.756	30.756	15.378
	5.1.01.01.11.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	138.396		92.264	92.264	46.132
2,2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2,3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	910.380
3,1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.026.780	38.012.877	240.000	38.252.877	49.773.903
4,1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
4,2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.508.900	1.417.900	-	1.417.900	12.091.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	587.900	-	587.900	1.827.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	830.000	-	830.000	790.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	9.474.000	-	-	-	9.474.000
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Laninnya	-	-	-	-	-
4,3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
4,4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.560.000	8.295.000	-	8.295.000	18.265.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.490.000	7.650.000	-	7.650.000	15.840.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.070.000	645.000	-	645.000	2.425.000
4,5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
4,6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	960.000	240.000	1.200.000	240.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	960.000	240.000	1.200.000	240.000

4,7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.500.400	25.388.977	-	25.388.977	16.111.423
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	25.485.400	17.533.977	-	17.533.977	7.951.423
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	16.015.000	7.855.000	-	7.855.000	8.160.000
5	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	378.843.650	256.017.200	30.932.773	286.949.973	91.893.677
5,1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	24.517.200	6.432.773	30.949.973	17.343.677
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	24.517.200	6.432.773	30.949.973	16.143.677
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
5,2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	330.550.000	231.500.000	24.500.000	256.000.000	74.550.000
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000
	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152.200.000	110.600.000	12.400.000	123.000.000	29.200.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	86.000.000	9.250.000	95.250.000	27.000.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	8.100.000	1.000.000	9.100.000	3.750.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	20.000.000	12.000.000	-	12.000.000	8.000.000
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000	3.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	6.800.000	850.000	7.650.000	2.550.000
6	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	10.167.000	7.730.000	17.897.000	17.137.000
6,1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	10.167.000	7.730.000	17.897.000	11.167.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	9.167.000	6.667.000	15.834.000	4.167.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	1.000.000	1.063.000	2.063.000	-
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
6,2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
II	2.16.02	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	425.188.060	210.929.399	20.000.000	230.929.399	194.258.661
2	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.188.060	210.929.399	20.000.000	230.929.399	194.258.661
2,1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5.473.200	1.483.200	-	1.483.200	3.990.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.250.000	-	-	-	2.250.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	1.483.200	-	1.483.200	-
2,2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
2,3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	418.299.860	209.446.199	20.000.000	229.446.199	188.853.661
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-

	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	369.460	-	369.460	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	9.000.000	-	9.000.000	1.800.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	160.000.000	20.000.000	180.000.000	60.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	14.378.400	12.636.739	-	12.636.739	1.741.661
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.700.000	27.440.000	-	27.440.000	12.260.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	-	-	111.970.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
III	2.16.03	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.379.713.260	693.752.580	308.341.360	1.002.093.940	337.619.320
3	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.379.713.260	693.752.580	308.341.360	1.002.093.940	337.619.320
3,1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	137.034.840	83.932.840	10.000.000	93.932.840	3.102.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	240.000	-	240.000	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	317.840	-	317.840	290.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	3.375.000	-	3.375.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	80.000.000	10.000.000	90.000.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	-	-	2.025.000
	5.1.02.12.01.0004	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.000.000	-	-	-	40.000.000
3,2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	609.819.740	298.341.360	908.161.100	334.517.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	212.600	-	212.600	621.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	435.000	-	435.000	338.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	477.520	-	477.520	746.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	4.500.000	-	4.500.000	900.000
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	596.682.720	298.341.360	895.024.080	298.347.120
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	1.606.900	-	1.606.900	4.290.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	5.905.000	-	5.905.000	4.275.000
IV	2.20	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	9.476.600	836.000	-	836.000	8.640.600
4	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.476.600	836.000	-	836.000	8.640.600
4,1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	9.141.600	836.000	-	836.000	8.305.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	836.000	-	836.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-

	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
4,2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
V	2,21	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
5	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
5,1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	498.000	-	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	4.093.076	-	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.294.765.122	2.561.267.218	583.403.211	3.144.670.429	1.110.094.693



 Poleywali, 03 November 2025
 Kepala Dinas
Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si
 NIP. 197510062010011007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN NOVEMBER 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	2.16.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.475.069.442	1.906.220.014	219.125.559	2.125.345.573	349.723.869
1	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.835.260	-	6.834.860	6.834.860	6.000.400
1,1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.835.100	-	6.834.860	6.834.860	240
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.835.100	-	6.834.860	6.834.860	240
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	-	-	6.000.160
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	-	-	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	-	-	4.410.160
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	-	-	1.350.000
2	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.959.419.372	1.563.120.164	131.073.119	1.694.193.283	265.226.089
2,1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.951.420.532	1.563.120.164	131.073.119	1.694.193.283	257.227.249
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.261.570.976	1.064.062.129	94.891.340	1.158.953.469	102.617.507
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	117.585.474	93.090.674	7.180.880	100.271.554	17.313.920
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	95.352.675	81.180.000	6.765.000	87.945.000	7.407.675
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	103.621.570	47.966.000	4.206.000	52.172.000	51.449.570
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.660.425	29.540.000	2.955.000	32.495.000	3.165.425
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	70.239.434	54.821.940	4.562.460	59.384.400	10.855.034
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	5.329.600	4.435.121	418.903	4.854.024	475.576
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.094	16.361	1.381	17.742	13.352
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.192.844	44.148.504	4.639.928	48.788.432	5.404.412
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.618.696	2.144.687	227.740	2.372.427	246.269
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.856.176	6.434.112	683.220	7.117.332	738.844
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	117.115.568	-	117.115.568	52.285.262

	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-
	5.1.01.01.01.0002	- Belanja Pokok PNS PPPK	19.221.600	12.814.400	3.203.600	16.018.000	3.203.600
	5.1.01.01.02.0002	- Belanja Keluarga PPPK	2.691.024	1.537.728	384.432	1.922.160	768.864
	5.1.01.01.06.0002	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.623.080	869.040	217.260	1.086.300	536.780
	5.1.01.01.05.0002	- Belanja fungsional PPPK	3.240.000	2.160.000	540.000	2.700.000	540.000
	5.1.01.01.08.0002	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	396	99	495	8.505
	5.1.01.01.09.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	991.504	660.484	165.121	825.605	165.899
	5.1.01.01.10.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.134	30.756	7.689	38.445	7.689
	5.1.01.01.11.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	138.396	92.264	23.066	115.330	23.066
2,2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	-	7.998.840
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	-	-	320.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	-	-	5.653.840
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	-	-	2.025.000
2,3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	-	-	910.380
3,1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	-	-	910.380
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.026.780	38.252.877	28.486.000	66.738.877	21.287.903
4,1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	-	-	1.168.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	-	-	1.168.000
4,2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.508.900	1.417.900	11.301.000	12.718.900	790.000
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	587.900	1.827.000	2.414.900	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	830.000	-	830.000	790.000
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	9.474.000	-	9.474.000	9.474.000	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-
4,3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
4,4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.560.000	8.295.000	7.070.000	15.365.000	11.195.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.490.000	7.650.000	5.040.000	12.690.000	10.800.000
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.070.000	645.000	2.030.000	2.675.000	395.000
4,5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	-	-	1.898.480
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
4,6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	1.200.000	-	1.200.000	240.000
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	1.200.000	-	1.200.000	240.000

4,7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	41.500.400	25.388.977	10.115.000	35.503.977	5.996.423
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	25.485.400	17.533.977	5.090.000	22.623.977	2.861.423
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	16.015.000	7.855.000	5.025.000	12.880.000	3.135.000
5	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	378.843.650	286.949.973	52.731.580	339.681.553	39.162.097
5,1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	30.949.973	3.731.580	34.681.553	13.612.097
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	30.949.973	3.731.580	34.681.553	12.412.097
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
5,2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	330.550.000	256.000.000	49.000.000	305.000.000	25.550.000
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	-	-	642.000
	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	-	-	408.000
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152.200.000	123.000.000	24.800.000	147.800.000	4.400.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	95.250.000	18.500.000	113.750.000	8.500.000
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	9.100.000	2.000.000	11.100.000	1.750.000
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	20.000.000	12.000.000	-	12.000.000	8.000.000
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	9.000.000	2.000.000	11.000.000	1.000.000
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	7.650.000	1.700.000	9.350.000	850.000
6	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	17.897.000	-	17.897.000	17.137.000
6,1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	17.897.000	-	17.897.000	11.167.000
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	15.834.000	-	15.834.000	4.167.000
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	2.063.000	-	2.063.000	-
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	-	-	7.000.000
6,2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	-	-	5.970.000
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	-	-	3.050.000
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	-	-	2.920.000
II	2.16.02	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	425.188.060	230.929.399	161.540.200	392.469.599	32.718.461
2	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.188.060	230.929.399	161.540.200	392.469.599	32.718.461
2,1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5.473.200	1.483.200	2.250.000	3.733.200	1.740.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	-	-	1.740.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	1.483.200	-	1.483.200	-
2,2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	-	-	1.415.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	-	-	338.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	-	-	812.000
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
2,3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	418.299.860	229.446.199	159.290.200	388.736.399	29.563.461
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-

	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	-	-	1.082.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	369.460	-	369.460	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	9.000.000	450.000	9.450.000	1.350.000
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	180.000.000	40.000.000	220.000.000	20.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	14.378.400	12.636.739	1.483.200	14.119.939	258.461
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.700.000	27.440.000	10.575.000	38.015.000	1.685.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	-	106.782.000	106.782.000	5.188.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
III	2.16.03	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.379.713.260	1.002.093.940	45.400.000	1.047.493.940	332.219.320
3	2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.379.713.260	1.002.093.940	45.400.000	1.047.493.940	332.219.320
3,1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	137.034.840	93.932.840	42.025.000	95.957.840	1.077.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	-	-	547.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	240.000	-	240.000	240.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	317.840	-	317.840	290.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	3.375.000	-	3.375.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	-	2.025.000	2.025.000	-
	5.1.02.12.01.0004	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-
3,2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	908.161.100	3.375.000	911.536.100	331.142.320
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	212.600	-	212.600	621.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	435.000	-	435.000	338.000
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	477.520	-	477.520	746.000
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	4.500.000	900.000	5.400.000	-
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	895.024.080	-	895.024.080	298.347.120
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	1.606.900	-	1.606.900	4.290.200
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	5.905.000	2.475.000	8.380.000	1.800.000
IV	2.20	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	9.476.600	836.000	-	836.000	8.640.600
4	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.476.600	836.000	-	836.000	8.640.600
4,1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	9.141.600	836.000	-	836.000	8.305.600
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	-	-	1.405.600
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	836.000	-	836.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-

	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	-	-	5.400.000
4,2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	-	-	335.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	-	-	335.000
V	2,21	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
5	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
5,1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	-	4.591.076	726.684
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	-	-	313.000
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	498.000	-	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	-	-	186.760
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	4.093.076	-	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.294.765.122	3.144.670.429	426.065.759	3.570.736.188	724.028.934

Polewali, 02 Desember 2025

Kepala Dinas



Dr. Aco Musaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
BULAN DESEMBER 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I</i>	2.16.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.479.664.979	2.125.345.573	282.193.427	2.415.537.840	64.127.139
1	2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.835.260	6.834.860	6.000.160	12.835.020	240
1,1	2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,2	2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	6.835.100	6.834.860	-	6.834.860	240
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.835.100	6.834.860	-	6.834.860	240
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,3	2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
1,4	2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.160	-	6.000.160	6.000.160	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	-	240.000	240.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.410.160	-	4.410.160	4.410.160	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-
2	2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.964.014.909	1.694.193.283	207.375.187	1.909.567.310	54.447.599
2,1	2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.956.016.069	1.694.193.283	207.375.187	1.901.568.470	54.447.599
	5.1.01.01.01.0001	- Belanja Pokok PNS	1.261.570.976	1.158.953.469	94.891.340	1.253.844.809	7.726.167
	5.1.01.01.02.0001	- Belanja Keluarga PNS	117.585.474	100.271.554	7.180.880	107.452.434	10.133.040
	5.1.01.01.03.0001	- Belanja Jabatan PNS/struktural	95.352.675	87.945.000	6.765.000	94.710.000	642.675
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja fungsional PNS	100.821.570	52.172.000	38.213.480	90.385.480	10.436.090
	5.1.01.01.05.0001	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.660.425	32.495.000	2.955.000	35.450.000	210.425
	5.1.01.01.06.0001	- Belanja Tunjangan Beras PNS	70.239.434	59.384.400	4.562.460	63.946.860	6.292.574
	5.1.01.01.07.0001	- Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	11.325.137	4.854.024	1.777.923	6.631.947	4.693.190
	5.1.01.01.08.0001	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.094	17.742	1.381	19.123	11.971
	5.1.01.01.09.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.592.844	48.788.432	6.000.248	54.788.680	804.164
	5.1.01.01.10.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.618.696	2.372.427	227.740	2.600.167	18.529
	5.1.01.01.11.0001	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.856.176	7.117.332	683.220	7.800.552	55.624
	5.1.01.02.01.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.400.830	117.115.568	39.575.248	156.690.816	12.710.014

	5.1.01.02.03.0001	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0080	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-
	5.1.01.01.01.0002	- Belanja Pokok PNS PPPK	19.221.600	16.018.000	3.203.600	19.221.600	-
	5.1.01.01.02.0002	- Belanja Keluarga PPPK	2.691.024	1.922.160	384.432	2.306.592	384.432
	5.1.01.01.06.0002	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.623.080	1.086.300	217.260	1.303.560	319.520
	5.1.01.01.05.0002	- Belanja fungsional PPPK	3.240.000	2.700.000	540.000	3.240.000	-
	5.1.01.01.08.0002	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	495	99	594	8.406
	5.1.01.01.09.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	991.504	825.605	165.121	990.726	778
	5.1.01.01.10.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.134	38.445	7.689	46.134	-
	5.1.01.01.11.0002	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	138.396	115.330	23.066	138.396	-
2,2	2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.998.840	-	-	7.998.840	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	320.000	-	320.000	320.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	5.653.840	-	5.653.840	5.653.840	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.025.000	-	2.025.000	2.025.000	-
2,3	2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
3	2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	910.380	-	910.380	910.380	-
3,1	2.16.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	910.380	-	910.380	910.380	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	910.380	-	910.380	910.380	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
4	2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.026.780	66.738.877	21.285.480	88.024.357	2.423
4,1	2.16.01.2.06.0001	PEMYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.168.000	-	1.168.000	1.168.000	-
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.168.000	-	1.168.000	1.168.000	-
4,2	2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.508.900	12.718.900	790.000	13.508.900	-
	5.1.02.01.01.0031	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.414.900	2.414.900	-	2.414.900	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.620.000	830.000	790.000	1.620.000	-
	5.1.02.10.01.0002	- Belanja Modal Personal Komputer	9.474.000	9.474.000	-	9.474.000	-
	5.1.02.10.01.0005	- Belanja Modal Peraltan Komputer Laninnya	-	-	-	-	-
4,3	2.16.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.951.000	1.951.000	-	1.951.000	-
4,4	2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.560.000	15.365.000	11.195.000	26.560.000	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.490.000	12.690.000	10.800.000	23.490.000	-
	5.1.02.01.01.0053	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.070.000	2.675.000	395.000	3.070.000	-
4,5	2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.898.480	-	1.898.480	1.898.480	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.898.480	-	1.898.480	1.898.480	-
	5.1.02.01.01.0036	- Belanja bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan Untuk Kegatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-
4,6	2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.440.000	1.200.000	240.000	1.440.000	-
	5.1.02.02.01.0062	- Belanja langganan Jurnal/ surat Kanbar/ Majalah	1.440.000	1.200.000	240.000	1.440.000	-

4,7	2.16.01.2.06.09	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOSULTASI SKPD	41.500.400	35.503.977	5.994.000	41.497.977	2.423
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja perjalanan dinas Biasa	25.485.400	22.623.977	2.859.000	25.482.977	2.423
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	16.015.000	12.880.000	3.135.000	16.015.000	-
5	2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	378.843.650	339.681.553	29.485.220	369.166.773	9.676.877
5,1	2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.293.650	34.681.553	3.935.220	38.616.773	9.676.877
	5.1.02.02.01.0061	- Belanja Tagihan Listrik	47.093.650	34.681.553	3.935.220	38.616.773	8.476.877
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimile/Internet /TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	1.200.000
5,2	2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	330.550.000	305.000.000	25.550.000	330.550.000	-
	51.02.01.01.0001	- Belanja Bahan - Bahan Kimia	642.000	-	642.000	642.000	-
	51.02.01.01.0036	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk kegiatan kantor lainnya	408.000	-	408.000	408.000	-
	5.1.02.02.01.0026	-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152.200.000	147.800.000	4.400.000	152.200.000	-
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.250.000	113.750.000	8.500.000	122.250.000	-
	5.1.02.02.01.0032	- Belanja jasa Tenaga Keamanan	12.850.000	11.100.000	1.750.000	12.850.000	-
	5.1.02.02.02.0027	- Belanja jasa Tenaga Operator komputer	20.000.000	12.000.000	8.000.000	20.000.000	-
	5.1.02.02.02.0031	- Belanja jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	11.000.000	1.000.000	12.000.000	-
	5.1.02.02.02.0030	- Belanja jasa Tenaga Supir	10.200.000	9.350.000	850.000	10.200.000	-
6	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.034.000	17.897.000	17.137.000	35.034.000	-
6,1	2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.064.000	17.897.000	11.167.000	29.064.000	-
	5.1.02.01.01.0004	- Belanja Bahan - bahan Bakar dan pelumas	20.001.000	15.834.000	4.167.000	20.001.000	-
	5.1.02.02.01.0067	- Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	2.063.000	2.063.000	-	2.063.000	-
	5.1.02.03.02.0035	- Belanja Pemeliharaan Alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perora	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-
6,2	2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.970.000	-	5.970.000	5.970.000	-
	5.1.02.03.02.0121	- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -Alat rumah tangga-Alat pendingin	3.050.000	-	3.050.000	3.050.000	-
	5.1.02.03.02.0133	- Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio-peralatan stud	-	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0405	- Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer	2.920.000	-	2.920.000	2.920.000	-
II	2.16.02	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	425.188.060	392.469.599	27.002.000	419.471.599	5.716.461
2	2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.188.060	392.469.599	27.002.000	419.471.599	5.716.461
2,1	2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5.473.200	3.733.200	1.740.000	5.473.200	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.740.000	-	1.740.000	1.740.000	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	2.250.000	2.250.000	-	2.250.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.483.200	1.483.200	-	1.483.200	-
2,2	2.16.02.2.01.0019	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	1.415.000	-	1.150.000	1.150.000	265.000
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	338.000	-	338.000	338.000	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	812.000	-	812.000	812.000	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.000	-	-	-	265.000
2,3	2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	418.299.860	388.736.399	24.112.000	412.848.399	5.451.461
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-

	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.082.000	-	1.082.000	1.082.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	369.460	369.460	-	369.460	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	10.800.000	9.450.000	1.350.000	10.800.000	-
	5.1.02.02.01.0028	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	240.000.000	220.000.000	20.000.000	240.000.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	14.378.400	14.119.939	-	14.119.939	258.461
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.700.000	38.015.000	1.680.000	39.695.000	5.000
	5.1.02.06.01.0001	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0002	- Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.01.0003	- Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	111.970.000	106.782.000	-	106.782.000	5.188.000
	5.1.02.06.01.0006	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	-
	5.1.02.06.02.0011	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-
III	2.16.03	PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.379.713.260	1.047.493.940	332.213.560	1.379.707.500	5.760
3	2.16.03.2.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.379.713.260	1.047.493.940	332.213.560	1.379.707.500	5.760
3,1	2.16.03.2.02.0029	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	137.034.840	135.957.840	1.077.000	137.034.840	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	547.000	-	547.000	547.000	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	480.000	240.000	240.000	480.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	607.840	317.840	290.000	607.840	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	3.375.000	3.375.000	-	3.375.000	-
	5.1.02.03.06.0005	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud-software	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000	2.025.000	-	2.025.000	-
	5.1.02.12.01.0004	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-
3,2	2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.242.678.420	911.536.100	331.136.560	1.242.672.660	5.760
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	833.600	212.600	621.000	833.600	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	773.000	435.000	338.000	773.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.223.520	477.520	746.000	1.223.520	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	5.400.000	5.400.000	-	5.400.000	-
	5.1.02.02.01.0063	- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.193.371.200	895.024.080	298.341.360	1.193.365.440	5.760
	5.1.02.03.06.0002	- Belanja Pemeliharaan Aset tdak berwujud- Lisensi dan Franchise	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.897.100	1.606.900	4.290.200	5.897.100	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.180.000	8.380.000	1.800.000	10.180.000	-
IV	2.20	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	9.476.600	836.000	8.640.600	9.476.600	-
4	2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.476.600	836.000	8.640.600	9.476.600	-
4,1	2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	9.141.600	836.000	8.305.600	9.141.600	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.405.600	-	1.405.600	1.405.600	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	836.000	836.000	-	836.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-

	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	-	5.400.000	5.400.000	-
4,2	2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	335.000	-	335.000	335.000	-
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.0201.0003	- Honorarium Narasumber atau, pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	335.000	-	335.000	335.000	-
V	2,21	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.317.760	4.591.076	499.760	5.090.836	226.924
5	2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	499.760	5.090.836	226.924
5,1	2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.760	4.591.076	499.760	5.090.836	226.924
	5.1.02.01.01.0024	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	313.000	-	313.000	313.000	-
	5.1.02.01.01.0025	- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	498.000	498.000	-	498.000	-
	5.1.02.01.01.0026	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	186.760	-	186.760	186.760	-
	5.1.02.01.01.0052	- Belanja makanan dan minuman Rapat	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.04.0355	- Belanja sewa Peralatan Umum	4.320.000	4.093.076	-	4.093.076	226.924
	5.1.02.04.01.0001	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam biasa	-	-	-	-	-
	5.1.02.04.01.0003	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-
		JUMLAH	4.299.360.659	3.570.736.188	650.549.347	4.229.284.375	70.076.284

Polewali, 02 Januari 2026

Kepala Dinas



Dr. Aco Misaddad HM, M,Ag,M.Si

NIP. 197510062010011007

POHON KINERJA

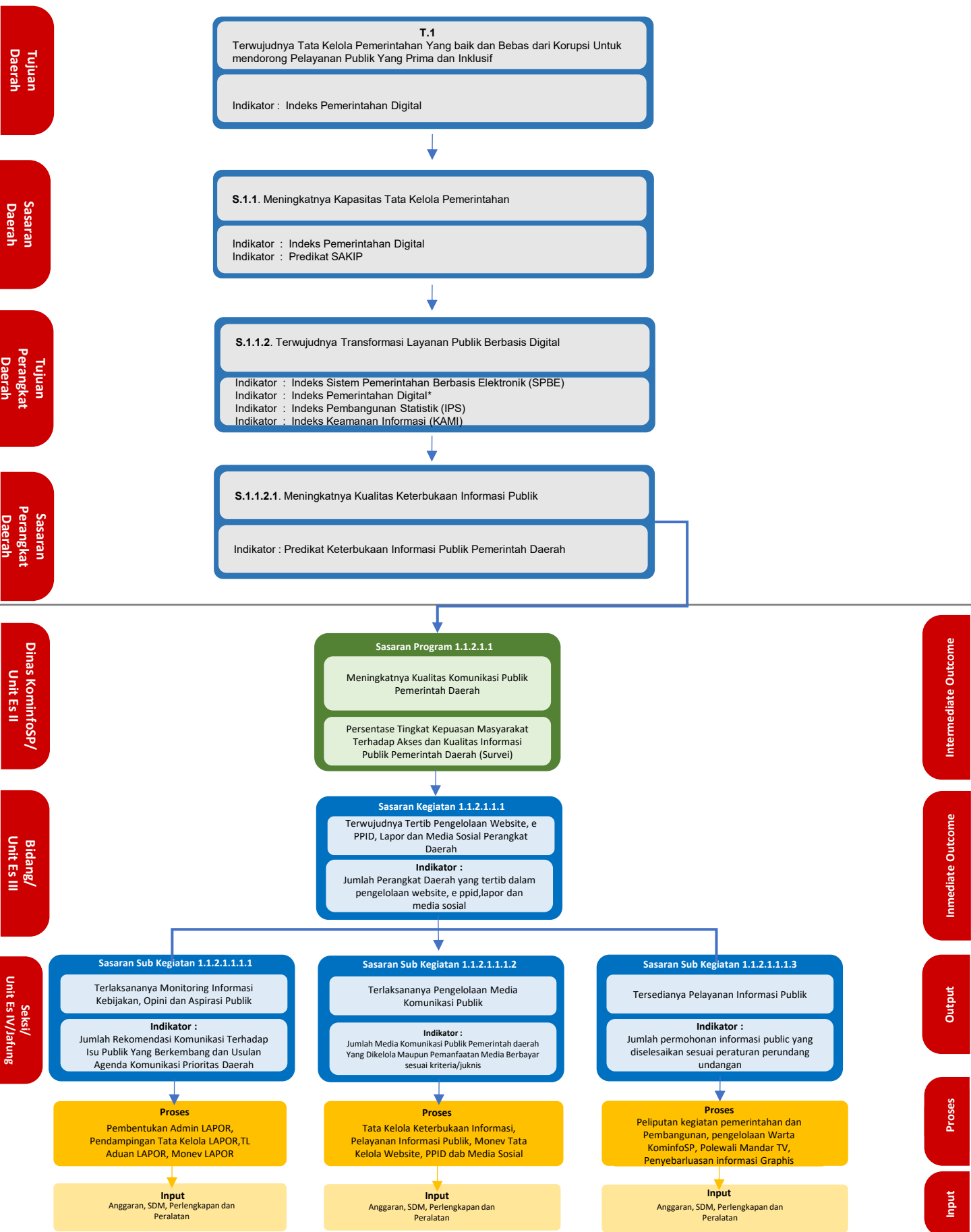
TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



POHON KINERJA

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2025





POHON KINERJA

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan Daerah

T.1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Bebas dari Korupsi Untuk mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif

Indikator : Indeks Pemerintahan Digital

Sasaran Daerah

S.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator : Indeks Pemerintahan Digital
Indikator : Predikat SAKIP

Tujuan Perangkat Daerah

S.1.1.2. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital

Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indikator : Indeks Pemerintahan Digital*
Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Indikator : Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Sasaran Perangkat Daerah

S.1.1.2.2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator : Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE
Indikator : Indeks Pemerintahan Digital*

Dinas Kominfo/Unit Es II

Sasaran Program 1.1.2.1.2

Meningkatnya kualitas Layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik

Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik

Intermediate Outcome

Bidang/Unit Es III

Sasaran Kegiatan 1.1.2.1.2.1

Meningkatnya kualitas layanan berbasis teknologi informasi yang didukung TIK

Indikator : Jumlah fungsi-fungsi utama pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung TIK

Immediate Outcome

Seksi/Unit Es IV/Jaring

Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.1.2.1.1

Tersedianya tata Kelola dan layanan system pemerintahan berbasis elektronik

Indikator : Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan

Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.1.2.1.2

Tersedianya Akses Internet

Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Output

Proses

Penyusunan/Reviu SPBE, Manajemen SPBE, Fasilitasi Pembangunan/Pegembangan aplikasi

Proses

Pelnyediaan bandwidth OPD, Layanan Pusat Data, Pengembangan SDM TIK, Fasilitasi Layanan Jaringan Internet

Proses

Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

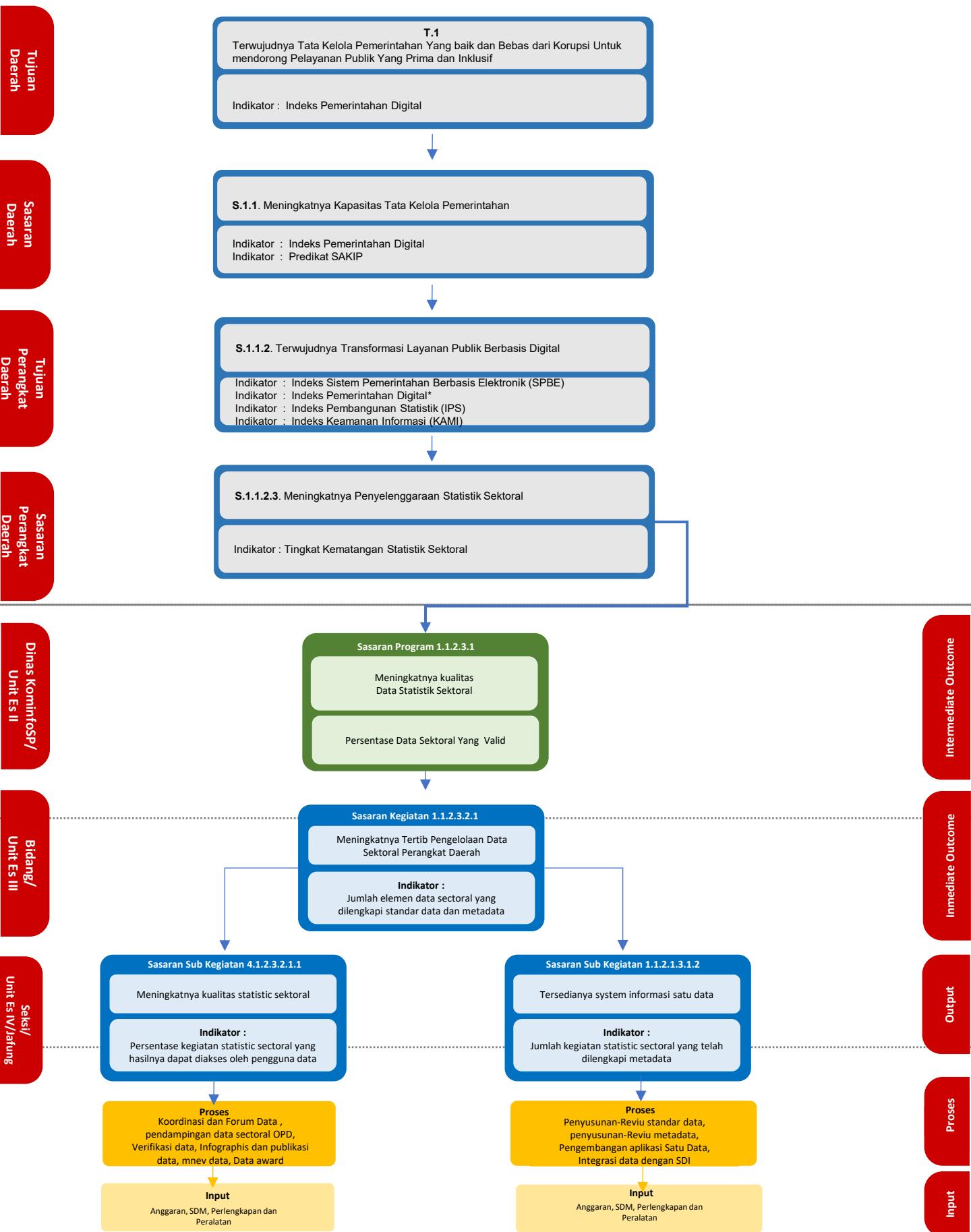
Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Input



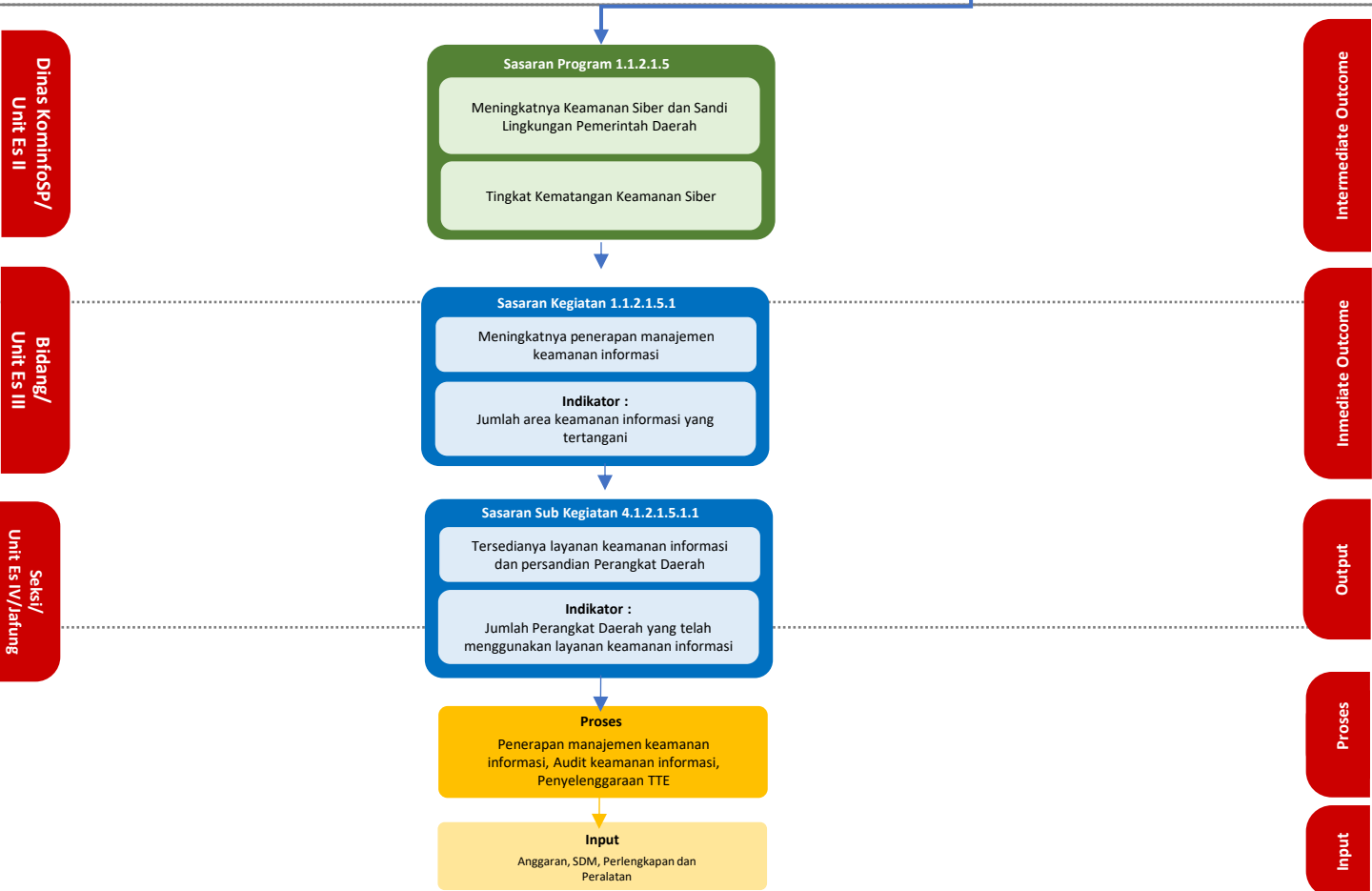
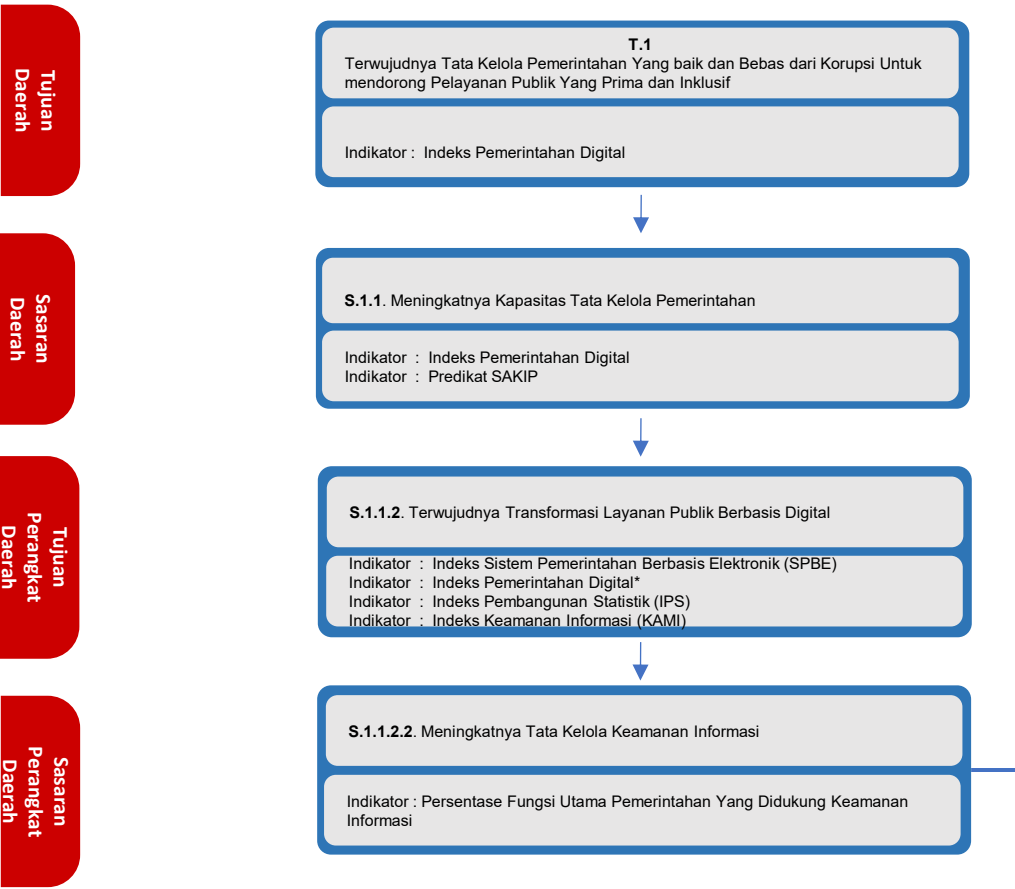
POHON KINERJA URUSAN STATISTIK





POHON KINERJA

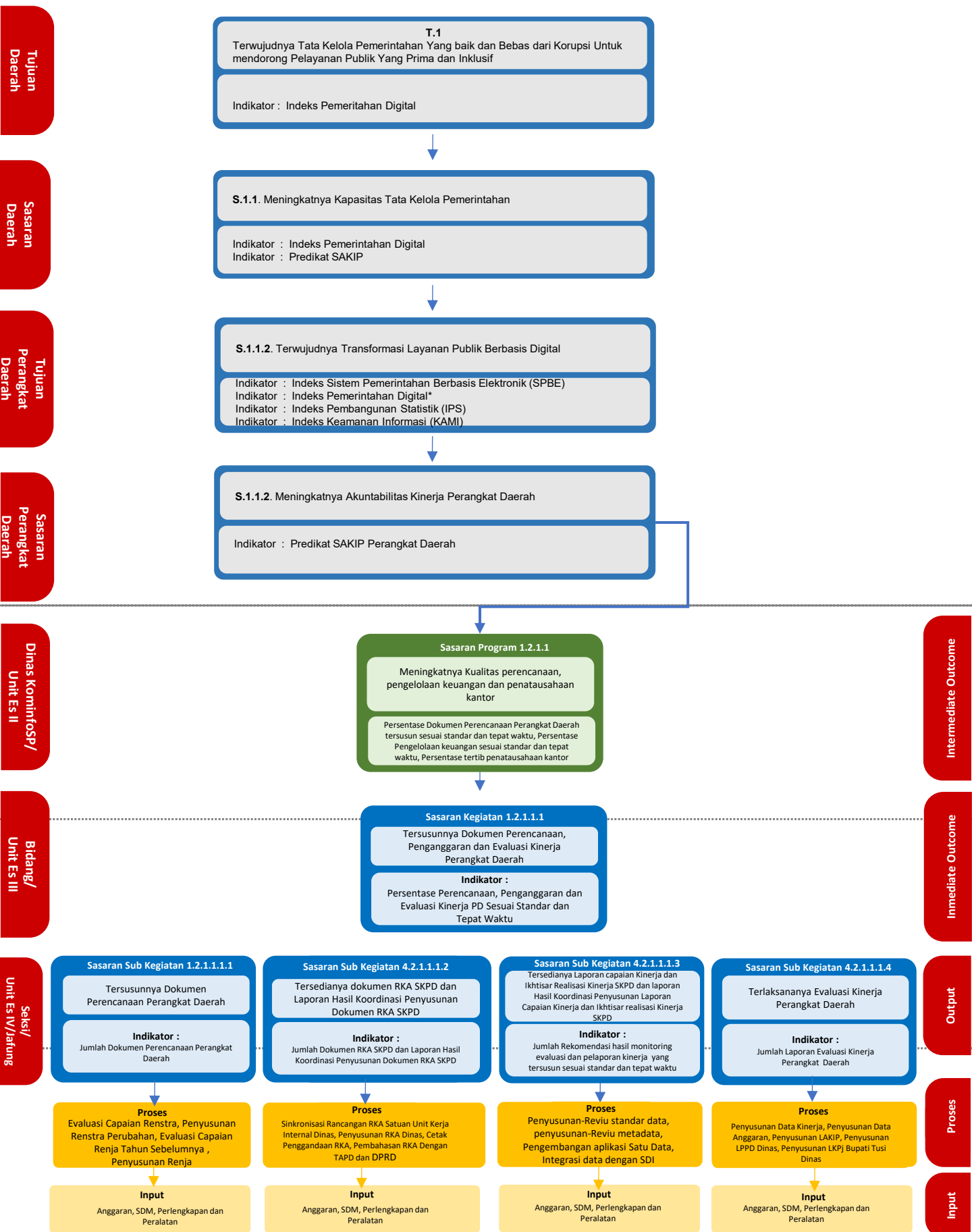
URUSAN PERSANDIAN





POHON KINERJA

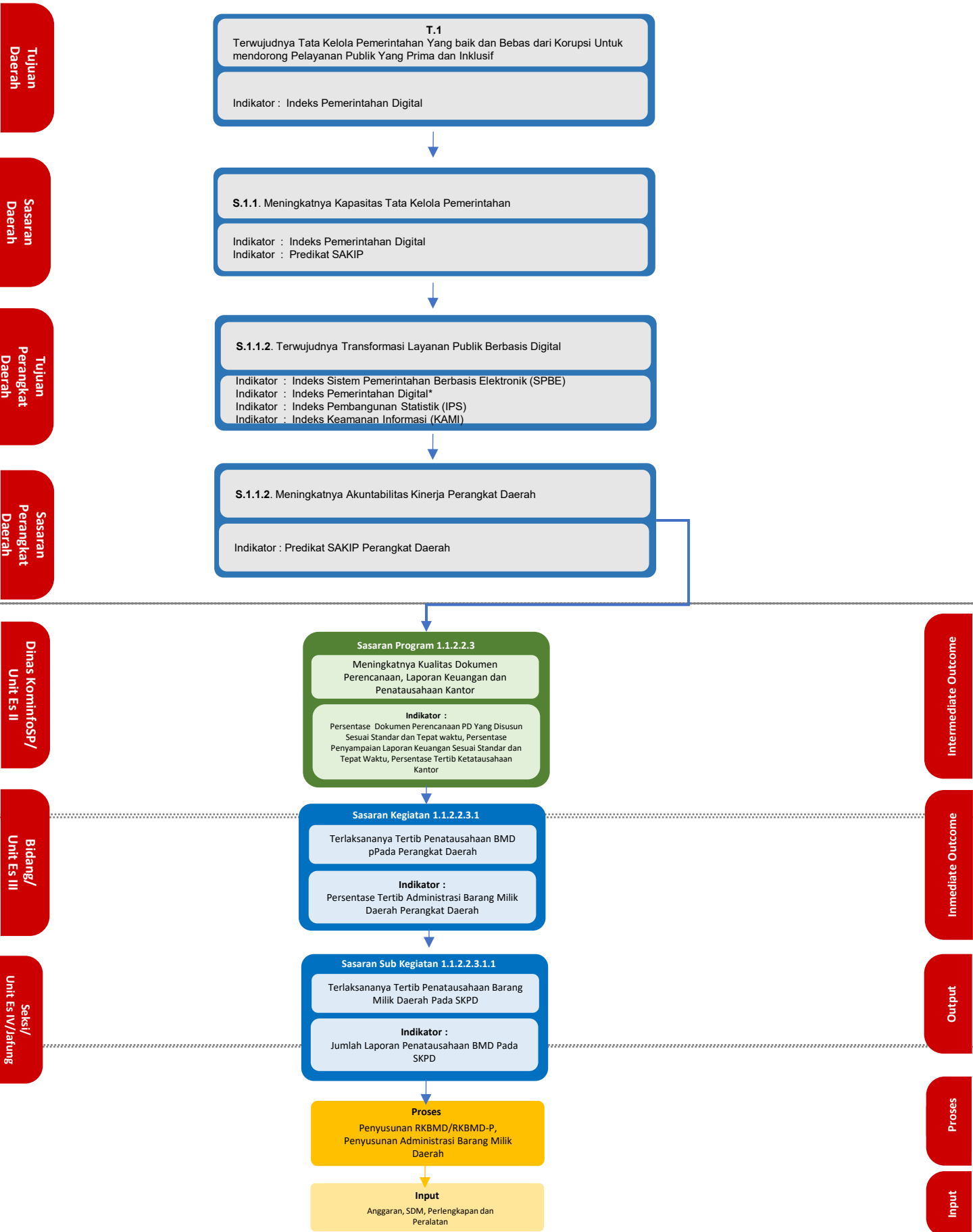
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

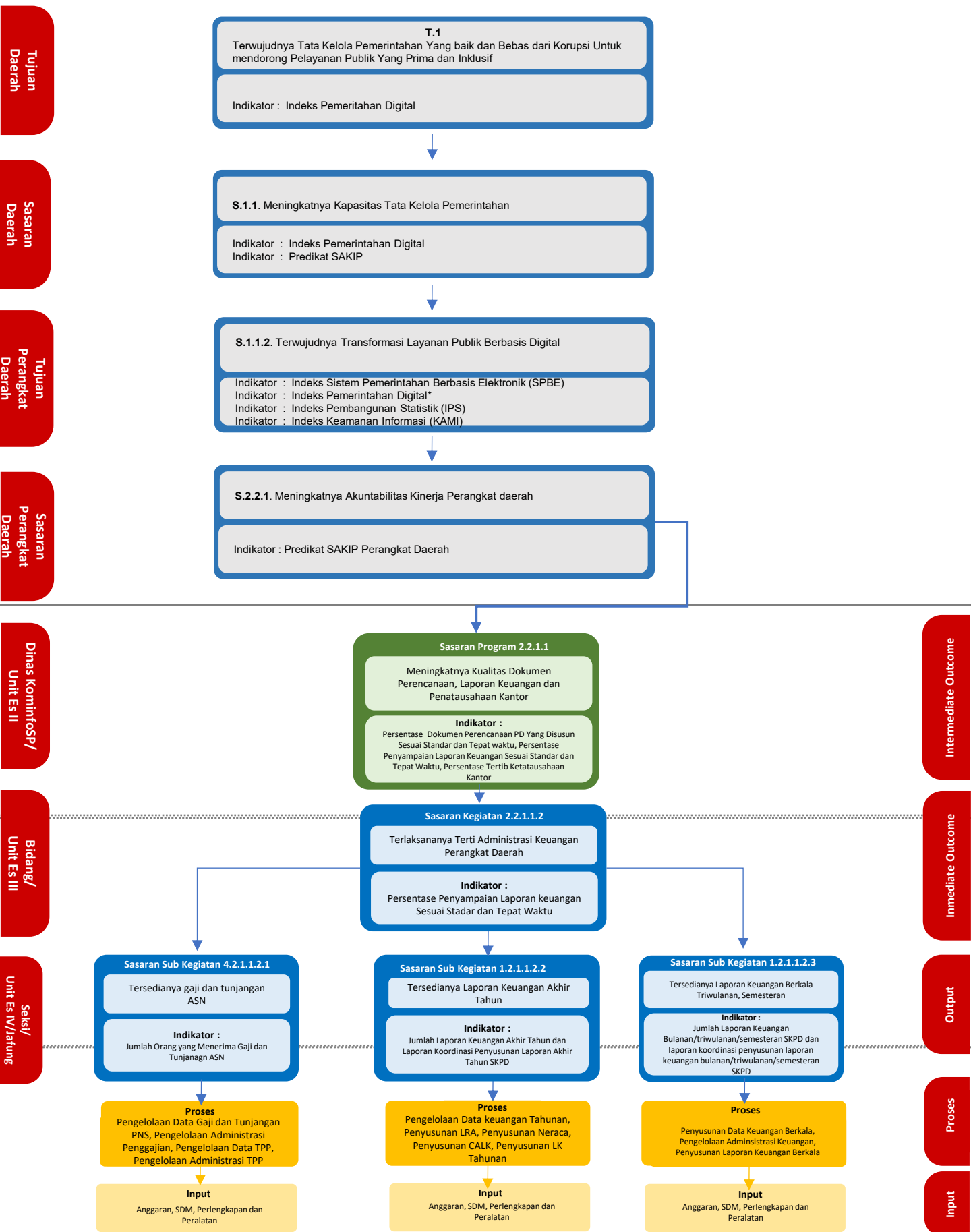
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

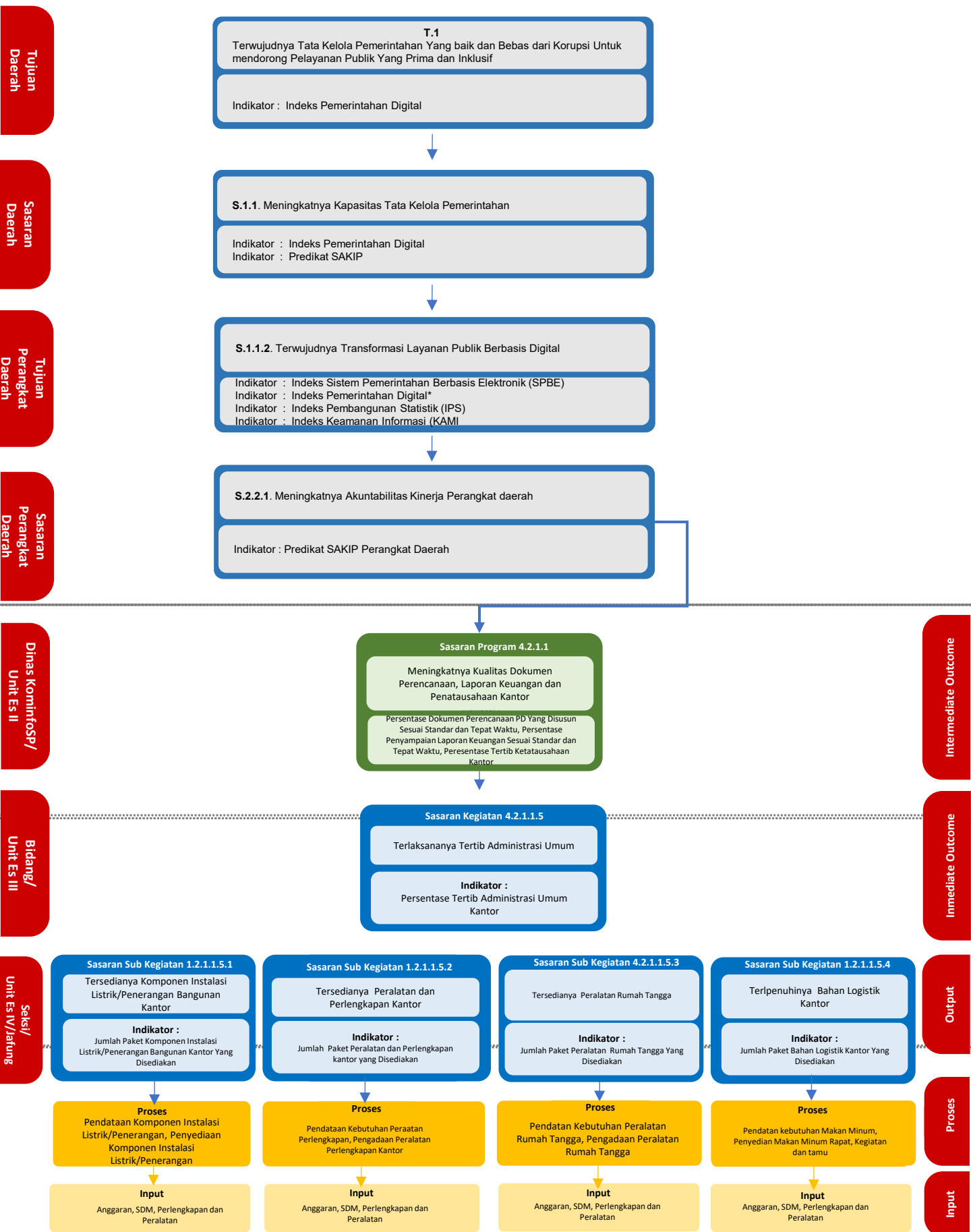
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

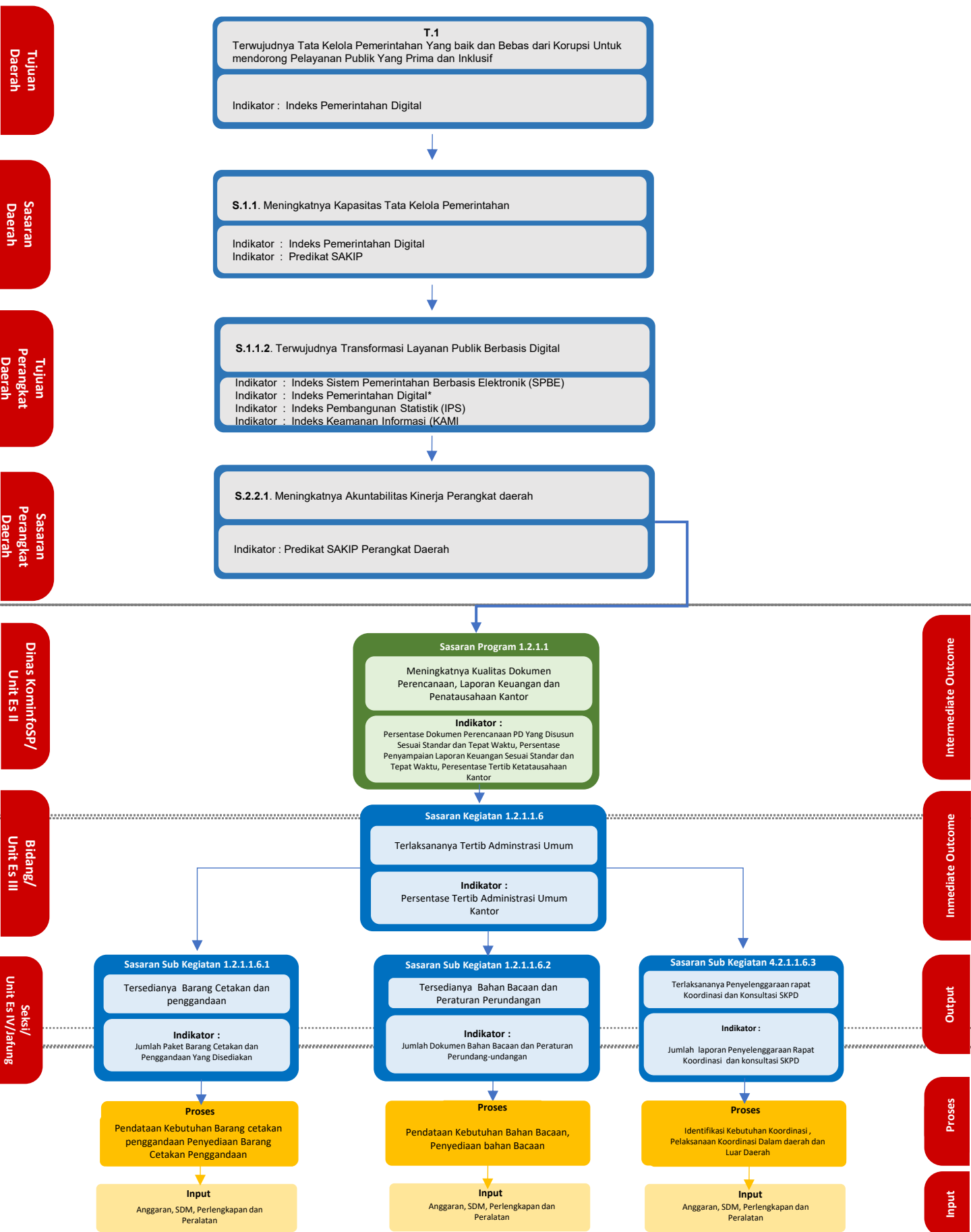
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

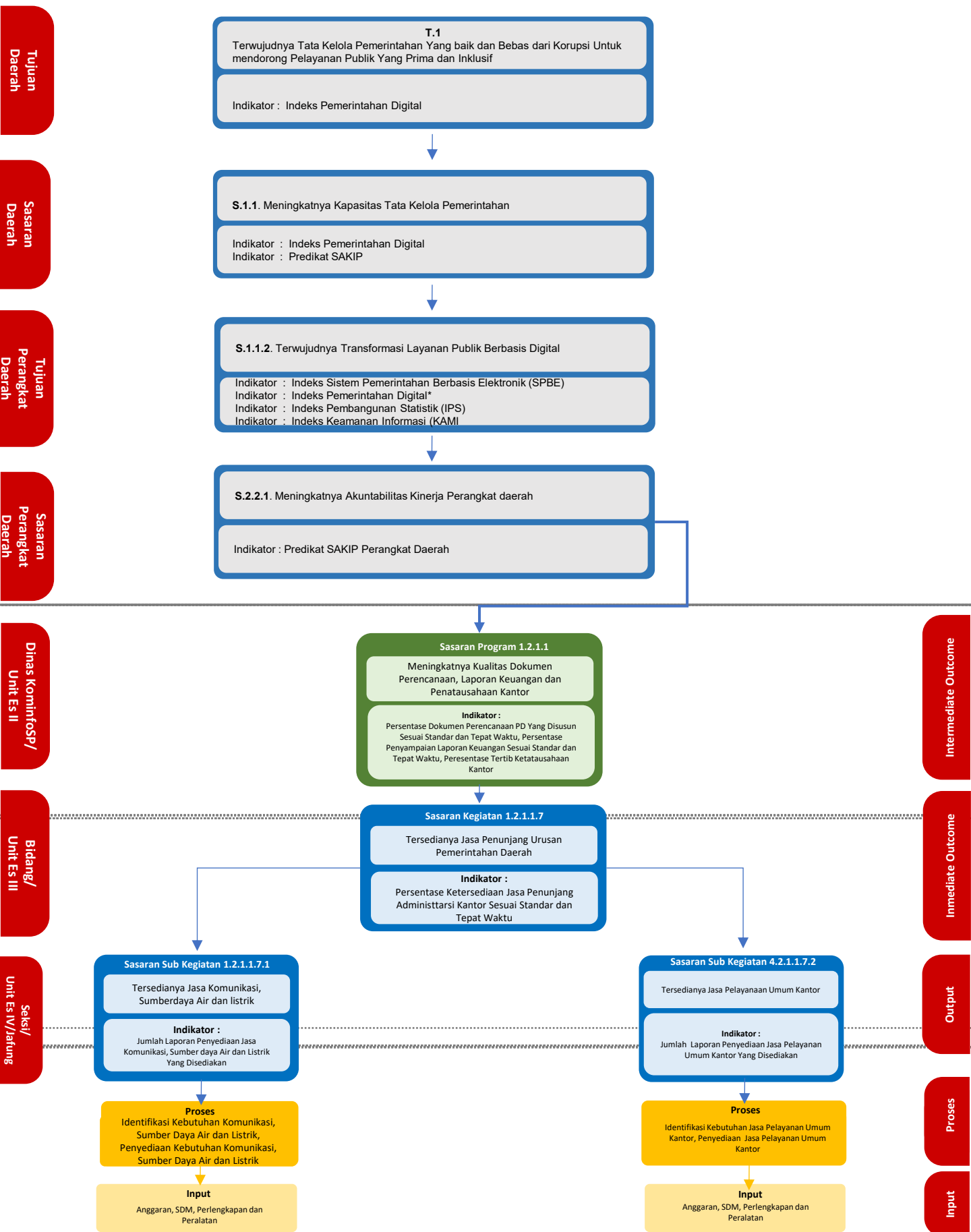
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

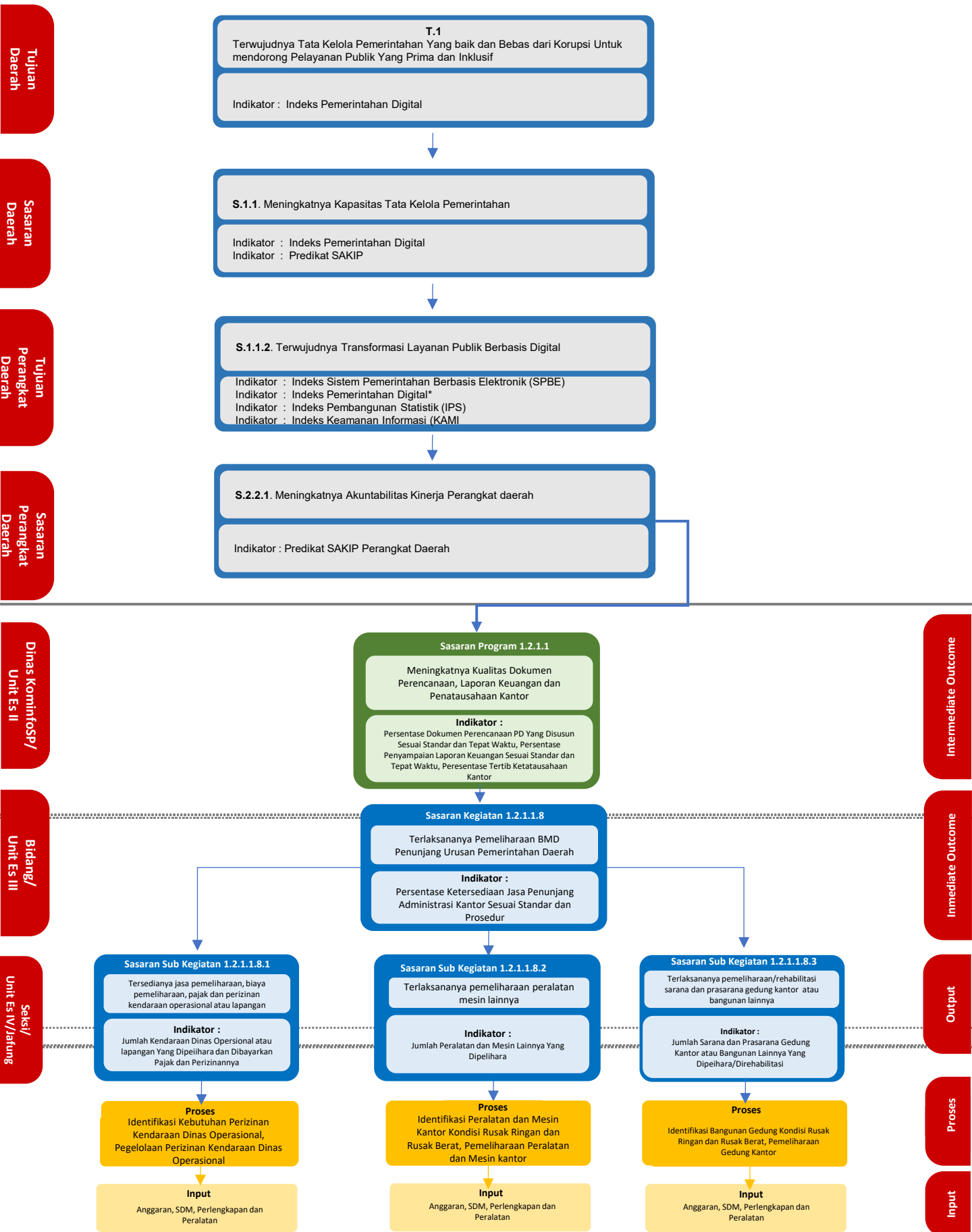
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





POHON KINERJA

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MONEV RENCANA AKSI SAKIP

TRIWULAN I – IV TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Capaian Kinerja Sasaran (Eselon II)

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	Aksi		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Jumlah	
1	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase fungsi utama pemerintahan yang didukung keamanan informasi	persen	23,33												25.00	25	107.15		
2	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A (83,75)													A (84,00)	84.00	100.29	
3	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	angka	Terdefenisi (2,90)													Terdefenisi (2,60)	Terdefenisi (2,60)	100	
4	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	angka	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)													Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)	Terstandarisasi Kolaborasi (3,4)	100	
5	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	predikat	Menuju Informatif (89,00)													Informatif (90,75)	Informatif (90,75)	101.96	

No	Tahun	Pejabat	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran												Realisasi(%)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah												
1	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5,317,760															4,591,076	499,760	5,090,836	95.73								
2	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,479,664,979	113,132,844	115,082,077	289,500,507	141,621,089	147,661,121	254,954,051	240,765,883	159,496,155	188,944,436	255,061,851	219,125,559	290,192,267	2,415,537,840					97.41								
3	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9,476,600															836,000		8,640,600	9,476,600	100.00							
4	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,379,713,260															298,341,360		382,274,320	13,136,900	308,341,360	45,400,000	332,213,560	1,379,707,500	100.00			
5	2025	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	425,188,060															40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	46,965,539	39,293,860	24,670,000	20,000,000	161,540,200	27,002,000	419,471,599	98.66

Capaian Kinerja Sasaran Program (Eselon III)

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	Aksi
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase tertib ketatausahaan kantor	persen	100			25		25			25			25	100	100	
2	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	100			25		25			25			25	100	100	
3	2025	Sekretaris Dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	persen	100			40.00		20			20			20	100	100	
4	2025	Kepala Bidang Statistik	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Valid	persen	83				7,67				16.93			59.35	83.95	103.55	
5	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	angka	4											4	4	100	
6	2025	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	persen	80,25			50		100			100			100	100	125	
7	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	persen	81.66								81.66				81.66	100	

No	Tahun	Pejabat	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran												Realisasi(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
1	2025	Sekretaris Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,479,664,979	113,132,844	115,082,077	289,500,507	141,621,089	147,661,121	254,954,051	240,765,883	159,496,155	188,944,436	255,061,851	219,125,559	290,192,267	2,415,537,840	97.41
2	2025	Kepala Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9,476,600								836,000				8,640,600	9,476,600	100.00
3	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5,317,760							4,591,076					499,760	5,090,836	95.73
4	2025	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	425,188,060			40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	46,965,539	39,293,860	24,670,000	20,000,000	161,540,200	27,002,000	419,471,599	98.66
5	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,379,713,260					298,341,360		382,274,320	13,136,900		308,341,360	45,400,000	332,213,560	1,379,707,500	100.00

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan (Eselon III)

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	Aksi
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2025	Sekretaris Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMMD	persen	100						26,51			6,6		66,89	100	100	
2	2025	Sekretaris Dinas	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	persen	100			25		25			25			25	100	100	
3	2025	Sekretaris Dinas	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	persen	100			25		25			25			25	100	100	
4	2025	Sekretaris Dinas	Terlaksananya tertib penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	persen	100					50			10			40	100	100	
5	2025	Sekretaris Dinas	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	persen	100			25		25			25			25	100	100	
6	2025	Sekretaris Dinas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	persen	100			40		20			20			20	100	100	
7	2025	Kepala Bidang Statistik	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata	elemen data	455				29				64			289	382	83,96	
8	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Membbaiknya penerapan manajemen keamanan informasi	Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani	area	6					6							6	100	
9	2025	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Website, e-PPID, Lapo dan Media Sosial Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapo dan Media Sosial	OPD	27			3		4			10			10	27	100	
10	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Meningkatnya Kualitas Layanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Didukung TIK	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK	fungsi	98					98							98	100	

No	Tahun	Pejabat	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran												Realisasi(%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah
1	2025	Sekretaris Dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,034,000							9,167,000	1,000,000		7,730,000		17,137,000	35,034,000	100,00
2	2025	Sekretaris Dinas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378,843,650			60,824,788	25,500,000	30,812,521	25,500,000	58,945,913	29,133,978	25,500,000	30,932,773	62,731,580	29,485,220	389,166,773	97,45
3	2025	Sekretaris Dinas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88,026,780							19,153,900	12,513,577	6,345,400	240,000	28,486,000	21,285,480	88,024,357	100,00
4	2025	Sekretaris Dinas	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	910,380												910,380	910,380	100,00
5	2025	Sekretaris Dinas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,904,014,909	113,132,844	115,082,077	228,875,719	116,121,089	116,848,600	229,454,061	163,499,070	116,848,600	157,099,036	216,159,078	131,073,119	215,374,027	1,909,667,310	97,23
6	2025	Sekretaris Dinas	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,835,260											6,834,860	6,000,160	12,835,020	100,00
7	2025	Kepala Bidang Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9,476,600							836,000					8,640,600	9,476,600	100,00
8	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,317,760							4,591,076					499,780	5,090,836	95,73
9	2025	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	425,186,000			40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	46,965,539	39,293,860	24,670,000	20,000,000	161,540,200	27,002,000	419,471,569	98,66
10	2025	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,379,713,280					298,341,380		382,274,320	13,136,900		308,341,360	46,400,000	332,213,560	1,379,707,500	100,00

Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	Aksi
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9						4				5	9	100		
2	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6						1		3		2	6	100		
3	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
4	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
5	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan SKPD	laporan	102						72		17		82	161	148.04		
6	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1			0.25		0.25		0.25			0.25	1	100		
7	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2			0.5		0.5		0.5			0.5	2	100		
8	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	203			30		60		40			73	203	100		
9	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Peralatan rumah tangga Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4					4						4	100		
10	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2						1				1	2	100		
11	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6					6						6	100		
12	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Terlaksananya Penatausahaan BMD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	laporan	6						3		1		2	6	100		

No	Tahun	Pejabat	Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran												Realisasi(%)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Jumlah	
1	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,970,000													5,970,000	5,970,000	100.00
2	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,064,000								9,167,000	1,000,000		7,730,000		11,167,000	29,064,000	100.00
3	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330,550,000			51,000,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	53,000,000	25,500,000	25,500,000	24,500,000	49,000,000	25,550,000	330,550,000	100.00	
4	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,293,650			9,624,788		5,312,521			5,945,913	3,633,978		6,432,773	3,731,580	3,935,220	38,616,773	79.96
5	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,500,400								8,770,000	12,393,577	6,225,400		10,115,000	5,094,000	41,497,977	99.99
6	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,440,000								720,000	120,000	120,000		240,000	240,000	1,440,000	100.00
7	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,898,480													1,898,480	1,898,480	100.00
8	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,560,000												7,070,000	11,195,000	26,560,000	100.00
9	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,951,000													1,951,000	1,951,000	100.00
10	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,508,900												11,301,000	790,000	13,508,900	100.00
11	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,168,000													1,168,000	1,168,000	100.00
12	2025	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	910,380													910,380	910,380	100.00

Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)

13	2025	Perencana	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan koordinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun SKPD	laporan	1			1								1	100													
14	2025	Perencana	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	27	27	122.72													
15	2025	Perencana	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1		1									1	100													
16	2025	Perencana	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4		1			1			1			4	100													
17	2025	Statistisi 2	Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	kegiatan	80				36				14		30	80	100													
18	2025	Statistisi 1	Terpenuhinya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	83					24.60			16.93		59.35	83.95	103.55													
19	2025	Pranata Komputer 2	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian oleh Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	OPD	44					44						44	100													
20	2025	Pranata Humas 1	Terselesaikannya Permohonan informasi public sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	6					4		2	1			7	116,66													
21	2025	Pranata Humas 1	Terkelolanya Media komunikasi public Pemerintah Daerah	Jumlah media komunikasi public Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	5		5									5	100													
22	2025	Pranata Humas 2	Tersedianya Rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah	rekomendasi	1								1			1	100													
23	2025	Pranata Komputer 1	Tersedianya Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	39			39								39	100													
24	2025	Pranata Komputer 2	Terlaksananya pembangunan atau pengembangan aplikasi	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	aplikasi	1							1				1	100													
13	2025	Perencana	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														7,998,840	7,998,840	100.00												
14	2025	Perencana	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														1,956,016,069	113,132,844	115,082,077	228,875,719	116,121,089	116,848,800	229,454,061	153,499,070	116,848,800	157,099,036	216,159,078	131,073,119	207,375,187	1,901,568,470	97.22
15	2025	Perencana	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														6,000,180	6,000,180	100.00												
16	2025	Perencana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - DFA SKPD														6,835,100	6,834,860	100.00												
17	2025	Statistisi 2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia														335,000	335,000	100.00												
18	2025	Statistisi 1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														9,141,600	838,000	8,305,600	9,141,600	100.00										
19	2025	Pranata Komputer 2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														5,317,760	4,591,076	499,780	5,090,836	95.73										
20	2025	Pranata Humas 1	Pelayanan Informasi Publik														6,473,200	1,483,200	2,260,000	1,740,000	5,473,200	100.00									
21	2025	Pranata Humas 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														418,299,860	60,000,000	20,000,000	20,000,000	48,965,539	37,810,860	24,670,000	20,000,000	158,290,200	24,112,000	412,848,399	98.70			
22	2025	Pranata Humas 2	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik														1,415,000			1,150,000	1,150,000	81.27									
23	2025	Pranata Komputer 1	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE														1,242,678,420	268,341,360	301,716,480	9,761,900	298,341,360	3,375,000	331,136,660	1,242,672,660	100.00						
24	2025	Pranata Komputer 2	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														137,034,840	80,557,840	3,375,000	10,000,000	42,025,000	1,077,000	137,034,840	100.00							